

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN PASCA GEMPA  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

TESIS

OLEH  
**FITRIA APRIANI**  
NIM 17710027



**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN PASCA GEMPA  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan Program Magister  
Manajemen Pendidikan Islam

OLEH  
FITRIA APRIANI  
NIM 17710027

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat” ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dengan penguji pada tanggal 22 Mei 2019

Dewan Penguji,

Dr. Sri Harini, M.Si  
NIP. 197310142001122002

Penguji Utama

Dr. Hj. Sutiah, M.Pd  
NIP:196510061993032003

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag  
NIP:197503102003121004

Pembimbing II



Mengetahui,  
Direktur PPs

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd  
NIP. 195507171982031005

Tesis dengan judul “**Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat**” ini telah di periksa dan disetujui,

Malang, April 2019  
Pembimbing I

  
(Dr. Hj. Sutiah, M.Pd)  
NIP: 196510061993032003

Malang, April 2019  
Pembimbing II

  
(Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag)  
NIP: 197503102003121004

Malang, April 2019  
Mengetahui,  
Ketua Program Manajemen Pendidikan Islam

  
(Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, AK)  
NIP: 196903032000031002

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Fitria Apriani

NIM : 17710027

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Islam

Judul Tesis : Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten  
Lombok Barat

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam hasil penelitian ini tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, April 2019  
Hormat saya



Fitria Apriani

## **Motto**

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila  
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh*

*(QS Al Insyiroh 6-7)*



## **Persembahan**

*Kupersembahkan:*

*Teruntuk Bapak dan ibu tercinta*

*(Bapak Jumatri, S.Pd dan Nurhikmah, S.Pdi)*

*Terimakasih untuk do'a yang tiada henti, luapan cinta dan kasih sayang yang tak pernah luput, nasehat, pengorbanan, perhatian dan dukungan yang selalu menguatkanmu dalam setiap langkah hidupmu. Terimakasih untuk segalanya yang telah engkau berikan untuk kebaikanku.*

*Kedua adikmu (Tika Puspa Pandini dan Dandi Maulana) yang selalu mendukung dan mendoakan, mudah-mudahan semuanya selalu dalam Ridho dan*

*Rahmat Allah*

*SWT.*

## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil ‘*Ālamîn*, segala puji hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang telah memberikan kekuatan serta kesempatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis yang berjudul “*Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat*”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazâkumullâh ahsanul jaza’*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Wahidmurni, M. Pd, AK., selaku Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Suti’ah, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. Muhammad In’am Esha, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kritikan, saran dan koreksinya dalam penulisan tesis.

6. Drs. M Hendrayadi Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang telah mengizinkan penelitian.
7. Kepala sekolah terdampak gempa Kabupaten Lombok Barat yang telah mengizinkan penelitian.
8. Kedua orang tua, ayahanda Jumantri dan Nurhikmah yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a yang tak henti-hentinya untukku.
9. Semua keluarga besar di Lombok yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik untukku.
10. Shahibul Ardhi yang selalu mau di repotkan dan selalu memberikan dukungan, motivasi sehingga tesis ini bisa selesai.
11. Semeton FKML yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dikala suntuk.
12. Teman-teman Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khususnya Program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A'17 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga selama masa studi.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk lebih sempurna dan bermanfaat bagi pembaca.

Batu, 15 April 2019  
Penulis,

Fitria Apriani

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis .....	v
Motto .....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Abstrak .....	xvi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Konsep Kebijakan .....	24
1. Kebijakan Pendidikan .....	24
2. Formulasi Kebijakan .....	31
3. Implementasi Kebijakan .....	40
4. Evaluasi Kebijakan .....	46

B. Penanganan Pendidikan Pasca Gempa.....	52
C. Bencana Gempa Bumi.....	56
1. Macam-macam Gempa Bumi .....	57
2. Dampak Gempa Bumi Terhadap Pendidikan.....	57
D. Kerangka Berfikir.....	60

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Kehadiran Peneliti .....	62
C. Latar Penelitian .....	64
D. Data dan Sumber Data .....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	67
1. Observasi .....	67
2. Wawancara.....	69
3. Dokumentasi .....	71
F. Tehnik Analisis data.....	72
1. Reduksi Data .....	73
2. Penyajian Data .....	73
3. Verifikasi .....	74
G. Keabsahan Data.....	74

### **BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Paparan Data Objek Penelitian.....	78
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat .....	78
2. Visi dan Misi .....	80
3. Struktur Organisasi .....	81
B. Paparan Hasil Penelitian .....	82
1. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	82
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	97
3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.....	104
C. Temuan Penelitian.....	109

### **BAB V PEMBAHASAN**

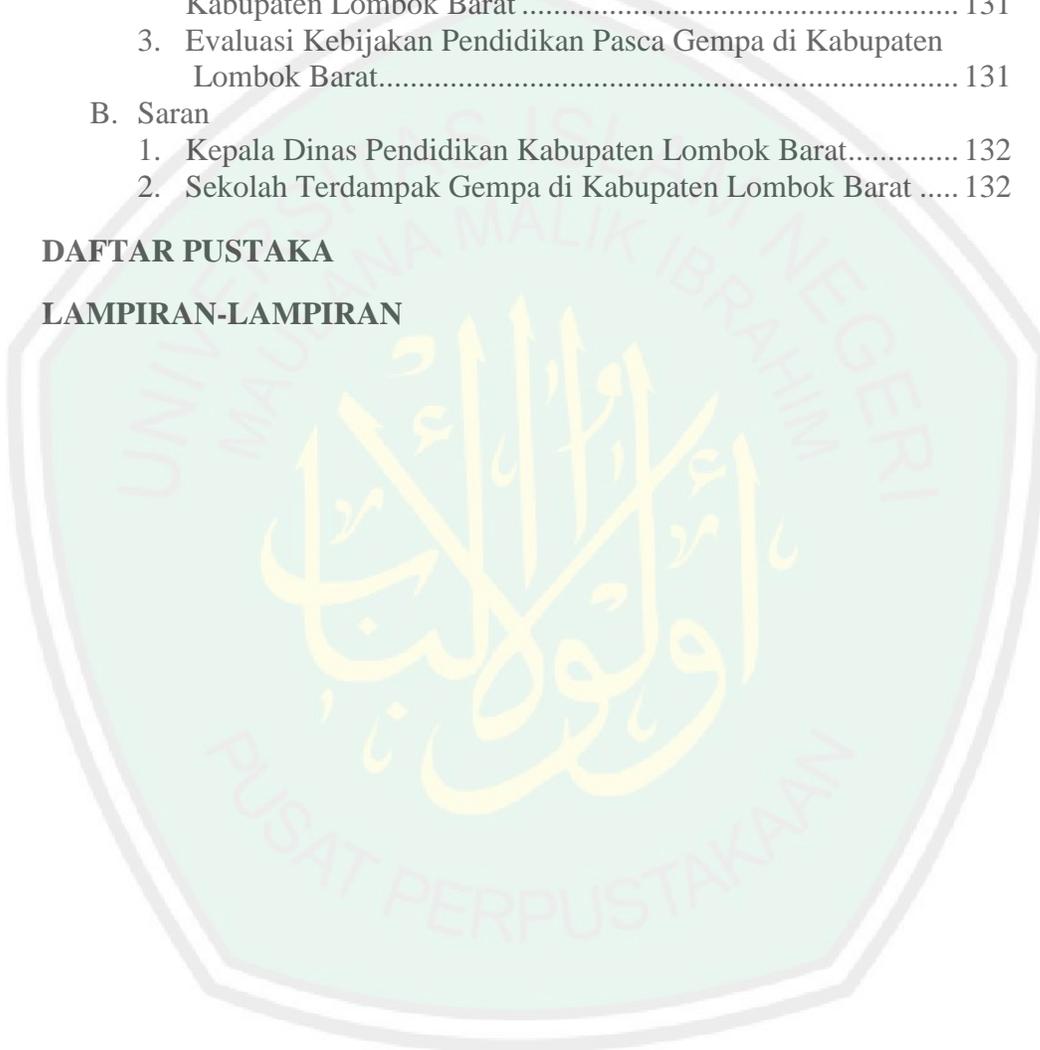
A. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	115
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.....	123
C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.....	126

## **BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan .....	105
1. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	130
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	131
3. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.....	131
B. Saran .....	
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.....	132
2. Sekolah Terdampak Gempa di Kabupaten Lombok Barat .....	132

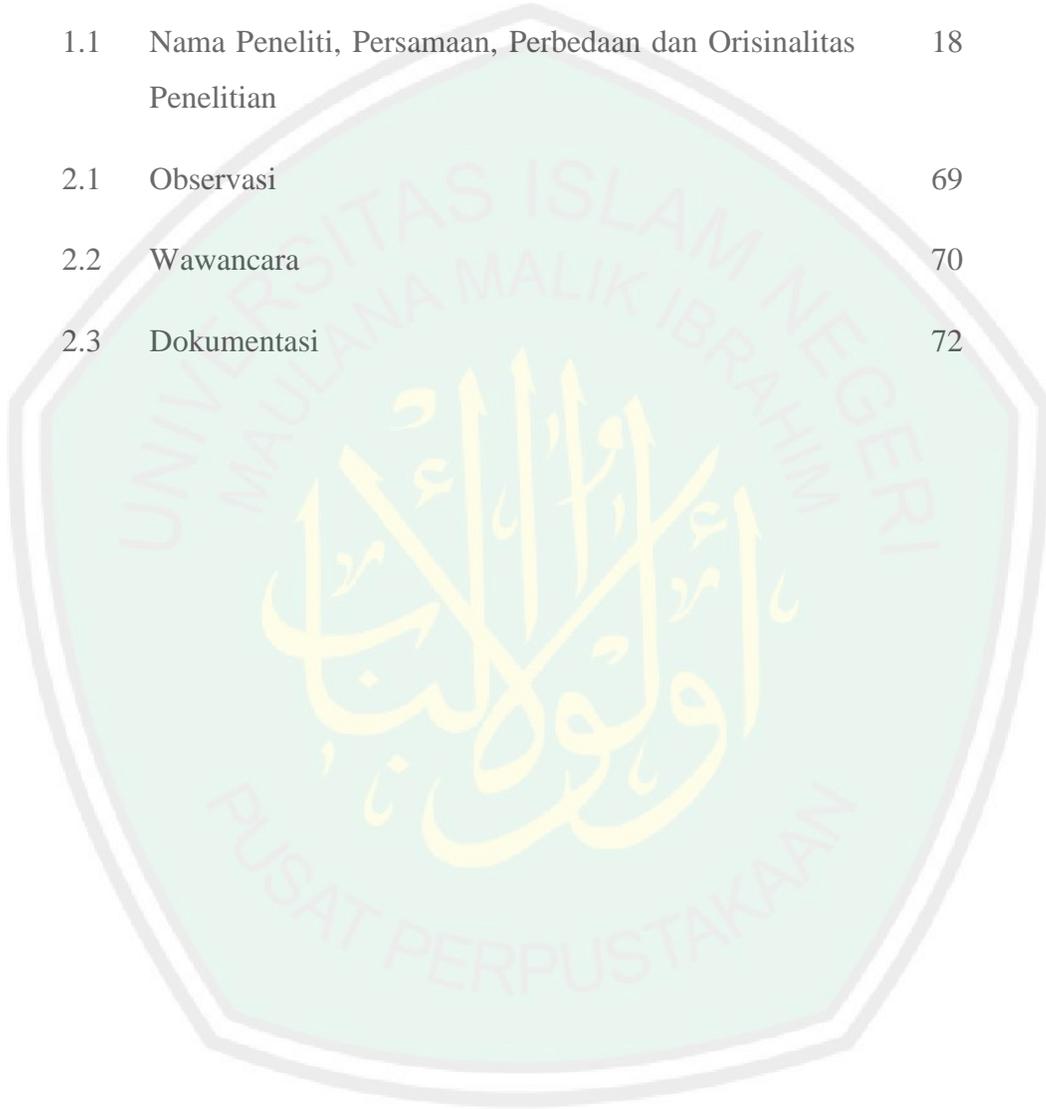
## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Nama Peneliti, Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian	18
2.1	Observasi	69
2.2	Wawancara	70
2.3	Dokumentasi	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Tata urutan implementasi kebijakan pendidikan	45
1.2	Bagan visualisasi urutan implementasi kebijakan pendidikan	46
1.3	Model Perumusan Kebijakan	110
1.4	Evaluasi Kebijakan	113



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Gambar sekolah terdampak
2. Gambar Proses Pembelajaran di Tenda Darurat
3. Gambar Sekolah Darurat
4. Gambar Pembangun Sekolah Pasca Gempa
5. Pedoman Wawancara
6. Pedoman Observasi
7. Pedoman Dokumentasi
8. Transkrip Wawancara
9. Data Penelitian
10. Surat Penelitian

## ABSTRAK

Apriani, Fitria. 2019. *Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat*. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarsana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. Hj. Suti'ah, M.Pd (II) Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Pasca Gempa

Kebijakan pendidikan pasca gempa merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk membangun kembali proses pendidikan yang terganggu akibat gempa bumi yang melanda Lombok, Agustus 2018. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden di implementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat agar segera diimplementasikan sehingga proses pembelajaran bisa kembali normal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat, dengan sub Fokus mencakup: (1) kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat, (2) implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat, (3) evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan, keikutsertaan dan triangulasi sumber, teori dan metode. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kabag program, Kepala sekolah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat berupa *trauma healing* agar trauma yang di rasakan oleh masyarakat terutama anak-anak dan guru bisa berkurang, serta pembuatan sekolah darurat untuk tempat belajar sementara dan perbaikan sarana dan prasaran agar proses pendidikan bisa segera bangkit, 2) Implementasi Kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini implementasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, terlihat dari proses pendidikan di sekolah terdampak yang sudah mulai berjalan walaupun masih menempati sekolah-sekolah darurat, perbaikan sekolah-sekolah di terdampak gempa dan pembangunan kembali gedung-gedung sekolah, 3) evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat melibatkan semua stakeholder, sehingga kendala-kendala di lapangan bisa segera teratasi serta proses monitoring yang intensif oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

## ABSTRACT

Apriani, Fitria. 2019. Post-Earthquake Education Policy in West Lombok District. Thesis, Islamic Education Management Masters Program. Master program of Malang State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Advisor (I) Dr. Hj. Suti'ah, M.Pd, (II) Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.

**keywords:** EducationPolicy, Post-Earthquake

Post-earthquake education policy is a step taken to recover the educational process which was disrupted by the earthquake that struck Lombok on August 2018. The policies made by the President and implemented by the West Lombok District Education and Culture Office should be implemented so that the learning process could be as normal as previous condition.

This study aims to uncover post-earthquake education policies in West Lombok District which focuses on: (1) post-earthquake education policies in West Lombok District, (2) the implementation of post-earthquake education policies in West Lombok District, (3) the evaluation of post earthquake education policies in West Lombok District.

This study employed a qualitative approach with case study design. In collecting the data, in-depth interview techniques, participatory observation and documentation techniques were used. Data analysis techniques and validity data checking were done by extension, participation and triangulation of sources, theories and methods. The informants of this study were the Head of the Education authorities, the Head of the Program, and the principals of schools affected by the earthquake in West Lombok District.

The results showed that: 1) the post-earthquake education policy in West Lombok Regency was in the form of *trauma healing* which aimed to reduce the traumatic effect of the society especially for the students and the teachers, as well as the making of emergency schools for teaching and learning process and improvement of facilities and infrastructure to recover the educational as normal, 2) the implementation of post-earthquake education policy in West Lombok Regency now is progressing well, it has been going well in accordance with the desired goals, it can be seen from the process of education in earthquake affected schools that have started to run even though they are still in emergency schools, repairing in number of earthquakes-affected school and rebuilding school buildings, 3) evaluation of post-earthquake education policies in West Lombok Regency involved all stakeholders, so that some obstacles could be resolved as soon as possible and an intensive monitoring process by the head of education authorities of the West Lombok district.

### مستخلص البحث

أبرياتي فتيريا. 2019. سياسة التعليم بعد الزلزال في لومبوك الغربية. أطروحة ، برنامج ماجستير إدارة التربية الإسلامية، دورة الدراسات العليا في جامعة مالانج الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم، المشرف(1) د.ستيعه (2) د. محمد إنعام عشا.

### الكلمات المفتاحية: سياسة التعليم ، بعد الزلزال

سياسة التعليم بعد الزلزال هي خطوة تم اتخاذها لإعادة بناء العملية التعليمية التي تعطلت بسبب الزلزال الذي ضرب لومبوك ، أغسطس 2018. تم تنفيذ السياسات التي وضعها الرئيس من قبل مكتب التعليم والثقافة مديرية لومبوك حتى تعود عملية التعلم إلى وضعها الطبيعي ، تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن سياسات التعليم بعد الزلزال مديرية لومبوك ريجنسي ، مع التركيز الفرعي على: (1) سياسات التعليم بعد الزلزال مديرية لومبوك ريجنسي ، (2) تنفيذ سياسات التعليم بعد الزلزال مديرية لومبوك ، (3) تقييم سياسات التعليم بعد الزلزال في غرب لومبوك ريجنسي.

استخدمت هذه الدراسة مقارنة نوعية مع تصميم دراسة الحالة. يتم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة المتعمقة والمراقبة والتوثيق التشاركيين تتم تقنيات تحليل البيانات والتحقق من صحة البيانات من خلال التمديد والمشاركة وتثليث المصادر والنظريات والأساليب كان مخبرو البحث رئيس مكتب التعليم ، ورئيس البرنامج ، والمدير الرئيسي الذي تأثر بالزلزال في مقاطعة لومبوك الغربية.

أظهرت النتائج ما يلي: (1) كانت سياسة التعليم بعد الزلزال مديرية لومبوك ريجنسي في شكل شفاء من الصدمات بحيث يمكن الحد من الصدمة التي يشعر بها المجتمع ، وخاصة الأطفال والمدرسين ، وكذلك إنشاء مدارس طوارئ للتعلم الوسيط وتحسين المرافق والبنية التحتية لعملية التعليم يمكن أن يستيقظ على الفور، (2) الآثار المترتبة على سياسة التعليم بعد الزلزال مديرية لومبوك ريجنسي حتى الآن ، تم التنفيذ بشكل جيد وفقاً للأهداف المرجوة ، كما يتضح من عملية التعليم في المدارس المتأثرة التي بدأت في الركض رغم أنها لا تزال في مدارس الطوارئ زلزال وإعادة بناء المباني المدرسية، (3) تقييم سياسة التعليم بعد الزلزال في ويست لومبوك ريجنسي يشمل جميع أصحاب المصلحة ، بحيث يمكن حل العقبات في لامبانج على الفور وعملية مراقبة مكثفة من قبل رئيس مكتب التعليم مديرية لومبوك.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa.<sup>1</sup> Maju mundurnya pendidikan ditentukan oleh pendidikan yang bermutu, karena mutu pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang bermutu. Disini perlunya sistem manajemen pendidikan yang baik agar terciptanya sistem pendidikan yang bermutu. Semua harus direncanakan di implemetasikan dengan baik serta perlu dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun daerah untuk terus bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Tujuan dan fungsi pendidikan di atas sudah jelas mengarah kepada peningkatan kualitas suatu bangsa. Kualitas suatu bangsa tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, karena pada dasarnya merupakan cara yang dilakukan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan yang sungguh—sungguh diharapkan mampu dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemajuan suatu bangsa akan sangat dipengaruhi oleh generasi muda, karena generasi muda merupakan penerus dari suatu bangsa, jika sistem pendidikan di Indonesia berkualitas maka akan

---

<sup>1</sup> Muhardi, “*Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia,*” 20 (Desember 2004), 481

menghasilkan SDM yang berkualitas juga. Disinilah peran pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pendidikan yang ada di Indonesia saat ini.

Pemerintah sudah menerapkan manajemen peningkatan mutu pendidikan atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) di lembaga pendidikan guna memberikan hak otonom lebih besar, mendorong partisipasi warga sekolah dan warga masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan Nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Dalam hal ini sekolah lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus lembaga pendidikannya terutama mutu pendidikan. Jika suatu lembaga pendidikan bermutu, maka proses pembelajaran juga akan menjadi efektif. Efektif di sini adalah semua hal dalam kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan visi-misi suatu sekolah. Proses pembelajaran dikatakan efektif adalah ketika proses pembelajaran dilihat berhasil dan mampu menumbuhkan, membina, membentuk dan dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik.<sup>3</sup>

Pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin dalam membangun proses pendidikan di sekolah, namun banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah salah satunya adalah bencana alam yang melanda suatu daerah yang akan menghambat proses pembelajaran bahkan dampak yang diakibatkan lebih parah sampai bisa melumpuhkan semua sektor yang ada di suatu daerah terutama sektor pendidikan.

---

<sup>2</sup> Imam Hidayat, *The Handbook* (Jakarta:PrenadaMedia, 2016), 367

<sup>3</sup> Tatta Herawati Daulae, "Menciptakan Pembelajaran Yang Efektif," 6 (Juli 2014), 134

Sebagaimana yang terjadi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada Minggu, 29 Juli 2018 kemarin dilanda bencana alam berupa gempa bumi yang meluluh lantahkan beberapa desa di Kabupaten Lombok Timur serta banyak korban jiwa maupun korban luka-luka dan trauma yang mendalam bagi masyarakat se pulau Lombok dan khususnya korban yang terdampak gempa di kecamatan Obel-obel dan Sembalun Bumbung.<sup>4</sup>

Gempa bumi yang terjadi bukan hanya memakan korban jiwa namun kerusakan rumah serta infrastruktur pemerintahan, sarana pendidikan dan trauma mendalam terutama yang dirasakan oleh anak-anak. Gedung-gedung sekolah yang ada di lokasi terdampak gempa sangat memperlihatkan terutama gedung-gedung sekolah sebagian besar ambruk serta proses pembelajaran di liburkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Selam seminggu pasca gempa di Lombok Timur, gempa bumi kembali mengguncang Lombok Minggu 5 Agustus 2018 pukul 20.00 Wita dengan magnitudo 7 dan perpotensi Tsunami yang menghebohkan semua masyarakat yang ada di pulau Lombok dan Bali.

Gempa yang terjadi tanggal 5 Agustus 2018 berkekuatan 7.0 Skala Richter (SR) mengakibatkan kerusakan parah yang tersebar di kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan memakan korban jiwa lebih dari 560 orang. Daerah yang terkena dampak paling parah adalah

---

<sup>4</sup> “Gempa 6,4 Mengguncang Sembalun Lombok”, Liputan6, Minggu 26 Juli 2018, 2

<sup>5</sup> Observasi Awal, Selasa 7 Agustus 2018, Pukul 08.00 Wita

Lombok Utara dan Lombok Barat. Kerusakan dan kerugian akibat gempa diperkirakan mencapai Rp 11,3 triliun.<sup>6</sup>

Tidak ada bangunan yang masih tersisa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Barat bahkan korban jiwa sampai pagi belum dapat dievakuasi oleh badan penanggulangan bencana daerah (BNPD) karena masyarakat setempat masih menyelamatkan diri ke dataran tinggi akibat gempa yang berpotensi Tsunami.

Kabupaten Lombok Utara menjadi yang terparah dan paling banyak memakan korban jiwa dan beberapa tempat di Kabupaten Lombok Barat banyak yang mengalami kerusakan ringan hingga rusak parah bahkan tidak bisa untuk di gunakan lagi khususnya di Kecamatan Gunung Sari, Batu Layar dan kecamatan Narmada. Kabupaten Lombok Barat sebagian besar bangunan sekolah sudah tidak bisa di tempati lagi karena mengalami kerusakan berat bahkan beberapa ruang kelas yang ambruk.<sup>7</sup> Pemerintah daerah mengkoordinasikan semua kabupaten yang ada di pulau Lombok untuk diliburkan sampai batas waktu yang belum di tentukan, karena intensitas gempa yang magnitudunya 5-6 masih sering terjadi serta trauma yang mendalam yang di alami oleh semua masyarakat yang ada di Lombok khusus anak-anak yang menangis tidak mau pergi kesekolah.

Proses pembelajaran di Pulau Lombok yang tidak terkena dampak utama dari gempa di mulai pada minngu ke 3 bulan Agustus dan belum belajar seperti biasanya

---

<sup>6</sup> “Gempa 7.00 kembali mengguncang Lombok”, Liputan6, Minggu 5 Agustus 2018, 2

<sup>7</sup> Observasi Awal, senin, 13 Agustus 2018

dikarenakan masih banyak gempa susulan yang magnitudonya 6-7. Siswa dihimbau untuk melakukan proses pembelajaran di masing-masing rumah. Sedangkan di kabupaten Lombok Barat (tiga kecamatan yang terdampak) dan Lombok Utara proses pembelajaran lumpuh total karena gedung-gedung sekolah yang hancur.

Pemerintah kedepan hanya fokus membangun tenda-tenda pengungsian, pencarian korban dan membangun beberapa sekolah darurat. Dampak bencana juga mengakibatkan kerusakan sarana pendidikan Secara keseluruhan tercatat 606 gedung sekolah mengalami kerusakan di Nusa Tenggara Barat dan 3.051 ruang kelas di ratusan sekolah mengalami kerusakan, 1.460 diantaranya rusak berat.<sup>8</sup>

Selama ini banyak relawan yang datang dari berbagai kalangan dan komunitas seperti para mahasiswa, ormas, organisasi atau komunitas maupun yang terjun langsung membantu korban gempa. Mereka juga turut andil dalam melakukan pengobatan terhadap trauma yang dialami masyarakat di sana, namun hanya sebatas menghibur para pengungsi terutama anak-anak untuk menghilangkan trauma mendalam mereka. Kegiatan seperti ini tidak bertujuan untuk menghilangkan trauma secara permanen. Kegiatan ini biasanya berlangsung beberapa minggu pasca bencana dan kurang ditinjau lanjuti perkembangannya.<sup>9</sup>

Lumpuhnya proses pembelajaran di Lombok khususnya tiga Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat ini menjadi tugas untuk pemerintah dan peneliti untuk

---

<sup>8</sup> “BNPB : 606 Sekolah rusak akibat gempa Lombok”, Metro Tv News.com, Minggu, 12 Agustus 2018

<sup>9</sup> Dwi Utari, Nurulia dkk, “Sekolah Petra (Penanganan Trauma) Bagi Anak Korban Bencana Alam”, 2 (September 2012), 99-100

membangun kembali proses pembelajaran seperti biasanya. Karena dengan proses pembelajaran ini akan bisa mengobati trauma yang dialami oleh anak-anak di pengungsian karena sudah bisa berkumpul dan bermain bersama teman-teman akan mengobati trauma yang dialami secara alami. Karena sudah banyak anak-anak dipengungsian ingin bersekolah namun masih banyak keterbatasan yang dialami mulai dari sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran serta buku-buku penunjang proses pembelajaran yang masih minim. Walaupun sebagian besar sudah ada beberapa titik di posko pengungsian sudah mendirikan sekolah-sekolah darurat yang jauh dari kata layak.

Pemulihan awal yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan beberapa relawan kemanusiaan adalah dengan membangun sekolah darurat dari terpal dan bahan sederhana lainnya. Setelah sekolah darurat berdiri, barulah kemudian beralih ke proses rekrutmen peserta didik dan guru untuk sama-sama menghilangkan trauma mereka masing-masing. Di daerah Gunung Sari misalnya, semua guru dan siswa dikumpulkan disekolah darurat untuk dihibur oleh tim trauma healing dari Surabaya. Hal yang demikian dilakukan karena trauma itu tidak hanya menyerang murid saja, guru pun merasakan trauma bangunan bahkan seluruh lapisan masyarakat.<sup>10</sup>

Semangat masyarakat Lombok, tidak patah arang walaupun mereka sedang mengalami musibah bencana alam gempa bumi yang magnitudonya berkisar 5-7, walaupun gedung sekolah mereka rata dengan tanah. Hal tersebut terbukti dengan

---

<sup>10</sup> Observasi Awal, Minggu 12 Agustus 2018, Pukul 16.00 Wita

antusiasme masyarakat untuk tetap mempertahankan semangat pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan membangun sekolah darurat yang mereka buat dari terpal dan dengan fasilitas pendidikan seadanya.

Proses trauma healing yang diperuntukan kepada guru dan murid tentu berbeda, guru lebih diarahkan untuk aktif kembali mengawal siswa-siswi yang sudah terlalu lama tidak belajar sementara siswa-siswi lebih banyak diajak bermain. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat juga menghimbau kepada kepala sekolah untuk mengkomunikasikan ke para orang tua agar memberikan izin untuk anak-anaknya bisa bersekolah kembali. Setelah proses trauma healing ini berjalan normal baru kemudian lembaga pendidikan dalam hal ini guru dan seluruh perangkat pendidikan membangun komunikasi dengan orang tua siswa agar memberikan izin kepada anak-anak mereka pergi bersekolah karena selama ini, kemandekan proses belajar terjadi karena orang tua melarang anak-anak mereka pergi sekolah. Hal demikian dikarenakan trauma orang tua ketika terjadi gempa susulan sementara anak-anak mereka tidak berada dipengungsian.

Sesuai juga dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>11</sup> Melalui inpres tersebut presiden Jokowi menginstruksikan kepada 19 menteri Kabinet Kerja,

---

<sup>11</sup> Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Kepala BPKP, Kepala LKPP, Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, dan Wali Kota Mataram, untuk melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB, yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor.

Dengan adanya inpres ini diharapkan akan memberikan solusi yang tepat terkait dengan pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk secepatnya membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh agar proses pendidikan bisa kembali seperti biasanya. Pemerintah daerah juga sudah mulai membuat sekolah-sekolah sementara (sekolah darurat) sebagai pengganti sementara gedung-gedung yang rusak akibat gempa.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat sudah berupaya berkordinasi dengan pengawas, UPTD dan kepala sekolah terkait dengan pembuatan sekolah sementara sebagai tempat belajar agar siswa-siswi yang sekolahnya terdampak gempa bisa kembali bersekolah dan dengan bersekolah diharapkan trauma yang di alami oleh para siswa dapat perlahan sembuh.

Setelah sekolah dan keluarga sudah bisa bersinergi, barulah kemudian melengkapi fasilitas sekolah mulai dari alat-alat permainan dan buku-buku bacaan yang bisa mengembalikan semangat sekolah. Untuk sementara ini, lebih banyak

relawan menyumbangkan alat-alat permainan yang mengandung nilai edukasi seperti alat peraga dan sebagainya. Berbagai kebijakan untuk menjalankan proses belajar mengajar telah dilakukan, diantaranya dengan membangun sekolah-sekolah darurat yang dibangun pemerintah dan para relawan bencana dari berbagai daerah dan komunitas. Kesiap siagaan, tanggap darurat dan pemulihan telah diakomodir dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) NTB. Namun demikian ternyata masih ditemukan berbagai kendala baik di pemerintahan maupun di masyarakat pada fase tanggap darurat dan pemulihan bencana gempa bumi khususnya untuk memulihkan kembali keberlangsungan proses pembelajaran secara normal.

Sehubungan dengan rencana penanggulangan bencana yang telah di susun oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala sehingga sasaran penunjang pendidikan di sekolah darurat belum memadai. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana strategi pemerintah dalam mengembalikan proses pendidikan pasca gempa. Untuk itu, penelitian dan pengkajian tersebut disajikan dalam thesis dengan judul: “**Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

3. Bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kebijakan penanganan pendidikan pasca gempa di kabupaten Lombok Barat yang di mulai dengan proses pendataan sekolah dan pendataan tenaga pendidik yang dimana dengan pendataan tersebut dimaksudkan agar proses pembelajaran pasca gempa bisa kembali seperti biasanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkap:

1. Menganalisis kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat
2. Menganalisis implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat
3. Menganalisis evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat teori pengambilan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penanganan pendidikan pasca gempa di kabupaten Lombok Barat .

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, berguna juga bagi pembuat kebijakan, dinas pendidikan kabupaten Lombok Barat, lembaga pendidikan terkait serta guru sebagai acuan pertimbangan dalam usaha untuk bangkit membangun proses pendidikan. Hasil penelitian ini memungkinkan adanya tindak lanjut yang mendalam terkait pengimplementasian kebijakan-kebijakan di pemerintah.

### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang mengkaji tentang proses pemulihan pasca gempa telah banyak dilakukan oleh peneliti. Misalnya Siti Irene Astuti, tujuan penelitiannya adalah melihat dan mencermati dinamika yang terjadi pada kehidupan pasca gempa yang terjadi di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan selama 6 bulan, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kenangan atas peristiwa gempa Bantul banyak hal yang dilakukan warga masyarakat untuk mengeksperikan gempa baik waktu dan pasca gempa, warga masyarakat masih mengalami was-was dan cemas seolah-olah gempa akan mengguncang kembali. (2) Problem guru dalam proses pemulihan yaitu banyak problem yang dialami oleh guru dalam proses pemulihan diantaranya adalah: Guru cepat penan, sulit untuk mengingat-ingat sesuatu, takut berada di ruangan sendiri, tidak berani tidur di dalam rumah, merasa takut dengan getaran truk yang melintas. (3) Resilensi dan Peran Guru dalam Proses Pemulihan yakni dengan melakukan, guru tidak bosan-bosannya memberikan nasihat dan dukungan kepada siswa, harus bisa

*telling a story* untuk menghibur siswa, harus mengerti permasalahan-permasalahan siswa dan dapat membantu memecahkannya, membimbing, menggerakkan menuju perkembangan yang positif. (4) Dukungan Sosial dalam proses *Recovery*, yang pertama secara Psikologis melalui: Membaca al-Qur'an, membaca do'a, meningkatkan kemampuan tentang gempa, cara berlindung saat gempa, kedua, secara sosial memberikan dukungan dengan, Meningkatkan silaturahmi dan berkomunikasi dengan tetangga, bergotong royong memperbaiki rumah, rekreasi, mendorong warga untuk tetap bekerja, melakukan kegiatan olah raga.<sup>12</sup>

Ady Muzwardi, tujuan penelitian ini menjalin kerjasama korea selatan-Indonesia dalam manajemen rekontruksi Aceh pasca Tsunami. Metode penelitian menggunakan kualitatif, hasil penelitian adalah strategi patnership Korea-Indonesia dalam Rekontruksi Aceh, tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinas dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang sesuai dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan menengah Nasional. Kerja sama pemerintah lebih menekankan pada pencegahan dan penanggulangan bencana, salah satunya adalah pembangunan *Tsunami Response*, proyek Korea Selatan pasca Tsunami adalah *The Korea-Indonesia Friendship Hospital* (1) meningkatkan bidang kesehatan Aceh, (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Aceh dengan mentransfer pelayanan

---

<sup>12</sup> Siti Irene Astuti, "Pemulihan Psikologi Sosial Pasca Gempa Oleh Guru Di Kabupaten Bantul DIY," *Cakrawala Pendidikan*, 2 (Juni 2008), 201-203

medis yang Canggih, (3) meningkatkan kondisi kesehatan secara keseluruhan wilayah yang terkena dampak tsunami.<sup>13</sup>

Qomarun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu korban gempa bumi yang ada di Klaten agar bisa bangkit kembali, metode yang digunakan adalah model *design and build*, langkah-langkah pertama yang dilakukan adalah dengan kegiatan koordinasi kegiatan survey dan perijinan, serta pengadaan sarana dan prasarana (logistik awal). Langkah kedua yaitu pembuatan posko pembenahan sarana-prasarana, penyebaran informasi, pengumpulan dan pembagian logistik, pembenahan lingkungan binaan (rehabilitas). Langkah ketiga adalah *try and error*. Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) aktivitas persiapan, dalam hal ini harus ada koordinasi tim, survey, logistik awal, perijinan. (2) aktivitas pelaksanaan, pembuatan posko dan pembenahan sekitarnya, pengumpulan dan pembagian bantuan, pembenahan lingkungan binaan.<sup>14</sup>

Nurul Hartini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembalikan semangat remaja di Nangro Aceh Darussalam pasca Gempa dan Tsunami yang telah meluluh lantahkan rumah mereka. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi lapangan yang melalui metode, observasi yang melihat langsung bagaimana kondisi pasca gempa dan tsunami, wawancara dan focus group discussion masing-masing orang dikelompokkan dan data yang di dapat nanti di analisis secara kualitatif berupa narasi.

---

<sup>13</sup> Ady Muzwardi, Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekontruksi Aceh Pasca Tsunami Samudra Hindia), Andalas Jurnal of Internasional Studies, 2 (November) 2016, 179-191

<sup>14</sup> Qomarun, Model Complement and Focus Dalam Peanganan Pasca Bencana Tahap Rehabilitas (Studi Kasus pada Pristiwa Gempa Bumi di Klaten, 27 Mei 2006), Warta, 1 (Maret) 2007, 44-48

Hasi dari penelitian bahwa setelah terjadi gempa dan tsunami di NAD perubahan perilaku remaja, intensitas dan motivasi remaja untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelum terjadi bencana alam. Selanjutnya perubahan perilaku remaja NAD di sektor nonformal membuat remaja berperilaku konsumtif, perilaku konsumtif yang sering dilihat adalah kepemilikan handponm bermerek dan kepemilikan sepeda motor.<sup>15</sup>

Janet Hunter, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana para elit menafsirkan, mengkontruksik dan mengemas bencana dan mencoba menggunakan para elit politik, ideologis, sosial, ekonomi yang lebih besar untuk mendiskusikan bagaimana orang lain menanggapi bencana besar yang ada di Jepang. Penangan gempa di Jepang erdapat perdebatan tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan regionalisasi tantangan terhadap sistem pemerintah dalam mengevakuasi. Berbagai keluhan tentang respon pemerintah yang lambat dalam penanganan gempa 2011, para pemimpin politik dan pejabat tidak benar-benar berkontribusi dalam upaya memberikan bantuan dan pemulihan cepat akan tetapi menghambat proses pemulihannya. Ini yang membuat masyarakat kurang percaya akan kinerja pemerintah. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari dua gempa besar sebelumnya, bagaimana cara penangan yang tepat. Metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mempelajari histori penanganan gempa sebelumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nurul Hartini, Remaja Nangroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami, 2011, 45-51

<sup>16</sup> Janet Hunter, Earthquakes in Japan, 2015 Cambridge University, 415-435

Rakel Sylvia Bjorndottir tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran rinci gempa bumi besar di Jepang Timur tanggal 11 Maret 2011, bagaimana persiapan sebelum gempa, tsunami dan krisis nuklir dan bagaimana penanganan setelah bencana itu terjadi. Gempa bumi yang melanda Jepang dengan magnitudo 9,0 merupakan kekuatan terbesar dan meluluh lantahkan wilayah di Jepang. Dampak yang diakibatkan dari bencana ini bukan hanya kerusakan dan dampak ekonomi di Jepang saja melainkan seluruh dunia mengalami dampak ekonomi akibat bencana ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jepang merupakan Cincin Api Pasifik membuat masyarakat di sana sudah mempersiapkan diri. Mereka membuat bangunan dan infrastruktur aman dan cukup kuat untuk dapat menahan bencana. Jepang juga memberikan pendidikan bencana kesadaran, tanggap darurat dan pengetahuan tentang gempa itu sendiri. Kesiapan dalam menghadapi bencana yang sangat ditekankan oleh pemerintah. Pemerintah daerah, perusahaan, sekolah-sekolah, dan asosiasi lingkungan mendorong untuk mengambil bagian dalam pelatihan. Pemerintah berupaya keras untuk selalu berupaya memperbaiki sistem penyelamatan dan perkuatan dibagian infrastruktur.<sup>17</sup>

Vladimir M. Cvetkovicl dkk, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan persepsi dan pengetahuan aktual siswa sekolah menengah di wilayah Beograd sehubungan dengan gempa bumi sebagai bencana alam dan ancaman keamanan, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan mereka terkait

---

<sup>17</sup> Rakel Sylvia Bjorndottir, On The Great East Japan Earthquake, and How Disaster Preparedness Prevailed, Uta Reichardt (September 2017), 5-28

gempa bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan metode survai untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan (1) untuk program pendidikan, (2) mewujudkan strategi masa depan untuk manajemen bencana alam, (3) memberikan informasi kepada siswa dan warga sekolah.<sup>18</sup>

Kaoru Nakagawal dan Michiyo Yamamoto, tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami keadaan kesiapan gempa oleh keluarag individu yang memiliki kelainan fisik dan mental dan untuk memastikan faktor yang terkait dengan kesiapan siagaan gempa di Tokyo. Pengambilan data menggunakan kuesionar yang dikelola sendiri dan dikembalikan melalu surat. penelitian ini berfokus pada kesiapsiagaan gempa oleh individu yang membutuhkan bantuan tambahan selama bencana, dan terutama individu-individu non-institusionalisasi dengan SMID. Alasan untuk fokus pada individu dengan SMID adalah karena orang-orang ini semakin menggunakan peralatan medis yang membutuhkan listrik, seperti untuk ventilasi mekanik rumah dan menghirup oksigen, untuk tetap hidup. Orang-orang semacam itu akan sangat terkena dampak gempa bumi. Hasil analisis menghasilkan (1) dalam hal kesiapan gempa bumi, mayoritas subyek telah mempersiapkan materi tetapi kurang dari 20% dari subyek telah membuat persiapan yang melibatkan pihak lain, (2) mengumpulkan

---

<sup>18</sup> Vladimir M. Cvetkovicl dkk, Knowledge and Perception of Secondary School Students in Belgrade about Earthquakes as Natural Disasters, 4 (March 2015), 1553-1557

informasi kesiapan bencana. (3) berpartisipasi dalam latihan kesiapan bencana, (4) persepsi resiko, (5) dan persepsi keefektifan.<sup>19</sup>

Liliana Mayer, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak di lembaga-lembaga pendidikan akibat gempa bumi di Chili dan juga redefinisi kebijakan pendidikan yang mengatur risiko dan manajemen bencana. Hasil dari penelitian ini (1) rekonstruksi sekolah (membangun kembali dan memulihkan), (2) *trens partisipasi* dan keterbatasan, (3) meninjau kondisi pembangunan pasca gempa di Chili. (4) gempa bumi dan sistem pendidika pasca gempa.<sup>20</sup>

Fahmi Rusvidianti dan Baroto Tavip Indrojarwo, bertujuan untuk memberikan solusi melalui desain yang berfokus pada penyediaan infrastruktur berupa modul kelas semi permanen berbasis caravan. Pengambilan data dengan menggunakan studi literatur. Desain yang dihasilkan adalah infrastruktur berupa modul kelas semi permanen berbasis caravan. Kelas darurat pasca bencana ini ditujukan untuk siswa SD, dengan menawarkan konsep pendidikan non formal. Terdiri dari dua modul, yaitu modul *classroom* yang mengakomodasi fungsi belajar mengajar dan multimedia *fun learning* dan modul *multipurpose* yang mengakomodasi fungsi kantor administrasi, dapur sederhana, tempat tinggal relawan guru dan multimedia *fun learning*. Kelas Darurat ini sekaligus dapat menjadi pusat aktivitas anak di area

---

<sup>19</sup> Kaoru Nakagawal dan Michiyo Yamamoto, "A Study on Factors Related to Earthquake Preparedness by Family of Non-institutionalized Individuals with Severe Motor and Intellectual Disabilities", *Japanese Journal of Social Welfare*, 55 (Mei 2015), 1-12

<sup>20</sup> Liliana Mayer, "Schooling System, Earthquakes and Beyond. The Chilean Experience of 2010", *Iberoamericana*, 55 (2014), 147-162

pengungsian karena konsep pembelajarannya yang menyenangkan sehingga dapat menjadi penyembuh trauma psikologis mereka.<sup>21</sup>

**Tabel 1.1 Nama Peneliti, Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Siti Irene Astuti (2008)	Meneliti proses pemulihan pendidikan pasca gempa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan permasalahannya</li> <li>2. Proses pembelajaran pasca gempa</li> </ol>	Mengungkap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dalam recovery pasca gempa, mulai dari trauma healing, sekolah darurat dan perbaikan serta pembangunan gedung-gedung sekolah yang roboh akibat gempa bumi sehingga proses pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini segera pulih dan bangkit kembali.
2.	Ady Muzwardi (2016)	Rekontruksi pemulihan pasca bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih fokus pada ranah pendidikan</li> <li>2. Terfokus pada pembangunan sekolah-sekolah darurat.</li> </ol>	
3.	Qomarun (2007)	Proses penangana bencana gempa bumi pasca gempa dengan melakukan persiapan, dan pendataan korban terdampak gempa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian dan penelitian Qomarun lebih terfokus pada bantuan evakuasi dan pertolongan tanggap bencan awal.</li> <li>2. Penelitian ini lebih terfokus pada pendataan dan bantuan terhadap pemulihan pendidikan pasca gempa.</li> </ol>	

<sup>21</sup> Fahmi Rusvidianti dan Baroto Tavip Indrojarwo,” Desain Kelas Darurat Pasca Bencana untuk Sekolah Dasar di Indonesia”, JURNAL SAINS DAN SENI ITS, 2 (2015), 23370-3520

4.	Nurul Hartini (2011)	Mengembalikan semangat untuk bangkit pasca gempa bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data utama penelitian ini nurul adalah remaja Nangroe Aceh sedangkan penelitian ini adalah siswa di Lombok Utara</li> <li>2. Dalam penelitian Nurul lebih terfokus pada pola perilaku remaja yang lebih konsumtif yang berubah sangat jauh dari kebiasaan sebelum terjadinya gempa dan tsunami sedangkan penelitian ini lebih terfokus bagaimana strategi pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa.</li> </ol>	
5.	Junet Hunter (2015)	Sama-sama meneliti tentang bagaimana recovery dan peran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat dan tahun penelitian berbeda.</li> <li>2. Fokus penelitian ini adalah</li> </ol>	

		pemerintah dalam menangani bencana gempa bumi.	kehilangan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam memberikan bantuan dan pemulihan cepat. 3. Penelitian ini juga menganalisis penanganan 2 gempa besar yang terjadi di Jepang sebelum gempa tahun 2011.
6.	Rakel Sylvia Bjorndottir (2017)	Sama-sama membutuhkan peran pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dalam membangkitkan lagi semangat pasca gempa.	Penelitian ini lebih fokus pada edukasi tentang persiapan sebelum gempa dan bagaimana [penyelamatan setelah gempa terjadi.
7.	Vladimir M. Cvetkovicl et. al (2015)	Persamaan penelitian ini adalah bagaimana pendidikan bisa memberi pemahaman masalah gempa dan dengan belajar akan mampu menghilangkan rasa trauma	1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 2. Penelitian ini hanya mengali bagaimana persepsi siswa tentang gempa bumi.

		akibat gempa.	
8.	Kaoru Nakagawal et. al (2015)	Perlindungan dan motivasi untuk bangkit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data utama Nagawa adalah individu yang memiliki cacat fisik dan mental</li> <li>2. Obyek penelitian dari Nagawa adalah anggota keluarga sedangkan penelitian ini subyek penelitian adalah dinas pendidikan yang ada di Lombok Utara.</li> </ol>
9.	Liliana Mayer (2014)	Mengungkap bagaimana cara yang dilakukan untuk recovery	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pendidikan terkait proses recovery pasca gempa</li> <li>2. Tidak mengungkap secara kasus secara detail.</li> </ol>
10.	Fahmi Rusvidianti et. al (2014)	Memberikan tempat pendidikan darurat saat bencana	Penelitian fahmi menghasilkan desain untuk tempat belajar sedangkan penelitian ini lebih kepada strategi pemerintah.

Orisinalitas penelitian ini dengan penelitian di atas adalah kebijakan pemerintah dalam penanganan pendidikan pasca gempa bumi. Pada penelitian sebelumnya hanya

terfokus pada penanganan infrastruktur dan mitigasi gempa, belum ada penelitian yang mengkaji tentang penanganan pendidikan. Ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pendidikan pasca gempa.

#### **F. Definisi Istilah**

Secara sederhana dalam penelitian ini perlu adanya definisi istilah sebagai kunci untuk menyampaikan persepsi dan menghindari perbedaan pemahaman dalam penelitian ini, istilah-istilah yang dimaksud adalah:

##### **1. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa**

Kebijakan pendidikan pasca gempa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan penanganan, rencana, tindakan yang harus dilakukan dalam penanganan bencana mulai dari tanggap darurat, recovery yang harus dilakukan sesuai dengan perintah yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

##### **2. Implementasi Kebijakan Pasca Gempa**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan dalam pencapaian tujuan. Dimana implementasi kebijakan ini merupakan tolak ukur dari sebuah kebijakan sudah di buat. Jadi implementasi kebijakan pasca gempa merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat, pemerintah yang diharapkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan penanganan pendidikan pasca gempa.

### 3. Evaluasi Kebijakan Pasca Gempa

Evaluasi kebijakan pasca gempa merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dari kebijakan yang di buat mulai dari perencanaan hingga implementasinya.

#### G. Sistematika Penulisan

Tata urutan tesis dari pendahuluan sampai penutup, dimaksudkan agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari tesis ini. Adapun yang menjadu masalah poko adalah “Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat”. Adapun Kerangknya sebagai beriku:

##### 1. Bagian awal meliputi:

Halaman judul, halaman pengajuan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

##### 2. Bagian teks, terdiri dari:

**BAB I** : Pendahuluan kemudian diuraikan beberapa sub bab yang meliputi, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kerangka teori yang membahas tentang. A) Konsep kebijakan (1) Kebijakan pendidikan, (2) formulasi kebijakan (3) implementasi kebijakan (4) evaluasi kebijakan. B) penanganan pendidikan pasca

gempa. C) Bencana gempa bumi (1) macam-macam gempa bumi (2) dampak gempa bumi terhadap pendidikan. D) kerangka berfikir.

BAB III : Metode penelitian sebagai pijakan untuk menentukan langkah-langkah penelitian, yang terdiri dari A) Pendekatan dan jenis penelitian, B) kehadiran peneliti C) latar penelitian D) data dan sumber data E)teknik pengumpulan data(1)wawancara (2) observasi (3) dokumentasi F) tehnik analisis data (1) reduksi data (2) penyajian data (3)verifikasi G) keabsahan data

BAB IV : Paparan hasil, terdiri dari A) paparan data dan B) temuan penelitian

BAB V : Pembahasan

BAB VI : Penutup, A) Kesimpulan, B) saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Kebijakan Pendidikan

##### 1. Kebijakan pendidikan

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “policy” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah.<sup>22</sup>

Istilah kebijakan (Policy) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (wisdom).<sup>23</sup> Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.

---

<sup>22</sup> H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan* (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),. 37

<sup>23</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 16

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.<sup>24</sup>

Menurut Jones dalam Hasbullah kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.<sup>25</sup> Sekarang ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam konteks tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya.

Kebijakan bersentuhan langsung dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang bersifat tindakan politik, sehingga kebijakan tidak terlepas dengan kebijakan negara. Kebijakan negara memiliki ciri-ciri khusus yang selalu melekat pada kebijakan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu ketua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, administrator, para monarki dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 97

<sup>25</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan....*, 38

<sup>26</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan....*,39

Dalam buku Analisis kebijakan Pendidikan, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.<sup>27</sup>

Kebijakan merupakan pedoman atau prinsip-prinsip untuk bertindak bagi masyarakat yang menguraikan sasaran penting dan secara luas menunjukkan bagaimana aktifitas dapat dikerjakan.<sup>28</sup> Kebijakan sebagai wacana lebih menekankan pada konteks sosial yang melibatkan banyak orang, kebijakan itu didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka oleh banyak orang yang terlibat. Dengan demikian yang akan dihasilkan bukan interpretasi seorang individu yang membancanya, tapi sebuah konsensus yang bersifat sosial.

Istilah kebijakan pendidikan merupakan terjemahan *educational policy* yang tergabung dari kata *education* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidang pendidikannya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013),135

<sup>28</sup> Moh Alifudin, *Reformasi Pendidikan* (Jakarta: Magnascript Publishing, 2012), 16

<sup>29</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan....*,40

Menurut Tilaar dan Riant kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah- langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.

Kebijakan tidak akan bermakna apa-apa tanpa diimplementasikan (dilaksanakan). Kebijakan yang tidak diimplemantasikan tidak akan memberikan kontribusi apa pun terhadap kehidupan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan hal penting di bandingkan formulasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dan kemudian memiliki dampak tertentu maka harus ada usaha menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dapat dilaksanakan.

Seorang pemimpin kepala daerah yang bijaksana akan memperhatikan kepentingan sesuai dengan nurani yang berlandaskan pada aturan agama yang diyakininya, bukan pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>30</sup>

Kunci berhasil atau tidaknya suatu bangsa ada pada bidang pendidikan, dunia pendidikan merupakan modal dalam mempersiapkan masa depan peradaban dunia, sehingga pemerintah perlu mengembangkan strategi pendidikan, melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kualitas yang menyeluruh, menurut George S. Papadopoulos, ” kebangkitan pendidikan sebagai gerbang bagi kemakmuran masa depan.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010). 41

<sup>31</sup> George S. Papadopoulos, *Pendidikan Pada abad XXI Pokok Persoalan dan Harapan*, Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI, (UNESCO Publising, 1996), 10

Pendidikan Nasional dewasa ini cenderung menuju kepada suatu tragedi Nasional karena kurang mantapan kebijakan pendidikan.<sup>32</sup> Hematnya kebijakan pendidikan sekarang ini karena perbedaan visi dan pemahaman terhadap arah pembangunan pendidikan yang di sebabkan oleh pergantian pemerintah.<sup>33</sup> Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa peran pemerintah sangatlah besar dalam menggiring arah kemajuan dan keberhasilan pendidikan melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri.

Selanjutnya pendidikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan,<sup>34</sup> Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat, UUD RI 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 3 menegaskan bahwa

---

<sup>32</sup> Menurut Winarno disamping kurangmantapan kebijakan Pendidikan juga karena kurangnya profesionalisme birokrasi pendidikan serta masih kurangnya profesionalnya pelaksana pendidikan , Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di dalam strategi pembangunan pendidikan nasional apabila tidak diarahkan kembali kepada tujuannya yang hakiki maka hasilnya adalah tragedi suatu bangsa, Winarno mencanangkan konsep-konsep yang sangat brilian sebagai sintesa dari strategi-strategi pendidikan yang dianggapnya keliru sehingga dapat menuju kepada tragedi suatu bangsa Winarno Surahkmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, (Jakarta, KOMPAS Penerbit Buku, 2009), 41

<sup>33</sup> Dalam pergantian menteri pendidikan nasional seperti : Juwono Sudarsono, yahya Muhaimin, Malik Fajar dan Bambang Sudibjo, dari keempat menteri pada pemerintahan berbeda, telah memberi pengaruh yang berbeda –beda pada pelaksanaan kebijakan dalam pendidikan. Alex, *Menyoal Konsep mutu dalam Kebijakan Pendidikan Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (bogor, Ghalia 2002), 17

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2008), 190

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.<sup>35</sup>

Menurut Paul Lengrand, ”manusia memiliki persediaan bahan ideologi yang berlimpah ruah, tetapi hanya teori pendidikan yang mempunyai hubungan yang tipis dengan praktik pendidikan.<sup>36</sup> Kebijakan pendidikan di Indonesia sekarang diwarnai oleh kebijakan Pendidikan Belanda yaitu sistem Eropa, Kebijakan pendidikan pemerintah di masa orde baru menuntut masyarakat untuk bersandar pada keahlian, kepakaran dan keterampilan deangan pertimbangan pasar.<sup>37</sup>

Pendidikan di seluruh dunia akan berubah dalam generasi yang akan datang, asal jiwa semangat dan tujuan berubah, hasil pendidikan tidak akan diukur menurut sekian banyak pengetahuan yang telah diberikan, tetapi manusia

<sup>35</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>36</sup> Paul Legrad, *Pendidikan Dipersoalkan*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982),23-24. Dari semua usaha manusia agaknya pendidikan adalah salah satu yang mengalami rintangan paling besar dalam perjalanan kemajuannya. Hingga kini belum pernah terjadi evolusi di dalam dunia pendidikan, standar moral umum telah maju dan gelombang kejutan dari sejumlah kemajuan yang menentukan dalam peradaban kita telah terasa dalam pendidikan, secara umum dapat dikatakan bahwa integritas atau kesempurnaan pelajar setidaknya telah dihargai sampai tingkat tertentu rencana pelajaran dan metodik telah lebih menurut penalaran. Tetapi menurut sebagian besar masih tetap tidak berubah, rintanganrintangan yang dijumpai dalam jalan perubahan telah diketahui. Apakah nilai-nilai fisik, sosial, emosional dan estetis telah dikorbankan guna pengertian terbatas dari pengetahuan dan pemikiran, sejauh mana pendidikan menunjukkan jalan tentang adanya kita di dunia ini dalam usaha seseorang yang terarah secara sistematis untuk mengkordinasi fakta-fakta pengalaman menjadi kepribadian yang utuh dan seimbang

<sup>37</sup> M.Amin Abdullah, *Paradigma Baru pendidikan Islam, restrospeksi dan proyeksi Modernisasi pendidikan Islam di indonesia*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral pendidikan Islam , Departemen Agama Islam RI , (Jakarta: IISEP, 2008), 46

berkumpul untuk membuat usul-usul yang akan membantu pemerintah dalam menentukan strategi sesuai dengan keadaan pendidikan.<sup>38</sup>

## 2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah.<sup>39</sup> Tahap ini lebih bersifat teknik dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. Dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan, apapun yang dipilih oleh para pengambil keputusan, selalu akan menimbulkan pro dan kontra.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Anthony Brock, *Pendidikan dan Hari Depan, Kerangka Masyarakat Belajar*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1982), 89,90. Pemecahan sebenarnya terhadap masalah pendidikan dapat diperoleh dengan mereorganisasi secara luas ke arah pendidikan, sebab sekali pendidikan menjadi berkesinambungan, maka gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan akan berubah. Manusia sadar atau tidak sadar tetap terus belajar dan melatih diri selama hidupnya, terutama melalui pengaruh lingkungannya

<sup>39</sup> Hasbullah, *Kebijakan...*,80

<sup>40</sup> Hasbullah, *Kebijakan...*, 63

Kebijakan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.

Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung sama lainnya diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis. Tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

Tahap –tahap kebijakan publik mencakup: 1) Tahap Penyusunan agenda, 2) tahap formulasi kebijakan, 3) tahap adopsi kebijakan, 4) tahap implementasi kebijakan, dan 5) tahap evaluasi kebijakan<sup>41</sup>. Berikut akan dikemukakan tahapan-tahapan formulasi kebijakan :

---

<sup>41</sup> William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, (Yogyakarta:Gajahmada University Press 2003), 24-25



a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. *Top leader* menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke staf untuk dibicarakan atau dimusyawarahkan.<sup>42</sup>

Pada tahap ini setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan: 1) menyepakati kriteria alternatif, 2) penentuan alternatif terbaik dengan tujuan

---

<sup>42</sup> Fatkuroji “*Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan: Studi SDIT Bina Amal dan SD Al- Azar 29BSB Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2012), 21

agar semua manfaat dan kerugian, kesulitan dan kemudahan, dampak negatif dan positif hasil berupa dapat terungkap, 3) pengusulan alternatif terbaik.<sup>43</sup>

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*) yang ada.<sup>44</sup>

Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan yang baik. Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan yang baik, yaitu: 1) rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu, 2) rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.<sup>45</sup>

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

---

<sup>43</sup> Yeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gavamedia.2008),71-76

<sup>44</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1999), 24-25.

<sup>45</sup> Dunn, *Pengantar Analisis...*, 26

c. Adopsi / Legitimasi kebijakan

Legitimasi berasal dari kata “legitimacy” yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Kata legitimasi juga berasal dari kata “legitimation” yang artinya suatu proses khusus dimana program-program pemerintah diabsahkan.

Legitimasi merupakan tahapan yang penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan sebagian masyarakat maupun yang merugikan kelompok lain. Selain itu, setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan yang sudah diformulasikan harus dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan di masyarakat. Legitimasi kebijakan artinya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga pendidikan.<sup>46</sup>

Proses kebijakan memerlukan legitimasi guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses.

---

<sup>46</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis...*, 25

Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan dapat berupa pengabsahan dan otorisasi. Pengabsahan adalah suatu proses dimana kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan diabsahkan. Sedangkan otorisasi adalah kewenangan untuk memberlakukan sebuah kebijakan. Dari otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

d. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.<sup>47</sup> Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan rumusan, tujuan, dan sasaran maka dapat dikatakan implementasi kebijakan

---

<sup>47</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, proses dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS. 2012), 123-125.

tersebut adalah kurang berhasil, keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari dampak positif kebijakan tersebut bagi pemecahan masalah yang dihadapi.<sup>48</sup>

e. Monitoring dan Evaluasi kebijakan

Kebijakan yang sudah dirumuskan tentunya akan melewati tahap implementasi. Agar sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan maka perlu adanya monitoring serta evaluasi dari kebijakan yang sudah diambil. Proses monitoring merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan memberikan informasi nyata terkait realita lapangan.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan.<sup>49</sup>

Menurut Dunn sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah, monitoring berfungsi sebagai berikut:

1) Ketaatan (*compliance*)

Menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

<sup>48</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*...,94

<sup>49</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*...,111

2) Pemeriksaan (*auditing*)

Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran atau belum.

3) Laporan (*accounting*)

Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu.

4) Penjelasan (*explanation*)

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan<sup>50</sup>

Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Menurut Richard Gorton dan Scheneider “*evaluation can be defined as the process of examining as carefully, thoroughly, and objectively as possible an individual, group, product, or program to ascertain strengths ang weakness*”.<sup>51</sup> Artinya evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai secara teliti, menyeluruh, dan objektif secara individu atau kelompok untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan dari produk atau program. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil

<sup>50</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*,111-112

<sup>51</sup> Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*, (New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991). 73

dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana, tujuan, maupun sasaran maka perlu ada langkah baru yang harus diambil untuk mengganti kebijakan yang dirasa gagal tersebut.

Dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang formulasi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya formulasi kebijakan itu adalah suatu tahap kegiatan yang bukan saja mempunyai siklus tertentu, akan tetapi juga saling kait mengait antara siklus yang satu dengan siklus yang lain. Tahap-tahap kebijakan dalam pelaksanaannya mempunyai sifat interkoneksi, dimana satu tahap dengan tahap berikutnya saling terkoneksi, sehingga setiap tahap harus memiliki kualitas, karena kalau tidak maka akan berpengaruh pada kualitas kebijakan itu sendiri, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pemecahan masalah.

Bukan hanya itu, ulasan di atas juga menunjukkan bahwa walaupun ada perbedaan diantara para ahli mengenai siklus formulasi kebijakan, akan tetapi terdapat kesamaan diantara mereka bahwa tahap-tahap formulasi kebijakan tersebut mencakup tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini pun disepakati bukan yang terakhir, tetapi ada tahap berikutnya yaitu tahap terminasi atau penghentian, bahkan sampai kembali ke reformulasi kebijakan.

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu matarantai kebijakan, ia berada di tangan antara formulasi dan evaluasi, oleh sebab itu eksistensinya begitu penting dan strategis sebab disinilah akan dibuktikan sejauhmana formulasi dibuat, apakah bisa memecahkan masalah atau tidak, atau malah lebih menambah masalah yang lebih rumit lagi. Implementasi dengan demikian dituntut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilasanakan oleh orang-orang yang berkualitas, berkomitmen dan konsisten dengan tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu tahap kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.<sup>52</sup>

Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau sering diistilahkan sebagai peraturan

---

<sup>52</sup> Georgi C, Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Woshington, D.C :Congressional Quarterly Inc, 1980), 1-2

pelaksanaan. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan dinas dan sebagainya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.

Implementasi kebijakan pada perinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk maksud tersebut maka implementasi kebijakan publik dilakukan dalam dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memperlulasi kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.<sup>53</sup>

Implementasi kebijakan publik juga bisa dilihat berdasarkan *time*, biasanya diawali dari kebijakan publik pada lingkup yang besar (nasional) yang sosialisasi kebijakannya pada tahun pertama, implemntasi sebagai bagian atau penerapan kebijakan tanpa sanksi (1-2 Tahun). Dalam implemtasi ini ada dua yaitu perbaikan kebijakan karena kebijakan ada masalah dan penerapan kebijakan tanpa sanksi. Sedang implementasi penuh atau penerapan dengan sanksi harus disesuaikan dengan dan pengendalian (kuartal dan tahunan) yang selanjutnya dievaluasi (tahun ketiga atau tahun kelima) sejak implementasi penuh diterapkan.

---

<sup>53</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2009), 17

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh sebab itu sebuah kebijakan harus memiliki visi keberpihakan terutama kepada mereka yang mempunyai masalah, misalnya pada masyarakat tertentu, oleh sebab itu kebijakan itu juga dapat disebut sebagai sebuah intervensi. Oleh sebab itu mengemukakan bahwa publik adalah aktivitas manusia yang yang dipandang perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah.<sup>54</sup> Esensi kebijakan adalah melakukan intervensi atau tindakan yaitu upaya untuk mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, yang diperuntukkan untuk penegasan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan desain struktur proses implementasi.<sup>55</sup>

Implementasi kebijakan publik seringkali dilakukan melalui dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang, seperti halnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram dan wilayah terdampak Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian juga

---

<sup>54</sup> Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Kencana 2011), 54

<sup>55</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik...*,17

dengan peraturan daerah (Perda) seperti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Terkait dengan Penanggulangan Bencana, semua produk kebijakan ini adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Selanjutnya Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan sebagainya.<sup>56</sup>

Implementasi kebijakan publik tentu saja harus melalui proses, sekurang-kurangnya harus dimulai dengan suatu prakondisi dimana semua unsur yang terlibat di dalamnya siap melaksanakan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mudah memahami dan ikut serta melaksanakannya, Sebaiknya implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, sesungguhnya merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sebuah kebijakan perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu perlu

---

<sup>56</sup> Nugroho, *Kebijakan Publik*...,158-160

adanya pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi lainnya. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, Hasbullah mengutip pendapat Siagian yang mengemukakan perlu perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh antara lain; 1) manusia, 2) struktur, 3) proses administrasi dan manajemen, 4) dana, 5) daya. Lima faktor tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.<sup>57</sup>

Suatu tindakan administratif sangat diperlukan untuk upaya pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses, maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan seperti: kelompok formal, informal, suprastruktur, infrastruktur, dan fungsional. Semua itu saling terkait dan sangat menentukan akan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

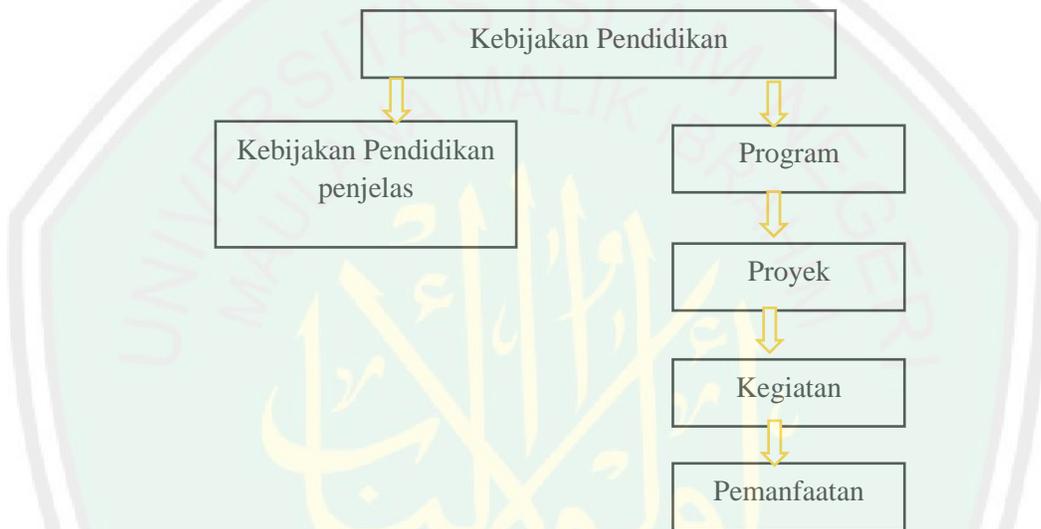
Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Proses penetapan kebijakan bisa mulai apabila tujuan dan sasaran telah diperinci. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya

---

<sup>57</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan....*, 93

kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang langkah-langkah implementasi kebijakan, ada baiknya mengetahui tata urutan implementasi kebijakan pendidikan:



Gambar 1.1 Tata urutan implementasi kebijakan pendidikan.<sup>58</sup>

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, langkah-langkah yang di tempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

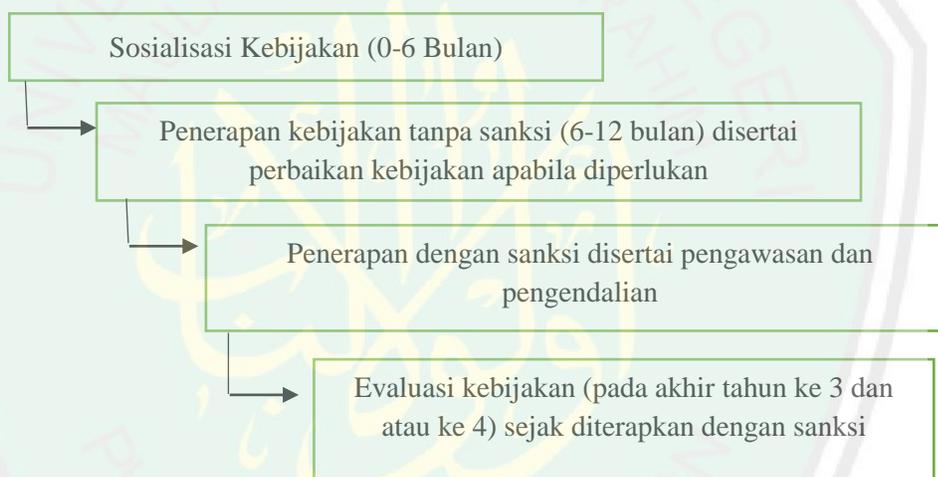
- 1) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau

<sup>58</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*...,100

birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan masyarakat.

- 2) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
- 3) Implementasi kebijakan pendidikan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan penegendalian.
- 4) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 (tiga) tahun, dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan.<sup>59</sup>

Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan tersebut divisualkan sebagaimana gambat di bawah ini:



Gambar 1.2 Bagan visualisasi urutan implementasi kebijakan pendidikan.<sup>60</sup>

#### 4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan, bukan masalah yang gampang apalagi untuk disebut sederhana, sebaliknya evaluasi justru pekerjaan yang rumit sebab melibatkan banyak unsur yang saling terkait misalnya melibatkan orang-orang yang bukan saja dari pihak yang melakukan evaluasi tetapi juga terhadap orang-orang yang

<sup>59</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*....,100

<sup>60</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*....,101

dievaluasi. Selanjutnya adalah materi-materi yang akan dievaluasi, seperti apa yang akan dievaluasi dan bagaimana melakukannya. Materi yang akan dievaluasi berkaitan dengan tujuan kebijakan tersebut dan kesulitannya sering terjadi pada runag lingkup dan luasnya tujuan yang akan dievaluasi.

Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.<sup>61</sup>

Dunn dalam Tilaar istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment).<sup>62</sup> Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Jadi meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan khususnya pada implementasi kebijakan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Pertama*, Edisi dan Revisi Terbaru (Yogyakarta: CAPS (Center of academic Publishing Service) 2013), 240

<sup>62</sup> Tilaar *Kebijakan Pendidikan ...*, 226

<sup>63</sup> Tilaar *Kebijakan Pendidikan ...*, 226

Secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan.<sup>64</sup> Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya. Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.<sup>65</sup>

Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif

---

<sup>64</sup> Suratman, *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Capiya Publishing 2017), 160-161

<sup>65</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2008), 185

- e. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.<sup>66</sup>

Dalam sebuah kebijakn juga perlunya evaluasi program, karena program dapat di artikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.<sup>67</sup> Ralp Tyler dalam Farida mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.<sup>68</sup>

Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.<sup>69</sup>

Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan

<sup>66</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakn Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), 120-121

<sup>67</sup> Firyal Akbar dan Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan "Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia"*, (Gorontalo: Ideas Publishing 2018), 37

<sup>68</sup> Farida Yusuf, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2008), 7

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktis Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2004), 14

informasi tentang bekerjanya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Evaluasi program secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator *input*
- b. Indikator *process*
- c. Indikator *outputs*
- d. Indikator *outcomes*<sup>70</sup>

Tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Evaluasi program memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas sebuah program, salah satunya yaitu evaluasi program model *logic model*. *logic model* adalah sebuah model evaluasi yang dapat dipercaya, mudah dipahami untuk memecahkan masalah yang telah identifikasi. Evaluasi *logic model* memiliki beberapa komponen atau tahapan evaluasi yaitu *context, inputs, activities, outputs, dan outcomes (short term dan long term)*.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Farida, *Evaluasi Program...*,8

<sup>71</sup> Abdul Aziz, Penerapan Logic Model Pada Evaluasi Proram Pembelajaran Inovasi Pendidikan, Conference Proceeding-Aricis I, 58

Evaluasi *context* menjelaskan variabel yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah program, misalnya kondisi lingkungan, kebijakan lembaga, dan ekonomi. Evaluasi *context* dalam penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan gempa di bidang pendidikan. Evaluasi *inputs* berkaitan dengan sumber dana dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan program, evaluasi *input* pada penelitian ini untuk melihat proses perbaikan sarana prasarana serta proses pembelajaran. Evaluasi *activities* dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelayanan atau proses pelaksanaan penanganan pendidikan di sekolah terdampak gempa, sejauhmana proses perbaikan dan pembangunan gedung-gedung sekolah, proses pembelajaran berjalan baik atau tidak. Evaluasi *outputs* untuk mengetahui gambaran hasil dari keluaran program yang difokuskan pada perbaikan sarana prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa dan mengembalikan proses pembelajaran kembali efektif pasca gempa.

*Logic model* sebagai alat untuk menceritakan kinerja program dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di antaranya apa yang coba dicapai dan mengapa program itu di anggap penting, bagaimana mengukur efektifitasnya, dan bagaimana melakukannya dengan benar.<sup>72</sup> Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa logic model adalah sebuah model yang sistematis untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, serta

---

<sup>72</sup> Rohmatulloh dan Mohammad Imam Shalahuddin, Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM, Jurna Teknik Industri, Vol 15 No.2 Agustus 2014, 146

menjabarkan hubungan logis antar tiap komponen, biasanya ditandai dengan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Misalnya evaluasi program penangan pendidikan pasca gempa menggunakan logic model, jika tujuan dan urgensi penangan pendidikan dirumuskan dengan baik pada tahap context, maka akan mempengaruhi inputs yang di dalamnya terdapat aspek proses perbaikan sarana prasarana, pembelajaran efektif akan berjalan dengan baik dan jika aktifitas satu proses perbaikan dan pembelajaran berjalan dengan baik, maka outputs yang akan didapatkan secara logis akan baik pula sehingga apabila outputnya baik, maka secara idealitas outcomenya akan baik.

## **B. Penanganan Pendidikan Pasca Gempa**

Kebijakan pendidikan di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, segala macam kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan ditentukan berdasarkan kepada undang-undang tersebut, dalam UU Sisdiknas pasal 1 Ayat 1 :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, Akhlak Mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>73</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 11-12 tentang Penanggulangan Bencana antara lain:

Pasal 1 ayat 11 mengatakan, tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

<sup>73</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (Bandung, Fokusindo Mandiri, cet 2 2012), 2

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sedangkan Pasal 1 ayat 12 mengatakan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.<sup>74</sup>

Kebijakan pemerintah terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di sebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, kebijakan rehabilitasi pasca bencana dilakukan melalui kegiatan:

1. Perbaikan lingkungan daerah bencana
2. Perbaikan sarana dan prasarana umum
3. Pemulihan sosial psikologis
4. Pelayanan kesehatan
5. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
6. Pemulihan sosial ekonomi budaya
7. Pemulihan keamana dan ketertiban
8. Pemulihan fungsi pemerintah, dan
9. Pemulihan fungsi layanan publik<sup>75</sup>

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

<sup>74</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, pasal 1 ayat 12 Tentang penanggulangan Bencana,

<sup>75</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulanagn Bencana Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana.

3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain<sup>76</sup>

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang bencana alam di atas pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan keadaan darurat dimulai dari sebelum bencana, pada saat bencana dan setelah bencana. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah perbaikan disektor pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat urgen dalam lembaga pendidikan, tanpa adanya sarana dan prasarana suatu lembaga pendidikan sulit akan mampu mencapai tujuan utama dari pendidikan. Adapun tujuan pendidikan seperti yang di kemukakan Dewey yang dikutip oleh Ngalim Purwanto adalah membentuk anak untuk menjadi warga Negara yang baik. Untuk itu, semua lembaga pendidikan harus mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan oleh peserta didik dalam rangka menjalani hidupnya di tengah masyarakat, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga Negara.<sup>77</sup>

Sekolah bertujuan untuk mencetuskan dan mencetak manusia yang cerdas, berahlakul karimah, demokratis, bertanggung jawab, sehat jasmani maupun rohani, serta taat dalam menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kurikulum yang memadai baik dari segi sarana maupun parasarana. Kurikulum inilah yang nantinya digunakan sebagai acuan

---

<sup>76</sup> Rustan A dan Ferry Firdaus, "Ancaman Bencana dan Kebijakan Penanganannya di Daerah". *Bomeo Administrator*, 1, (2011), 98

<sup>77</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1998), 31.

dalam proses pembelajaran baik dari segi interaksi antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Guru dalam mengajar dituntut untuk mampu menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga tujuan yang telah ditetapkan di awal bisa tercapai sebagaimana mestinya.<sup>78</sup>

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru dan sekolah akan terkait secara langsung. Hal ini yang melatar belakangi pemerintah mengeluarkan kebijakan sarana dan prasaran yang harus diprioritaskan agar tujuan dari pendidikan tercapai.

Pembelajaran berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 dalam Suyono dan Hariyanto adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru melalui suatu perencanaan proses pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Pembelajaran dapat diartikan sebagai peran seorang guru dalam mendesain pembelajaran secara intruksional, dan menyelenggarakan belajar mengajar, sehingga adanya peran guru dan siswa yaitu guru berupaya membuat kegiatan belajar, dan siswa bertindak mengalami proses belajar dan mencapai hasil belajar dari aktifitas belajarnya.<sup>79</sup>

Pengertian aktivitas belajar dalam belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas guru

---

<sup>78</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzmedia, 2012), 268.

<sup>79</sup> Hariyanto, Suryono. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). 4.

adalah kegiatan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar, guru mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan (*cognitive*), sikap dan nilai (*affective*), dan keterampilan (*psychomotor*) kepada anak didik. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat alat dan media pengajaran.<sup>80</sup>

Efektivitas merupakan suatu taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut, dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa *indicator special*, misalnya; Pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>81</sup>

### C. Bencana gempa bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan dipermukaan bumi yang berasal dari dalam bumi, akibat peristiwa pelepasan energi gelombang seismik secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Anif Yulin Kurniati, Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Pasca Erupsi Merapi, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 9, No. 2, Juli 2014: 120-129.

<sup>81</sup> Soekanto. Soejono, *Teori Sosiologi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989). 48.

<sup>82</sup> Christanto, Joko. I, *Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2011). 11.

## 1. Macam-macam Gempa Bumi

Pembagian gempa bumi dalam jenis-jenis tertentu tergantung dari dasar apa yang kita pakai. Berdasarkan sebab akibat maka gempa itu bumi dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu:

### a. Gempa Bumi Vulkanik

Gempa bumi vulkanik disebabkan oleh sentuhan yang terjadi antara magma dengan dinding-dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan hebat. Sebab lain yang mengakibatkan gempa bumi vulkanik ialah perpindahan mendadak dari magma di dalam dapur magma. Gempa bumi runtuh terdapat di daerah-daerah dimana terdapat runtuhanruntuhan dalam tanah, umpamanya di daerah kapur atau daerah-daerah pertambangan.

### b. Gempa Bumi Tektonik

Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseranpergeseran yang tiba-tiba di dalam bumi dan berhubungan rapat sekali dengan gejala pembentukan pegunungan. Gempabumi demikian dikenal pula dengan nama gempa dislokasi. Gempa bumi tektonik dapat terj adi jikalau terbentuk patahan-patahan yang baru atau jika terjadi pergeseran-pergeseran sepanjang patahan karena ketegangan-ketegangan di dalam kerak bumi.<sup>83</sup>

## 2. Dampak Gempa Bumi

Getaran yang disebabkan oleh gempabumi dapat menimbulkan dampak antara lain:

---

<sup>83</sup> Katili, J.A dan P. Marks. *Geologi*. (Bandung : Kiat Madju 1963). 53

- a. Rekaan/patahan di permukaan bumi (*ground ruptur*)
- b. Getaran/guncangan permukaan bumi (*ground shaking*)
- c. Longsor tanah (*mass movement*)
- d. Kebakaaran
- e. Perubahan pengaliran (*drainage modifikation*)
- f. Perubahan air bawah tanah (*ground water modification*)
- g. Tsunami<sup>84</sup>

Akibat bencana alam gempa bumi di daerah yang terkena imbas gempa antara lain: banyak gedung sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan roboh/rusak (tidak dapat digunakan), termasuk sarana dan prasarana pendukung lainnya. Banyak peserta didik dari TK sampai mahasiswa sekali pun yang rumah atau tempat tinggalnya roboh atau tidak dapat digunakan untuk tinggal. Padahal rumah atau tempat tinggal merupakan tempat peserta didik belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ditambah pula banyak peserta didik yang buku-bukunya rusak/tidak dapat digunakan lagi, baik karena terkena robohan bangunan, maupun karena terkena air hujan dan mungkin karena sebab lain. Dari segi fisik anak, banyak di antara mereka yang masih terluka akibat terkena reruntuhan bangunan rumah. Dari segi kejiwaan/mentalitas, banyak anak (peserta didik) yang masih labil dan trauma akibat gempa tersebut, karena orang tua atau keluarga dekatnya meninggal dunia dan akibat kepanikan-kepanikan ketika peristiwa gempa terjadi yang diikuti dengan gempa susulan dan robohnya bangunan rumah mereka. Jadi, mereka masih perlu waktu yang cukup lama untuk memulihkan mentalitas mereka seperti sedia kala. Juga, semangat dan gairah untuk berprestasi sedikit-banyak terganggu dengan kejadian tersebut.

---

<sup>84</sup> Noor, Djauhari. *Geologi Lingkungan*. (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2006). 142.

Hal-hal tersebut harus diidentifikasi jika kita mau menangani masalah pendidikan pasca gempa.

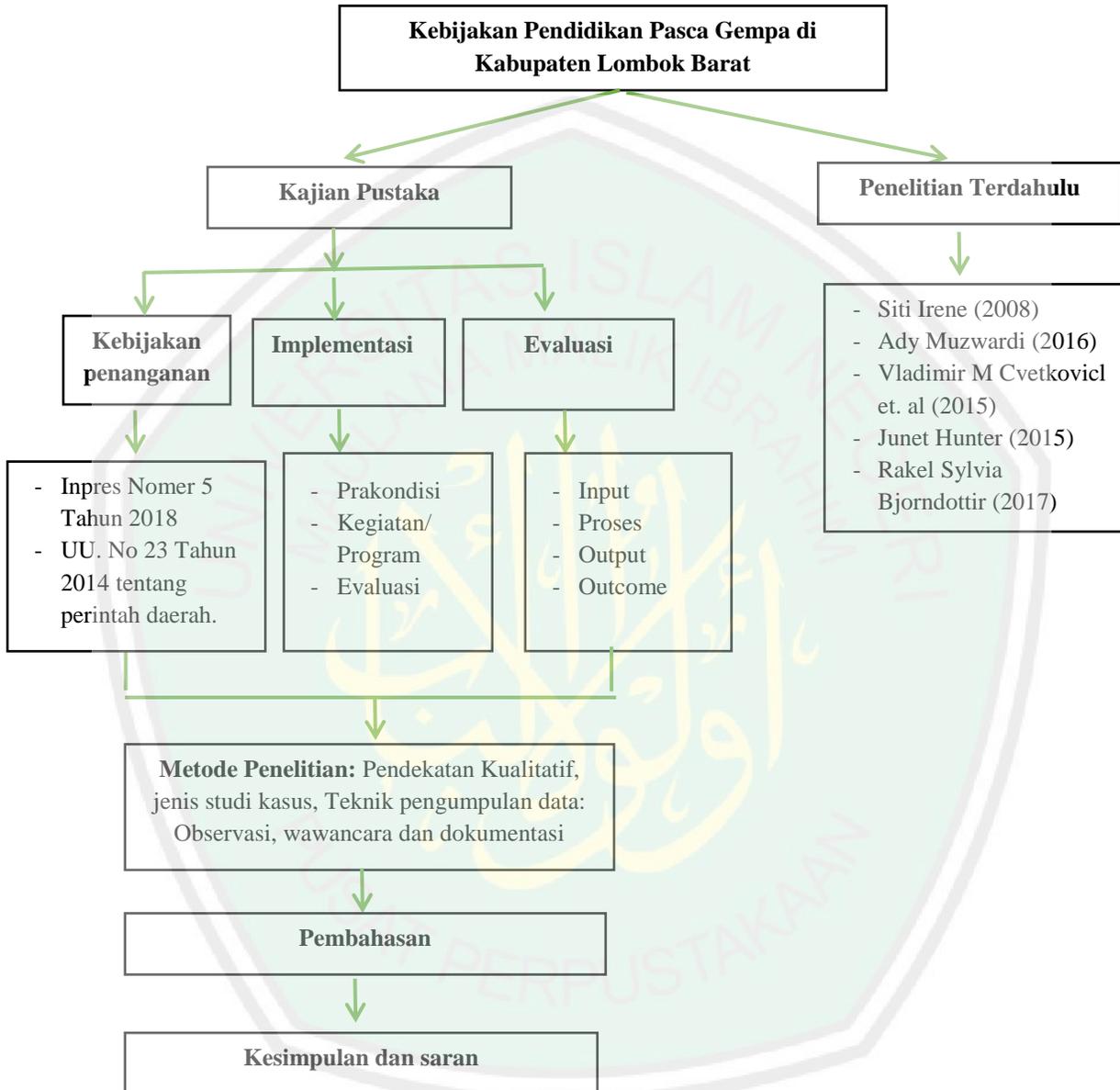
Gempa bumi yang terjadi di Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018 berdampak besar bagi keberlangsungan proses pendidikan disana. Kegiatan pendidikan sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB) diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah provinsi NTB mengeluarkan kebijakan tersebut pasca gempa bumi berkekuatan 7.0 scala richter (SR). "Untuk aktivitas pendidikan pada berbagai tingkatan agar diliburkan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar TGB disampaikan melalui Kadis Sosial Provinsi NTB Ahsanul Khalik, dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Minggu (19/8/2018).<sup>85</sup>

Gempa bumi yang melanda beberapa wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak pada kerusakan bangunan hingga menelan ratusan korban jiwa. Sektor pendidikan pun terdampak, hingga proses kegiatan belajar mengajar di wilayah Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya belum berjalan normal.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Noval Dhwinuari Antony, " Pasca Gempa 7.0 SR, Sekolah di NTB diliburkan", <https://news.detik.com/berita/4173517/pasca-gempa-70-sr-sekolah-di-ntb-diliburkan> diakses tanggal 19 Oktober 2018 pukul 22.09

<sup>86</sup>Lia Hutasoit, "Kegiatan Sekolah di Lombok Belum Berjalan Normal Pasca Gempa", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit/kegiatan-sekolah-di-lombok-belum-berjalan-normal-pasca-gempa> diakses tanggal 19 Oktober 2018 pukul 23.15

**D. Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berarti informasi atau data yang dikumpulkan tidak diwujudkan dalam bentuk angka, tetapi berupa analisis dengan prinsip logika. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>87</sup>

Data dikumpulkan dengan latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Untuk itu penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan, sekaligus menemukan secara menyeluruh dan utuh mengenai Kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin memahami (How to understand) secara mendalam masalah yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanganan pendidikan pasca gempa Lombok di Kabupaten Lombok Barat. Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari tahu kebijakan apa saja yang diterapkan sehingga proses pendidikan di

---

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), 15

Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan seperti sebelumnya. Kedua, bagaimana implementasi program kebijakan yang sudah di buat, apakah berjalan sesuai dengan yang di rencanakan atau bahkan terdapat kendala-kendala yang menghambat jalannya program kebijakan yang sudah di buat. dan ketiga bagaimana evaluasi program yang ada di Kabupaten Lombok Barat, apa saja hasil dari evaluasi yang sudah di lakukan oleh dinas pendidikan.

Maka jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument), sehingga peneliti berada atau hadir di lapangan. Untuk itu, menurut Moleong, sebagai instrumen kunci peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sangat kompleks. Karena, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Dimana peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian.<sup>88</sup>

Kehadiran peneliti sangat berpengaruh terhadap kajian yang diteliti oleh karena itu peneliti melakukan hak sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Rosdakarya, 1989), 121

1. Sekitar bulan Agustus 2018, peneliti telah melakukan observasi awal melihat lokasi-lokasi terdampak gempa di 3 Kecamatan di Lombok Barat serta melihat kondisi terkini kerusakan sarana dan prasarana pendidikan akibat gempa bumi.
2. Pada bulan yang sama, bulan Agustus peneliti kembali melakukan observasi kebeberapa titik sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat untuk mengecek sejauh bagaiman proses pembelajaran pasca gempa yang menerjang Lombok.
3. Pada bulan November 2018, peneliti telah melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini peneliti mencoba membangun komunikasi yang baik untuk mengetahui prosedur penelitian.
4. Sekitar bulan Februari 2019, peneliti kembali melakukan silaturahmi sekaligus memberikan surat penelitian tesis.
5. Pada bulan yang sama, bulan Februari. Peneliti mendapatkan izin mengadakan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan beberapa sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat.
6. Setelah bertemu dengan bapak Hendra (Kadis pendidikan Kabupaten Lombok Barat). penelitian melakukan wawancara dengan beliau dan memberikan rekomendasi narasumber yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
7. Pada akhir bulan Februari sampai Maret, peneliti melakukan pencarian data sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

8. Pada akhir Februari hingga awal Maret peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Gerung, narasumber peneliti yaitu Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, dan kabag pembuatan program Kabupaten Lombok Barat.
9. Minggu ke 2 bulan Maret peneliti melakukan penelitian ke sekolah-sekolah yang sudah di rekomendasikan dari Dinas Pendidikan yang terdampak gempa di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Lombok Barat.

Hubungan yang baik antara peneliti dan objek penelitian akan membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta dapat membatun kelancara proses penelitian sehingga data yang di inginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti juga menyiapkan alat bantu dalam prose penelitian seperti:

1. Kamera digital
2. Buku catatan
3. Pulpen
4. Pensil, dan
5. Handpone (untuk merekam)

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini berlangsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan sekolah-sekolah yang terdampak gempa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2019. Kehadiran peneliti disesuaikan dengan jam-jam kerja dan

hari-hari efektif sekolah, sehingga peneliti tahu secara langsung bagaimana kebijakan penanganan pendidikan pasca gempa di Lombok Barat.

Adapun beberapa alasan mengapa peneliti mengadakan penelitian di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Melihat dari kesiapan pemerintah terkait kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.
2. Lokasi penelitian yang bisa di akses dengan mudah dan cepat.
3. Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lokasi yang paling parah yang terkena dampak dari gempa bumi.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Seperti pada umumnya, bahwa data merupakan hal yang sangat penting dalam rangka untuk menguak permasalahan, selain juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tentang fokus penelitian yaitu Kebijakan pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, data yang dikumpulkan adalah berupa data tentang berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mengembalikan efektivitas proses pendidikan pasca gempa di lokasi penelitian.

Menurut Arikunto, sumber data adalah tempat mengambil data atau subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>89</sup> Faisal mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah ucapan-ucapan, ujaran-ujaran, ungkapan-ungkapan,

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

kesaksian-kesaksian, dan tindakan-tindakan dari subyek yang diteliti. Sumber utama adalah hasil wawancara mendalam dan observasi yang dicatat dan direkam dengan baik.<sup>90</sup>

Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah dinas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>91</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala dinas pendidikan, kabag programer kepala sekolah, dan para relawan di lokasi penelitian. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari kata-kata dan tindakan. Jadi, sumber data utama dalam penelitian ini adalah ucapan-ucapan, ungkapan, kesaksian, dan tindakan-tindakan dari subyek yang diteliti. Sumber data utama di atas, diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi, kemudian dicatat dengan baik seperti yang terdapat dalam transkrip wawancara.

2. Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah siswa, guru dan sekolah-sekolah di kecamatan Gunung Sari, Narmada, Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Data skuder adalah data yang mendukung proyek penelitian dari data primer, serta

---

<sup>90</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asah Asih Asyh, 1999), 17.

<sup>91</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22

melengkapi data primer.<sup>92</sup> Data sekunder ini peneliti peroleh dari hasil dokumentasi baik berupa teks, *soft-file*, maupun dokumen lain yang terkait dengan fokus penelitian. Atau data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya, data tentang keadaan geografis dan catatan BMKG terkait intensitas gempa, dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, data sekunder yang dicari adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan keadaan demografis, sarana dan prasarana sekolah, dan lebih penting lagi adalah dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu: kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>93</sup> Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang saling mendukung dan melengkapi antara satu metode dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data secara lengkap, sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

##### **1. Observasi**

Merupakan sebuah cara dalam pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu,

---

<sup>92</sup> Taliziduhu Ndraha, *Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 60

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-20*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, tujuan, dan perasaan.<sup>94</sup> Ini berarti, observasi merupakan cara untuk mengawasi perilaku subjek penelitian, seperti perilaku dalam lingkungan waktu dan kondisi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, di mana peneliti melakukan pengamatan dan sekaligus ikut serta atau turut dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan sumber data.

Proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengamatan terkait bagaimana proses pembelajaran pasca gempa, penanganan pendidik oleh pemerintah serta implementasi kebijakan yang sudah di buat oleh pemerintah.

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan dengan berkeliling-liling di setiap titik lokasi sekolah yang terdampak gempa, melihat bagaimana tahap – tahap kebijakan yang sudah di laksanakan oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Peneliti juga mengamati bagaimana proses pembelajaran pasca gempa, peneliti di sini berposisi sebagai non partisipan. Peneliti hanya mengamati keadaan sekitar lingkungan sekolah dan aktivitas siswa di dalam lingkungan sekolah.

---

<sup>94</sup> M. Djuaini Ghony & Fauzan al-Mansur, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: ArRuzz media, 2012), 165.

**Tabel 1.2 Observasi**

No	Konteks	Fenomena Observasi
1.	Kebijakan pemerintah	Peneliti lebih terfokus pada bagaimana proses pembelajaran pasca gempa, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanganan pendidikan, bagaimana implementasi kebijakan di lembaga pendidikan yang terdampak gempa.
2.	Kegiatan pembelajaran	Peneliti berfokus pada keberlangsungan proses pembelajaran, sarana dan prasaranan yang mendukung dan yang sudah di penuhi oleh pemerintah.

## 2. Metode wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal<sup>95</sup> yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan, kabga programenr, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat setempat. sebagai sumber data primer. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dan obyek penelitian dapat mengembangkan ide-idenya/gagasan secara bebas dan terarah. Akan tetapi tetap berfokus pada data utama yaitu mengenai kebijakan penangan pendidikan pasca gempa Lombok.

Proses wawancara pertama kali dilakukan dengan Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat. pertanyaan pembuka dari peneliti masih mengupas hal-hal yang bersifat umum seperti “Bagaimana proses pembelajaran di Kabupaten Lombok Barat pasca gempa?”. Setelah narasumber menjelaskan

<sup>95</sup> Moleong, *Metode...*,190.

panjang lebar pertanyaan yang diajukan, peneliti beranjak pada pertanyaan yang berkaitan pada judul dan sampai berakhir seluruh pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan awal.

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan 7 (tujuh) langkah yang di kemukakan oleh Lincoln dan Guba yaitu: 1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan; 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; 3) Mengawali atau membuka alur wawancara; 4) Melangsungkan alur wawancara; 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya; 6) Menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; 7) Mengidentifikasi tindak lanjut wawancara yang telah diperoleh.<sup>96</sup>

Setelah wawancara selesai, peneliti langsung menuliskan hasil wawancara yang terekam dalam handpone milik peneliti ke dalam Ms. Word. Sehingga data dan hasil penelitian dapat dengan mudah peneliti pilah untuk disajikan pada bab IV.

**Tabel. 1.3 Wawancara**

No	Instrumen	Konteks Penelitian
1.	Kebijakan Pemerintah	Penelitian berfokus pada kebijakan pemerintah terkait penanganan pendidikan pasca gempa
2.	Lembaga pendidikan/ Guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus pada implementasi dari kebijakan pemerintah terkait penanganan pendidikan pasca gempa.</li> <li>2. Proses pendidikan pasca gempa</li> <li>3. Proses evaluasi kebijakan oleh pemerintah.</li> </ol>

<sup>96</sup> Lincoln & Guba, *Naturalistic Inquiry* (New Delhi: Sage Publication, 1995), 124

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagai mengisyarat.<sup>97</sup> Dalam hal ini metode dokumentasi sangat perlu dalam penelitian ini karena peneliti akan secara langsung melihat dan membuat dokumentasi terkait tentang letak lokasi penelitian dan kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis data yang diperoleh baik wawancara ataupun dari observasi. Data tersebut meliputi data personal (*personal document*) dan dokumen resmi (*official document*)

Dokumentasi menjadi data penunjang yang sangat urgen untuk memperkuat data-data dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data tertulis, gambar, foto dan rekaman yang terkait alam fokus penelitian ini, seperti data-data lembaga pendidikan yang terdampak gempa, data-data kerusakan yang di alami lembaga terdampak gempa, dan datayang terkait dengan kebijakan penangan pendidikan

---

<sup>97</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),274

pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat, dan data lainnya yang mendukung atau dibutuhkan dalam penelitian ini.

**Tabel 1.4 Dokumentasi**

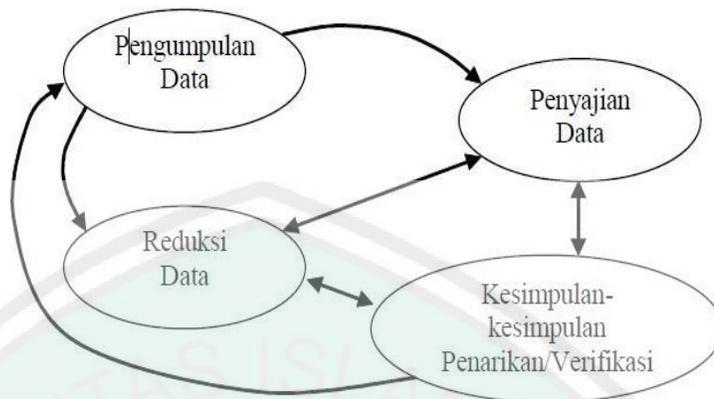
Konteks Data	Jenis Dokumentasi
Data-data yang mendukung kebijakan penanganan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.	Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data sekolah yang terdampak gempa, foto-foto kegiatan proses pembelajaran, foto proses perbaikan sarana dan prasaranan pendidikan, laporan kegiatan penanganan pendidikan pasca gempa di lembaga pendidikan.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>98</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data dengan teknik *Logical Analysis/Matrix Analysis* oleh Milles dan Huberman yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>99</sup> Dalam penelitian ini, proses analisis data digunakan teknik deskriptif dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan. Adapun proses analisis data serta interaksinya dapat dilihat pada gambar dalam analisis data sebagai berikut.

<sup>98</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 244.

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 337



Gambar. 2.1 Interaksi antar tahapan proses analisis data dalam penelitian kualitatif<sup>100</sup>

### 1. Reduksi Data

Patilima dalam Trianto mengemukakan bahwa reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>101</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data bila diperlukan.

### 2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.<sup>102</sup> Prosesnya dapat

<sup>100</sup> Emzir. *Metodelogi Penelitian kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010) 129

<sup>101</sup> Emzir. *Metodelogi Penelitian ...*, 131

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-24*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 341.

dilakukan dengan cara menampilkan data dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti agar mencapai tujuan penelitian. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>103</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan.<sup>104</sup> yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

## G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan

---

<sup>103</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 345

<sup>104</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*,

objektivitas (*conformability*).<sup>105</sup> Sedangkan dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah uji *Credibility*.

Uji *credibility* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.<sup>106</sup>

Perpanjangan pengamatan yang dilakukan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini sudah benar atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang yang diamati. Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>107</sup>

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Teknik triangulasi

---

<sup>105</sup> Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Kependidikan Tenaga Kependidikan*.(Jakarta: Kencana, 2010), .293

<sup>106</sup> Emzir, *Analisis Data...*, 79

<sup>107</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Tejemahan (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005) .82

jenis ketiga adalah penyidik, yaitu dengan memanfaatkan pengamat lain untuk 72 keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi yang terakhir adalah dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.<sup>108</sup>

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>109</sup> Peneliti mengumpulkan data dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan dengan bertanya kepada orang - orang terdekat dari objek penelitian (kepala dinas pendidikan, guru, dan siswa) hasil penelitian ini di diskripsikan.

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>110</sup> Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara.<sup>111</sup> Peneliti harus bisa melihat kondisi dan situasi saat akan melaksanakan penelitian agar

---

<sup>108</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 331

<sup>109</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 247

<sup>110</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*,

<sup>111</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*,

data yang diberikan valid sehingga lebih kredibel. Sebaiknya penelitian dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, dan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Jadi triangulasi sangat penting karena dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimanapun pemahaman yang mendalam (*deep understanding*) atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti (*meaning*) atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk menjelaskan (*to explain*) hubungan antar variabel atau membuktikan hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data Objek Penelitian`

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi Kabupaten Lombok Barat terbagi dalam 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, Narmada, Lingsar, Gunung Sari dan Batulayar. Kecamatan Gerung merupakan Ibu Kota Kabupaten sekaligus pusat Pemerintahan yang mempunyai luas wilayah + 62,30 km<sup>2</sup>.

Keberadaan Kabupaten Lombok Barat terletak antara 115°46' - 116°20' Bujur Timur, dan 8°25' sampai dengan 8°55' Lintang Selatan dengan Batas Wilayah:

Sebelah Barat : Selat Lombok dan kota Mataram

Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara

#### 1. Sejarah Singkat Keberadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan surat keputusan pemerintah yang menjelaskan tentang otonomi daerah yaitu setiap wilayah atau daerah mengurus serta wilayah masing-masing. Demikian pula dengan dinas pendidikan adanya surat

keputusan tersebut maka wilayah kabupaten mengurus anggaran rumah tangganya sendiri dalam hal pendidikan.

PP Nomor 25 tahun 2000 pasal 2 dan 3 mengisyartkan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Desentralisasi pemerintah daerah khususnya dalam bidang pendidikan mengisyartkan bahwa pemerintah pusat berfungsi sebagai pengarah, pembina, dan penentu kebijakan nasional dalam bidang pendidikan melalui Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan pemerintah Propinsi sebagai pembina dan koordinator penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota bertanggung jawab penuh di dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA) sesuai dengan arah kebijakan, standar nasional dan kebutuhan lokal.

Maksud serta tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini tiada lain hanya untuk mempermudah pelaksanaan program kerja dari dinas pendidikan nasional yang berada dibawah naungandepartemen pendidikan nasional pusat yang dipimpin langsung oleh menteri pendidikan. Untuk mewujudkan semua program kerja tersebut maka dibentuklah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah. Dengan unit ini diharapkan semua program kerja tepat pada sasaran yang paling mendasar.

## **2. Visi Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Layanan Pendidikan Berkualitas menuju Lombok Barat Cerdas”

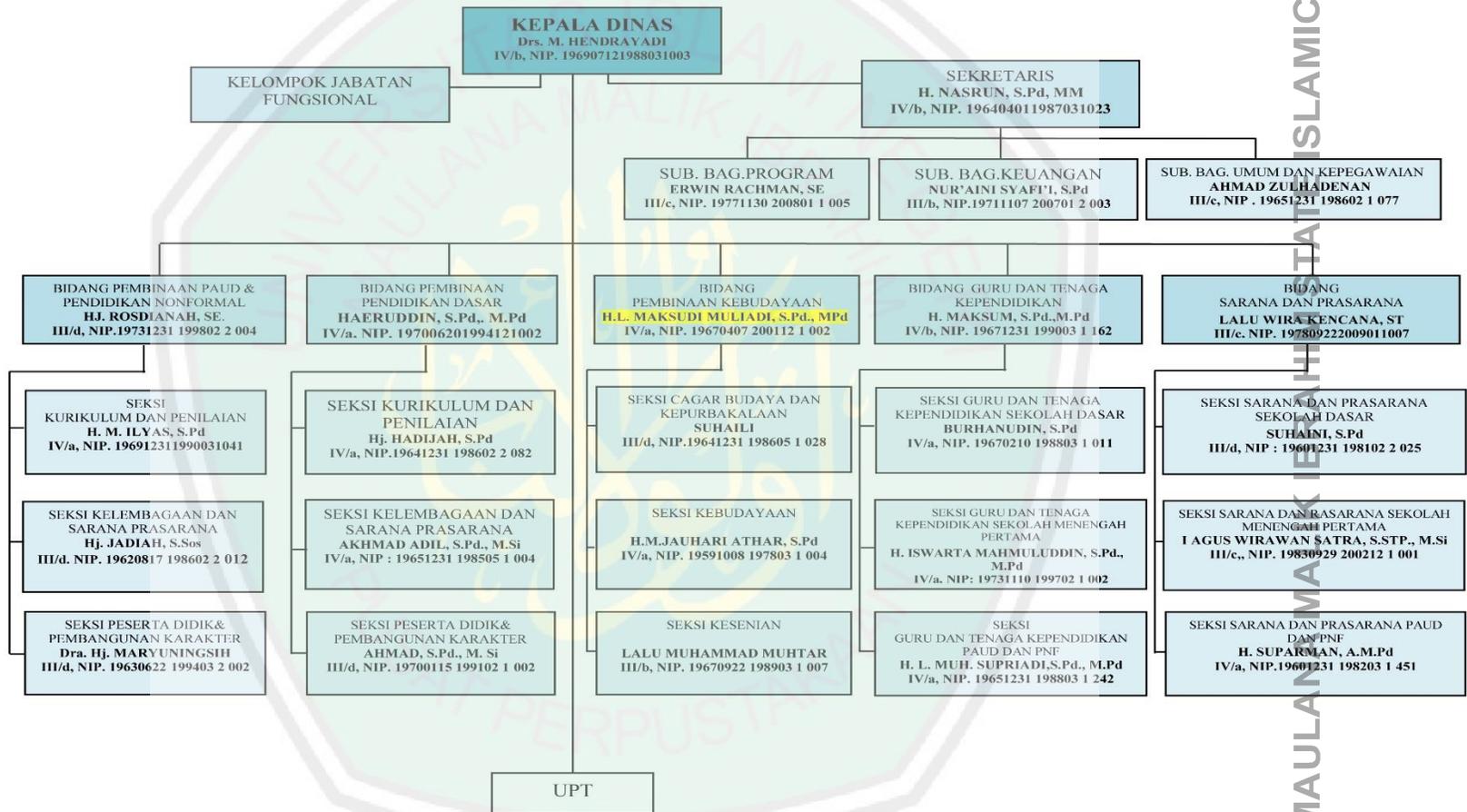
### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Pengembangan PAUDNI Cerdas dan Berkarakter
- 2) Mewujudkan Layanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Cerdas dan Berkarakter.
- 3) Mewujudkan Pengembangan dan Pemerataan Pendidikan Menengah yang Cerdas dan Berkarakter.
- 4) Mewujudkan Generasi Muda yang Sportif, Berprestasi dan Berwawasan.
- 5) Mewujudkan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya dan Kearifan Lokal.
- 6) Mewujudkan Tata Kelola Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian untuk Pendidikan.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016  
Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

#### STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



## **B. Paparan Hasil Penelitian**

### **1. Kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat**

Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Dari hasil wawancara sekaligus observasi yang peneliti lakukan, kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kebijakan penanganan pendidikan pasca gempa di 4 (empat) Kecamatan yang terdampak di Kabupaten Lombok Barat menekankan pada pemulihan fisikis (trauma) yang di alami oleh seluruh masyarakat yang terdampak gempa khususnya siswa, guru dan juga perbaikan sarana prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa.

Sesuai juga dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2018 terkait dengan percepatan rehabilitasi dan rekontruksi wilayah terdampak gempa di provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam Inpres tersebut presiden mengimbau kepada kabinet kerja dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten agar segera melakukan perbaikan terutama bidang pendidikan, kesehatan, tempat ibadah.<sup>112</sup>

Dengan adanya inpres ini sebagai acuan untuk segera dilakukannya tahap rekontruksi dan rehabilitasi oleh kementerian pendidikan yang mengintruksikan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten untuk langsung melakukan penanganan bidang pendidikan.

---

<sup>112</sup> Intrusi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas, kasubak penyusunan program, kepala sekolah, guru, serta beberapa relawan. Peneliti melakukan penelitian hingga data terkumpul atau disesuaikan dengan data yang diperlukan.

Sesuai dengan intruksi Inpres di atas Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan penanganan gempa dari mulai terjadi gempa hingga setelah selesai tanggap darurat. Dinas Pendidikan beserta beberapa tim bekerjasama saling bahu membahu dalam menangani masalah gempa bumi khususnya di kecamatan yang terdampak gempa paling parah.

Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat pasca gempa diantaranya:

a. Trauma Healing

Pasca gempa pada 5 Agustus 2018, pemerintah terkait yakni Dinas pendidikan langsung memberikan perintah kepada semua pihak untuk langsung terjun ke lokasi terdampak gempa terparah di Kabupaten Lombok Barat. Kepala dinas dan tim melakukan pengimpentarisir untuk mengetahui jumlah korban, sekolah-sekolah yang terdampak. Seperti wawancara dengan kepala dinas pendidikan kabupaten Lombok Barat:

“Hal pertama yang kami lakukan pada saat setelah gempa terjadi adalah langsung rapat dengan beberapa staff dan tim. Setelah itu saya langsung membeli beberapa terpal, selimut,

sembako, dan langsung terjun ke lokasi terdampak gempa terparah di Kabupaten Lombok Barat. Saya memerintahkan staff dan tim untuk melakukan impentarisir jumlah korban, sekolah yang rusak, jumlah siswa dan guru yang terdampak gempa, sehingga langkah cepat untuk penanganannya segera bisa kita laksanakan”<sup>113</sup>

Beliau juga memerintahkan semua kepala UPTD, Pengawas serta kepala sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk melaporkan terus menerus terkait kerusakan sekolah, jumlah siswa dan guru yang menjadi korban gempa, yang selanjutnya data yang dikumpulkan nantinya akan dibuat menjadi laporan untuk proses penanganan yang lebih lanjut.

Pada saat gempa 5 Agustus 2018, hanya beberapa sekolah saja yang mengalami kerusakan berat, akan tetapi gempa yang melanda Lombok terus- menerus dengan magnitudo di atas 5 hingga 7, hal ini yang mengakibatkan banyak kerusakan gedung-gedung sekolah.

Pendataan juga mengalami kendala akibat gempa yang terus-menerus menguncang Lombok khususnya di kecamatan yang terdampak langsung, sehingga data terus berubah setiap harinya, hal ini membuat dinas pendidikan memberikan jangka waktu untuk pengumpulan jumlah korban akibat gempa, agar penanganan segera dilakukan.

Setelah data terkumpul, pemerintah melalui tim melakukan evaluasi dan survey ke masing-masing lokasi yang terdampak langsung, untuk kerusakan sarana dan prasarana pemerintah sudah

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra Kepala Dinas Kabupaten Lombok Barat, Senin, 4 Maret 2019 jam 09.15 Wita dikantor dikantor kepla dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

menyiapkan tim yang ahli, agar kerusakan yang terjadi dapat di klasifikasikan jenis kerusakan dan kebutuhan penanganan.

Hal ini ditambah oleh bapak Erwin Rahman selaku Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

“Langkah pertama yang kami lakukan yaitu pengimpentarisir atau pendataan seluruh satuan pendidikan baik rusak berat maupun rusak ringan. Setelah dilakukan impentarisir dari kabupaten langsung ,mengirimkan tim survey untuk memastikan kondisi-kondisi masing-masing sekolah.”<sup>114</sup>

Hasil wawancara di atas diperjelas juga dari hasil wawancara dengan Bapak Lalu Saeful Bahri selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Selat beliau membenarkan bahwa dari dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan pendataan dan survey terkait kerusakan dan jumlah korban :

“Pasca gempa malam senin tanggal 5 Agustus kemarin, dari pihak UPTD langsung menelpon untuk menannyak jumlah guru dan siswa yang menjadi korban baik karena rumahnya rusak ataupun karena sekolah yang rusak. Kami diminta untuk mengirim data guru dan siswa serta data kerusakan sekolah. Pemerintah terkait juga sudah mengirimkan beberapa tim untuk mensurvey kondisi sekolah kami, dan hasil dari survey bahwa sekolah ini mendapatkan tanda merah yang artinya sudah tidak bisa untuk ditempati lagi.”<sup>115</sup>

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai bapak Fauzul Bayani selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Taman Sari dan beliau

<sup>114</sup> Wawancara Bapak Erwin Rahman selaku Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Senin, 4 Maret 2019 jam 14.20 wita dikanor kasubag dikbud.

<sup>115</sup> Wawancara Bapak Lalu Saeful Bahri selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Selat Kecamatan Narmada, Rabu 13 Maret 2019 jam 10.00 wita di kantor kepala sekolah

juga membenarkan bahwa adanya pendataan pasca gempa dari dinas pendidikan sebagai berikut:

“Kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat pasca gempa kemarin langsung meninjau sekolah kami bersama Ibu UPTD Kecamatan Gunungsari. Beliau meminta data guru dan seluruh siswa kami yang terdampak gempa dan data sekolah terkait kerusakan. Karena di sekolah kami 99% bangunannya roboh, hanya beberapa tembok yang masih berdiri.”<sup>116</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Muslim selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Jeringo beliau juga membenarkan bahwa kebijakan yang diberikan pemerintah terkait pendataan jumlah korban pasca gempa sebagai berikut:

“Kebijakan tentang penanganan dan pendataan langsung korban pasca gempa memang benar dilakukan oleh pihak dinas terkait dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat, beliau melalui UPTD langsung mengkoordinir melalui telepon dan setelah dua hari pasca gempa langsung meninjau ke sekolah dan selanjutnya kami diminta untuk mendata jumlah guru yang langsung terdampak gempa dan jumlah siswa kami yang juga terdampak gempa, selanjutnya setelah 5 hari pasca gempa pihak dari dinas kembali untuk mensurvey keadaan sarana dan prasarana yang rusak untuk selanjutnya agar segera diberikan penanganan agar proses pembelajaran segera mungkin dapat terlaksana kembali.”<sup>117</sup>

Hasil wawancara diatas juga sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi terkait data-data jumlah kerusakan yang dialami oleh sekolah-sekolah terdampak gempa di Kabuapten Lombok Barat.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Wawancara Bapak Pauzul Bayani selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Taman Sari, Rabu 13 Maret 2019 jam 08.00 wita di kantor kepala sekolah

<sup>117</sup> Wawancara Bapak Muslim selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Jeringo, Kamis 14 Maret 2019 jam 07.30 wita di kantor kepala sekolah

<sup>118</sup> Observasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat

Dalam kebijakan penangan pendidikan pasca gempa dinas pendidikan tidak henti-hentinya menghimbau UPTD, Pengawas kepala sekolah untuk tetap menginformasikan kondisi terbaru pasca gempa, agar data terkait kerusakan sarana dan prasana serta korban nantinya akan langsung di laporkan ke Kementrian Pendidikan agar langsung bisa diberikan penangan yang cepat.

Setelah pendataan jumlah sekolah dan siswa yang menjadi korban gempa bumi, kepala Dinas Pendidikan langsung menghimpun guru-guru yang ada di Kabupaten Lombok Barat untuk di berikan pelatihan terkait trauma healing yang selanjutnya akan ditugaskan untuk membantu menghilangkan trauma yang di alami siswa dan guru yang sekolahnya terdampak gempa.

Seperti wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala dinas pendidika dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat:

“Terkait dengan beberapa sekolah yang langsung terdampak gempa dimana sekolah-sekolah tidak bisa melakukan proses pembelajaran karena gempa yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat cukup parah dan berkepanjangan. Langkah yang kami lakukan adalah mencoba untuk menghimpun seluruh guru yang memiliki potensi untuk penanganan siswa yang terdampak gempa salah satunya adalah untuk menghilangkan trauma karena gempa yang berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat siswa, guru maupun masyarakat mengalami traumatik yang berat.”<sup>119</sup>

Trauma healing juga di berikan kepada siswa maupun guru tidak hanya di dalam lingkup sekolah saja, namun mereka juga

---

<sup>119</sup> Wawancara Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Senin, 4 Maret 2019 jam 14.20 wita dikantor Dinas Pendidikan.

mendapatkan saat di tenda-tenda pengungsian. Selama gempa bumi melanda Pulau Lombok banyak relawan-relawan kemanusiaan yang datang untuk memberikan trauma healing kepada korban-korban terdampak gempa, begitu juga dengan tim yang dikerahkan oleh dinas terkait untuk melakukan trauma healing ke masing-masing tenda pengungsian. Untuk 3 kecamatan yang terdampak gempa paling parah proses pembelajaran tidak bisa dilakukan hingga 1 bulan. Pemerintah hanya fokus terhadap penanganan traumatik untuk masyarakat. Banyak relawan dan tim dari dinas terkait tetap memantau kegiatan ini dari awal terjadi gempa hingga sekarang. Karena beberapa kecamatan masih menempati tenda-tenda darurat karena kondisi rumah yang tidak bisa ditempati.

Sesuai juga dengan wawancara yang dilakukan dengan Sulton Apriadi selaku relawan dari Coin Foundation :

Kami bersama tim relawan dari Coin Foundation mengunjungi tenda-tenda darurat diberbagai titik di kecamatan Gunung Sari, kami bersama tim langsung memberikan penanganan trauma untuk masyarakat terutama anak-anak. Kami sangat prihatin terhadap perkembangan mental mereka akibat gempa yang terjadi.<sup>120</sup>

Proses pembelajaran pasca gempa untuk sekolah-sekolah terdampak gempa di isi dengan trauma healing dan pembuatan tenda-tenda darurat untuk sementara waktu hingga turunya bantuan dari pemerintah pusat terkait ruang belajar sementara. Dinas pendidikan

---

<sup>120</sup> Wawancara Nawawi, M.Pd selaku Relawan Sanggar Midang, Selasa 5 Maret 2019 jam 15.10 wita di posko pengungsian Desa Kekait.

bekerja sama dengan relawan-relawan untuk memberikan penyembuhan trauma dan hiburan kepada siswa dan guru.

Hasil wawancara dengan Bapak Misbah, selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Kekait:

Proses pembelajaran pasca gempa bisa dikatakan tidak bisa berjalan sesuai dengan pembelajaran pada umumnya. Gempa yang melanda membuat guru dan siswa yang ada di SD Negeri 2 Kekait ini mengalami trauma yang mendalam. Karena dampak gempa yang paling parah di Kabupaten Lombok Barat adalah di Kecamatan Gunung Sari Khususnya di Desa Kekait ini, semua bangunan rumah dan sekolah bisa dikatakan 90% hancur, inilah yang menyebabkan trauma bagi siswa dan guru. Namun dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan beberapa tim memberikan pergantian proses pembelajaran dengan trauma healing. Hal ini juga akan sangat membantuk untuk proses pemulihan traum.<sup>121</sup>

Bencana gempa bumi yang di saksikan oleh masyarakat khususnya anak-anak di Kabupaten Lombok Barat akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan jiwa, yang mengakibatkan anak menjadi kurang percaya diri, cepat marah dan yang lain sehingga potensi-potensi yang dimiliki akan redup.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Hendra selaku kepala dinas Pendidikan:

“Trauma healing ini harus dilakukan secara maksimal terutama kepada siswa dan guru yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat. pemulihan trauma khususnya terhadap siswa harus dilakukan guna menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang, karena upaya pemulihan pasca bencana ini mencega anak memiliki keperibadian buruk”<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Wawancara Bapak Misbah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kekait, Senin 11 Maret 2019 jam 12.15 wita di Ruang Kepala Sekolah

<sup>122</sup> Wawancara Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Senin, 5 Maret 2019 jam 08.10 wita dikanor Dinas Pendidikan

Trauma yang dirasakan akibat gempa berkepanjangan membuat masyarakat di Pulau Lombok Khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Barat sulit untuk pulih, karena intensitas gempa yang terus menerus membuat orang tua takut untuk melihat anaknya kembali untuk bersekolah atau hanya untuk mendapatkan trauma healing dari dinas pendidikan atau dari relawan-relawan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti yang melihat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menangani trauma bagi siswa-siswa yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan tentang trauma healing walaupun 6 bulan pasca gempa dinas pendidikan yang berkerja sama dengan para relawan masih memberikan trauma healing ke setiap sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan kepada guru-guru agar nantinya bisa memberikan trauma healing kepada siswa.<sup>123</sup>

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penanganan trauma *healing* pemerintah sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan trauma yang dialami akibat bencana gempa yang melanda Pulau Lombok. Pemerintah bekerja sama dengan relawan-relawan kemanusiaan dalam melakukan trauma *healing* ini. Walaupun bencana gempa bumi sudah berlalu, namun proses trauma *healing* kepada para siswa dan guru masih

---

<sup>123</sup> Observasi di SDN 2 Kekait

dilakukan hingga saat sekarang, inilah bentuk komitmen yang di berikan oleh pemerintah.

b. Sekolah Darurat

Pasca bencana gempa bumi di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Barat pemerintah sudah membuat berbagai macam kebijakan untuk penangan korban gempa khususnya di bidang pendidikan. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah dengan pendataan siswa dan guru yang menjadi korban, selanjutnya menghilangkan trauma yang di alami masyarakat khususnya siswa dan guru yang terdampak gempa dan pembuatan sekolah-sekolah darurat.

Hancurnya fasilitas ruang belajar di sekolah-sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat membuat proses pembelajaran khususnya di 3 (tiga) kecamatan yang terdampak gempa terganggu, bahkan ada beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan proses pembelajaran sama sekali dikarenakan sekolah roboh.

Hal ini membuat pemerintah dalam hal ini kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat pasca gempa langsung memberikan bantuan-bantuan berupa terpal untuk membuat sekolah-sekolah darurat sementara agar proses pembelajaran bisa berjalan walaupun tidak efektif karena kondisi yang tidak memungkinkan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat:

Salah satu langkah yang kami lakukan dari pihak pemerintah adalah dengan menyiapkan dan memberikan tenda-tenda darurat ke sekolah-sekolah yang terdampak gempa sambil menunggu bantuan dari pemerintah pusat terkait ruang belajar sementara.<sup>124</sup>

Pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil observasi peneliti bahwa, hingga saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan tenda-tenda darurat dan ada beberapa sekolah yang telah menggunakan bangunan sekolah baru yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui pengajuan dari dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat.<sup>125</sup> Pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Nawawi M.Pd selaku relawan dari Sanggar Belajar Midang yang tak henti-hentinya membantu memulihkan trauma dan proses pembelajaran:

Pembuatan sekolah-sekolah darurat itu yang melatar belakangi kami adalah kekhawatiran kami terhadap anak-anak tentang pendidikan mereka. Anak-anak juga banyak yang mengeluh ingin sekolah namun pasca gempa yang berkepanjangan membuat para orangtua khawatir anak-anaknya untuk bersekolah karena takut akan gempa susulan. Agar para orang tua tidak khawatir makanya kami dari memutuskan untuk menangun sekolah darurat di samping posko tenda-tenda pengungsian sehingga para orang tua tidak khawatir dan semetara proses pembelajaran di sekolah mereka berjalan semestinya.<sup>126</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Saiful kepala sekolah SDN 1 Selat beliau juga membenarkan bahwa kebijakan yang diberikan dinas pendidikan terhadap sekolah sebagai berikut:

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Selasa 6 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

<sup>125</sup> Observasi, di SDN Taman Sari

<sup>126</sup> Wawancara Nawawi selaku relawan dari Sanggar Belajar Midang, Senin 19 Maret 2019 jam 17. 15 wita di Posko Sanggar Belajar Midang.

Dari awal pasca gempa sekolah sudah menerima berupa terpal yang selanjutnya kami gunakan sebagai sekolah-sekolah darurat karena ruang belajar sudah diberikan tanda merah berarti tidak layak untuk ditempati, kami membuat tenda darurat di lapangan sekolah, kami juga mendapatkan bantuan berupa tenda dari BNPB, PMI, dan dari Tim Sar NTB sambil menunggu bantuan dari dinas pendidikan pusat terkait pembangunan ruang belajar.<sup>127</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala sekolah SDN 1 Selat di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti yang melihat bahwa kebijakan tentang penanganan dan pembuatan sekolah darurat ini dilakukan dengan cepat oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan.<sup>128</sup> Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran cepat pulih walaupun tidak seefektif biasanya, namun akan memberikan banyak manfaat untuk menghilangkan trauma.

c. Perbaikan sarana dan Prasarana

Setelah 6 (enam) bulan berlalu bencana gempa bumi, kebijakan yang di ambil oleh Dinas Pendidikan adalah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, beliau mengatakan:

Yang menjadi fokus kami sekarang ini adalah perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah terdampak gempa. Kami sudah memperbaiki sekolah-sekolah yang termasuk dalam katagori rusak sedang dengan anggaran dana 2018 dan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat atau roboh kami bekerja sama dengan, kementerian PUTR, Kementerian pendidikan dan pihak ketiga (lembaga-lembaga kemanusiaan) untuk bekerja sama membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh.<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Wawancara Bapak Lalu Saiful Bahri selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Selat Kecamatan Narmada, Rabu 13 Maret 2019 jam 10.00 wita di kantor kepala sekolah

<sup>128</sup> Observasi di SD Negeri 1 Selat

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Selasa 6 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

Beliau juga menambahkan bahwa dalam proses penanganan pasca gempa banyak sekali relawan-relawan yang membantu dan memberikan sumbangan berupa buku dan alat penunjang pendidikan. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di sekolah-sekolah terdampak gempa bahwasanya perbaikan serta pembangunan sekolah-sekolah sudah mulai dilakukan.<sup>130</sup> Mengingat sudah 6 (enam) bulan pasca gempa bumi, seharusnya semua sekolah yang terdampak gempa sudah mendapatkan gedung baru atau renovasi untuk yang rusak ringan.

Hal ini juga sesuai dengan dokumentasi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan renovasi serta proses pembangunan gedung-gedung sekolah baru.<sup>131</sup> Hal ini juga di perjelas oleh kepala sekolah SDN 2 Gunung Sari, beliau mengatakan:

Pada bulan Desember 2018 kemarin, pihak dinas pendidikan memberikan perbaikan gedung. Ruang kepala sekolah, ruang guru, dan perpustakaan sudah direnovasi, sedangkan ruang belajar kami masih menunggu untuk segera di tindak lanjuti, sementara proses pembelajaran kami menempati sekolah-sekolah darurat.<sup>132</sup>

Pernyataan kepala sekolah SDN 2 Gunung Sari juga diperjelas dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Kekait, beliau mengatakan:

---

<sup>130</sup> Observasi di Sekolah-sekolah Terdampak Gempa di Kabupaten Lombok Barat

<sup>131</sup> Dokumentasi di Lampiran.

<sup>132</sup> Wawancara Bapak Erfan selaku kepala sekolah SDN 2 Gunung Sari, Selasa 12 Maret 2019 jam 07:30 wita di runag kerja

Beberapa lokal ruang kelas di sekolah kami sedang di bangun, sementara kami melakukan kegiatan pembelajaran masih di sekolah darurat, namun sekolah ini masih sangat nyaman untuk siswa kami belajar. Kami sangat bertrimakasih atar kerjasama dan dukungan dari pemerintah terkait pembangunan kembali runag kelas yang roboh akibat gempa.<sup>133</sup>

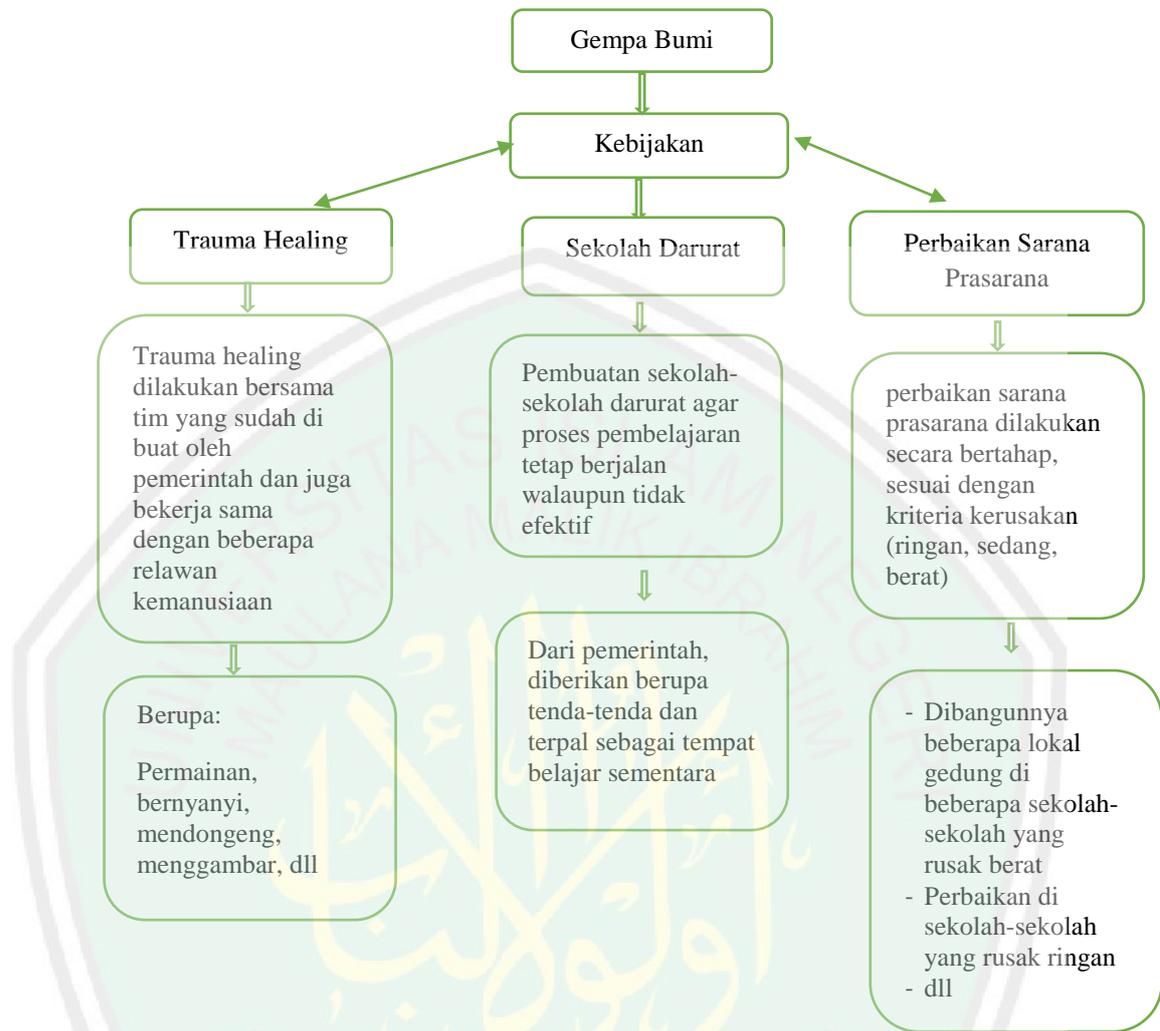
Pemerintah juga terus berupaya agar secepatnya perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana ang rusak akibat gempa rampung. Agar proses pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat berjalan efektif sebagai mana menstinya dan juga pemerintah akan meminimalisir kendala-kendala terkait penanganan pendidikan.

Dengan kebijakan yang sudah di berikan terkait dengan penanganan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat di atas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, agar anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana bisa ceria dan pulih kembali, serta dengan kebijakan yang dibuat khususnya di bidang pendidikan agar bisa kembali melakukan proses pembelajaran yang efektif.

Dari hasil paparan data penelitian di atas, disimpulkan seperti bagan di bawah ini:

---

<sup>133</sup> Wawancara Bapak Misbah, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kekait, Senin 11 Maret 2019 jam 12.15 wita di Ruang Kepala Sekolah



## 2. Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.

Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan harapan. Bisa dilihat dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak gempa sudah mulai belajar seperti biasanya walaupun ada beberapa sekolah yang masih kurang efektif dikarenakan kondisi ruang belajar yang tidak memungkinkan untuk belajar secara efektif. Seperti

hasil wawancara dengan bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat:

Sejauh ini kami dari pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengembalikan proses pembelajaran seperti biasanya, baik dengan melakukan perbaikan-perbaikan sarana sekolah dan pemberian bantuan berupa buku pelajaran dan segera mungkin berkordinasi dengan pemerintah pusat supaya segera dibangun sekolah-sekolah yang roboh akibat gempa agar supaya anak-anak bisa belajar seperti biasanya tanpa harus kepanasan di tenda-tenda dan sekolah-sekolah darurat.<sup>134</sup>

Pernyataan di atas juga diperjelas oleh hasil observasi peneliti di beberapa sekolah yang ada di kecamatan yang terdampak gempa, karena ada beberapa sekolah yang bangunan sekolahnya sedang di bangun dan ada beberapa sekolah yang masih menempati sekolah-sekolah darurat, seperti di SD Negeri 1 Selat proses pembelajaran masih di tenda-tenda darurat dan prose pembelajarannyapun bida sikatakan tidak efektif, karena jika sudah jam 10.00 wita siswa dan guru mengeluh karena panas.<sup>135</sup>

Seperti yang di katakan oleh bapak Saiful Bahri selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Selat:

Proses belajar mengajar disini tidak bisa berjalan seefektif mungkin, karena kondisi kami yang serba kekurangan, tapi alhamdulillah kami masih bersyukur karena masih ada tenda-tenda darurat yang kami bisa gunakan sebagai tempa belajar sementara sehingga siswa-siswa kami tidak terlalu jauh dengan sekolah-sekolah yang proses pembelajaran normal. Beliau juga menambahkan bahwa dinas pendidikan juga sudah berupaya untuk memindahkan lokasi sekolah ke trauma center healing namun hanya bertahan dalam 1 (satu) bula saja, karena lokasi yang berdekatan dengan hilir sungai dan bidang tanah yang agak miring, ketika air datang tenda-tenda belajar ikut tergenang air, inilah yang

<sup>134</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

<sup>135</sup> Observasi di SDN 1 Selat

membuat kami terpaksa harus kembali ke sekolah walaupun harus menepati sekolah-sekolah darurat.<sup>136</sup>

Pernyataan Bapak Saeful di atas juga di benarkan oleh bapak Hendra selaku kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat:

Terkait dengan beberapa sekolah yang sekolahnya terdampak gempa dan tidak bisa di tempati kami sudah berupaya untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar supaya segera dibangun gedung-gedung sekolah karena pemerintah sangat prihatin dengan siswa-siswa yang harus belajar di sekolah-sekolah darurat dan jika siswa-siswa belajar di sekolah- sekolah darut tidak mungkin proses pembelajaran berjalan efektif. Kami dari dinas pendidikan bekerja sama dengan LPMP juga segera menyesuaikan kurikulum baru pasca gempa agar di sesuaikan dengan kondisi sekolah-sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat.<sup>137</sup>

Pernyataan bapak Hendar di atas di benarkan oleh Erfan selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Gunung Sari

Setelah gempa kemarin kami di intruksikan oleh dinas pendidikan untuk tetap melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah darurat sebelum kami mendapatkan bantuan untuk merenovasi sekolah yang rusak akibat gempa serta menyesuaikan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru dan proses belajar mengajar juga kami tidak laksanakan seperti biasanya, karena kondisi di yang tidak memungkinkan bagi kami karena kalau sudah jam 11 siswa mengeluh kepanasan dan tidak efektif lagi, makanya kami terpaksa menghentikan proses pembelajaran lebih awal.<sup>138</sup>

Pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti ke sekolah-sekolah yang terdampak gempa, peneliti melihat bahwa ada beberapa sekolah yang kondisi sekolahnya sangat

<sup>136</sup> Wawancara Bapak Lalu Saiful Bahri Selaku Kepala Sekolah SDN 1 Selat, Senin 18 Maret 2019 jam 09.15 wita di ruang kerja

<sup>137</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

<sup>138</sup> Wawancara Bapak Erfan selaku kepala sekolah SDN 2 Gunung Sari, Selasa 12 Maret 2019 jam 07:30 wita di runag kerja

memprihatinkan dan masih menempati sekolah-sekolah darurat yang selanjutnya proses pembelajarannya juga sangat tidak kondusif.<sup>139</sup>

Dalam implementasi kebijakan pendidikan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat sejauh ini sudah melakukan berbagai macam upaya agar proses pendidikan di sekolah terdampak gempa bisa berjalan lagi, walaupun tidak seefektif mungkin dikarenakan banyak kendala namun tidak membuat pemerintah patang arang untuk terus membenahi pendidikan di Kabupaten Lombok Barat.

Pemerintah juga sudah mengupayakan untuk segera mungkin sekolah-sekolah yang rusak bisa dibangun lagi namun karena terbentur biaya dan bantuan dari pemerintah pusat maka pemerintah hanya bisa membangun dan memperbaiki beberapa sekolah saja, walaupun demikian dinas pendidikan tetap memantau proses pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Barat.<sup>140</sup> Didukung pula dengan dokumentasi yang tertera pada program penanganan pemerintah rencana aksi gempa yang dapat di lihat di lampiran.

Pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil observasi peneliti di SD Negeri 3 Taman Sari sudah di bangun 4 lokal gedung sekolah anti gempa yang sudah bisa di tempati dan 3 gedung lainnya masih dalam proses pembangunan, ketika gempa melanda bangunan sekolah 99% roboh oleh karena itu dinas terus mengupayakan agar bantuan dari pemerintah

---

<sup>139</sup> Observasi di Sekolah-sekolah terdampak gempa Kabupaten Lombok Barat

<sup>140</sup> Observasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat

pusat segera di cairkan. sedangkan di SD Negeri 1 Jeringo juga 5 lokal gedung sekolah di bangun dan sudah dapat digunakan.<sup>141</sup>

Hasil observasi peneliti diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala SD Negeri 3 Taman Sari, bapak Faizul beliau mengatakan:

Pasca gempa Lombok sekolah kami bangunannya roboh dan terpaksa harus belajar di tenda-tenda darurat. Namun kami dari sekolah terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk segera di bangun kami sekolah kembali. Alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan sudah sangat cepat dan selalu mengawal proses perbaikan sarana dan prasarana yang rusak, ini contohnya kami sudah dibangun 4 lokal gedung belajar anti gempa dan 3 gedung lainnya masih dalam proses pembangunan.<sup>142</sup>

Pendapat di atas juga di benarkan oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat, bapak Hendra beliau mengatakan:

Dari awal gempa melanda hingga saat ini, kami selalu berkoordinasi dengan UPTD, kepala sekolah dan Pengawas agar terus memberikan informasi-informasi terkait dengan kerusakan baik kerusakan sedang sampai dengan berat. Kami dari pemerintah daerah terus berupaya agar secepatnya di sektor sarana dan prasarana ini segera di perbaiki, karena sektor ini yang paling urgen dan harus di selesaikan dengan cepat. Namun memang keterbatasan kami dari pemerintah daerah untuk perbaikan sekolah harus bertahap, dan juga ada beberapa sekolah yang memang diberikan tanggung jawab ke pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, walaupun demikian kami terus memantau perkembangan pembangunan karena kami di sini sebagai penanggung jawab pendidikan.<sup>143</sup>

Hasil wawancara dengan kepala dinas pendidikan juga diperkuat dengan hasil dokumentasi terkait rencana aksi gempa yang dapat di lihat di

<sup>141</sup> Observasi di SD Negeri 3 Taman Sari dan SD Negeri 1 Jeringo

<sup>142</sup> Wawancara Bapak Fauzul Bayani selaku Kepala Sekolah SDN 3 Taman Sari, 13 Maret 2019 jam 11.30 wita di kantor kepala sekolah.

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

lampiran. Dalam dokumen tersebut sudah ada data sekolah, jumlah kerusakan, dana yang di butuhkan hingga darimana sumber dana berasal.<sup>144</sup> Pemerintah sangat optimis bahwa pendidikan di Kabupaten Lombok Barat ini akan bangkit pasca gempa dan akan kembali efektif.

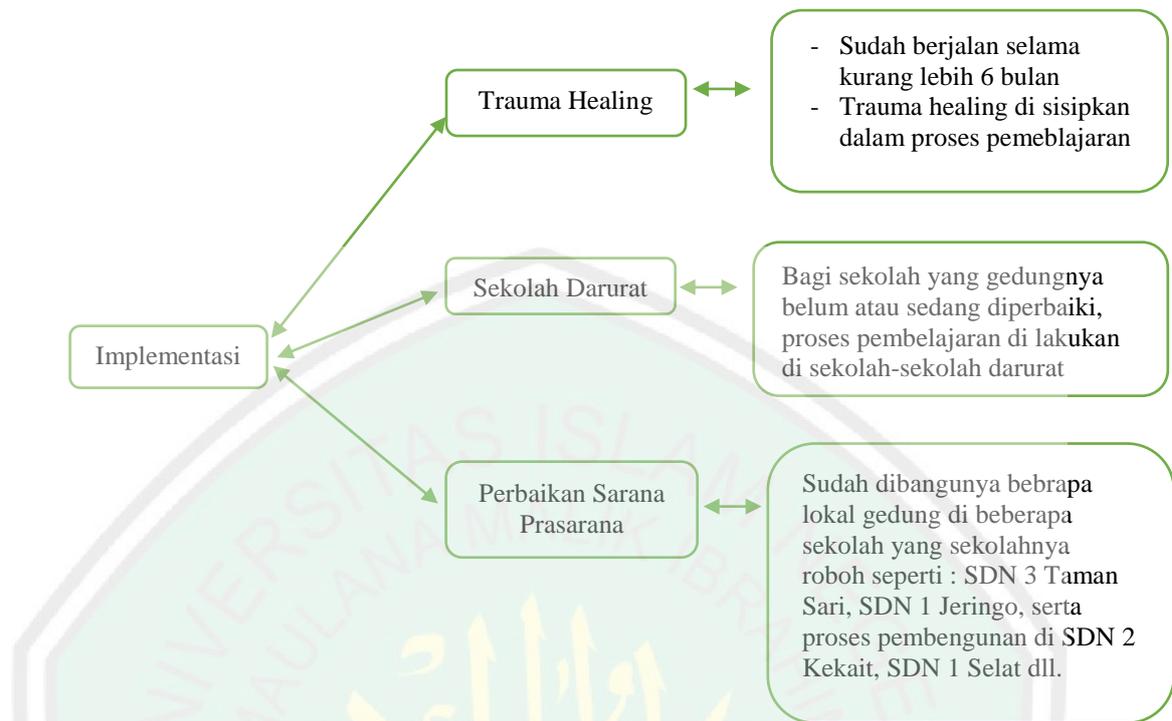
Hasil observasi dan dokumentasi, implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat sudah berjalan dengan sangat baik, ini terlihat dari proses penanganannya, terutama dalam sektor sarpras. Walaupun proses pengerjaanya secara bertahap namun hingga saat ini sudah banyak gedung-gedung sekolah yang diperbaiki hingga dibangun lagi gedung-gedung sekolah anti gempa. Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga sudah memberikan bantuan berupa bahan ajar, seraga yang nantinya akan menunjang proses pembelajaran yang efektif.<sup>145</sup>

Proses implementasi kebijakan dapat berjalan apabila di implementasi dengan baik. Berikut ini skema proses implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

---

<sup>144</sup> Dokumentasi program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

<sup>145</sup> Observasi dan dokumentasi, Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.



### 3. Evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat .

Evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi yang dibuat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan atau belum. Evaluasi meliputi kondisi fisikis siswa dan guru yang terdampak gempa, proses pembelajarannya, dan proses perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana. Kepala dinas pendidikan melakukan evaluasi terfokus pada proses perbaikan dan pembangunan sarana prasaran, dikarenakan hal ini sangatlah penting di prioritaskan agar proses pendidikan di Kabupaten Lombok Barat bisa berjalan normal kembali.

Sebelum mengevaluasi kebijakan dinas pendidikan menggunakan pendekatan yang berupa kunjungan untuk mengetahui keadaan sekolah

yang terdampak gempa serta melakukan kunjungan ke setiap UPTD di kecamatan terdampak gempa. Hal ini dibenarkan dan diungkapkan oleh kepala SDN 3 Taman Sari, Bapak Fauzul Bayani beliau mengatakan:

Bapak kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat mengunjungi sekolah kami untuk mengetahui kondisi terkini dari sekolah dan juga melihat sejauh mana proses pendidikan apakah sudah berjalan normal atau masih ada kendala. Jika memang ada kendala kami langsung memberi tahu apa saja kendalanya dan nanti ada tim yang langsung diutus untuk mengantisipasi kendala yang kami alami. Beliau juga memeriksa beberapa bangunan yang sudah rampung dan meninjau juga bangunan sekolah kami yang sedang dalam proses pembangunan serta memberikan motivasi kepada para siswa-siswa.<sup>146</sup>

Dalam kunjungan Kepala Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah yang terdampak gempa bertujuan untuk mengetahui keadaan sekolah serta keadaan siswa dan guru dalam proses recovery pasca gempa. Pernyataan kepala sekolah SDN 3 Taman Sari tersebut didukung dengan dokumentasi pada program kerja rencana aksi gempa dan sudah sangat terperinci kerusakan dan sumber dana yang dialokasikan untuk membantu membangun sekolah-sekolah.<sup>147</sup>

Kepala Dinas Pendidikan dalam melakukan kunjungan ke sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan yang didasari oleh pandangan bahwa walaupun sekolah kita rusak akibat bencana, namun semangat sekolah untuk mengembalikan lagi proses pembelajaran yang efektif menjadi poin utama. Kepala dinas tak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada sekolah-sekolah agar kembali bangkit.

---

<sup>146</sup> Hasil wawancara Bapak Fauzul Bayani selaku Kepala Sekolah SDN 3 Taman Sari, 13 Maret 2019 jam 11.30 wita di kantor kepala sekolah.

<sup>147</sup> Dokumentasi program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan pernyataan di atas, hal ini dibenarkan oleh Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, bapak Erwin Rahman beliau mengatakan:

Dari mulai gempa bumi pertama, Bapak Kepala dinas langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kondisi sekolah-sekolah, dan melihat bagaimana penanganan dari awal hingga saat ini, beliau juga terus berkoordinasi dengan semua pihak agar segera mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar siswa dapat belajar di ruang kelas seperti biasanya.<sup>148</sup>

Pernyataan di atas dibenarkan juga oleh kepala sekolah SD Negeri

2 Kekait bapak Misbah, beliau mengatakan

Perbaikan sarana dan prasarana di sekolah kami ini dalam tahap pembangunan. Sementara gedung sekolah di bangun kami menempati sekolah darurat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sudah 4 kali dari semenjak gempa kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat mengunjungi sekolah hanya untuk melihat sejauhmanan pembangunan di sekolah kami.<sup>149</sup>

Pernyataan di atas juga di benarkan oleh pernyataan kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat, beliau mengatakan:

Sistem evaluasi, kami memanfaatkan semua stakeholder dan selalu mengingatkan tim dikdas selalu memonitoring dan evaluasi sekolah-sekolah yang terdampak atau wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Kami memfungsikan semua stakeholder terdiri dari UPTD, kepala sekolah melalui K3Snya, pengawas dinas maupun pengawas mapel, semua turun dan memberikan masukan, melaporkan semua kendala dan proses perkembangan pembelajaran pasca gempa. Memang ada beberapa sekolah yang sampai saat ini belum efektif dalam proses pembelajaran di akibatkan karena kendala dana, di mana sekolah itu tidak layak karena sekolah itu awalnya adalah sekolah bertingkat dan harus di robohkan, saat ini

<sup>148</sup> Wawancara Bapak Erwin Rahman selaku Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Senin, 4 Maret 2019 jam 14.20 wita dikanor kasubag dikbud.

<sup>149</sup> Wawancara Bapak Misbah selaku kepala sekolah SDN 2 Kekait, Selasa 12 Maret 2019 jam 10.30 wita di ruang kerja

belum ada biaya untuk memperbaiki karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk proses penanganan sarana dan prasarana terbagi menjadi tiga katagori, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten dan juga penanganannya di bagi menjadi dua kementerian yaitu dari kementerian PUTR dan kementerian pendidikan. Adapun juga hingga saat ini ada beberapa sekolah yang belum efektif dikarenakan masih meneumpang di sekolah lain, dan ada beberapa sekolah yang diselesaikan dengan totalitas oleh pihak ke tiga yaitu Ingio sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat.<sup>150</sup>

Pernyataan bapak kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat sesuai juga dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ke beberapa sekolah-sekolah yang sekolahnya sedang dalam proses rekontruksi sarana dan prasarana. Sudah banyak sekolah-sekolah yang sedang dalam tahap pembangunan, ada beberapa dalam tahap perbaikan dan ada juga sekolah yang masih menumpang di sekolah lain seperti SDN 1 Taman Sari yang hingga saat ini masih menumpang di SMP 1 Gunung Sari dikarenakan sekolahnya hingga saat ini belum juga di perbaiki, karena SDN 1 Taman Sari merupakan kewenangan dari kementerian pendidikan. Walaupun demikian pemerintah daerah juga selalu berkunjung dan memberikan motivasi serta bantuan peralatan sekolah, media pembelajaran, seragam dan semua penunjang proses pembelajaran.<sup>151</sup>

Evaluasi di lakukan untuk mengetahui sejauh mana progres implementasi yang sudah di jalankan terutama pada dua hal yang paling mendasar seperti yang di katakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat:

---

<sup>150</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

<sup>151</sup> Observasi di Sekolah-sekolah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat

Kami dari pihak pemerintah, melakukan evaluasi untuk mengetahui progres-progres atau ketercapaian dari implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah di lapangan, yang paling utama ada dua yaitu evaluasi sarana prasarana dan akademik (trauma healing dan proses pembelajaran). Evaluasi juga kami lakukan dengan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang kami buat, selanjutnya kami juga melakukan evaluasi terkait dengan sumber dana dan sumber daya yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang kami buat, karena sumber dana harus jelas, sehingga dalam proses implementasinya pun bisa berjalan sesuai dengan keinginan.<sup>152</sup>

Pernyataan di atas juga di tambahkan oleh kasubag program dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat

Kami dalam setiap melakukan evaluasi terutama evaluasi terkait dengan program-program yang sudah di jalankan tentu juga melihat sejauhmana efektivitasnya di lapangan, efektivitas di sini adalah bagaimana proses recovery sarana prasarana di sekolah-sekolah terdampak gempa, apakah sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal apa belum, selanjutnya proses pembelajaran setelah gempa di sekolah-sekolah terdampak gempa sudah berjalan seperti biasanya atau masih banyak kekurangan-kekurangan, setelah kami mengetahui hasil dari deretan evaluasi yang sudah kami lakukan, barulah kami membuat kesimpulan mana sekiranya program yang sudah berjalan dengan baik, dan mana yang masih belum untuk selanjutnya di tindak lanjuti.<sup>153</sup>

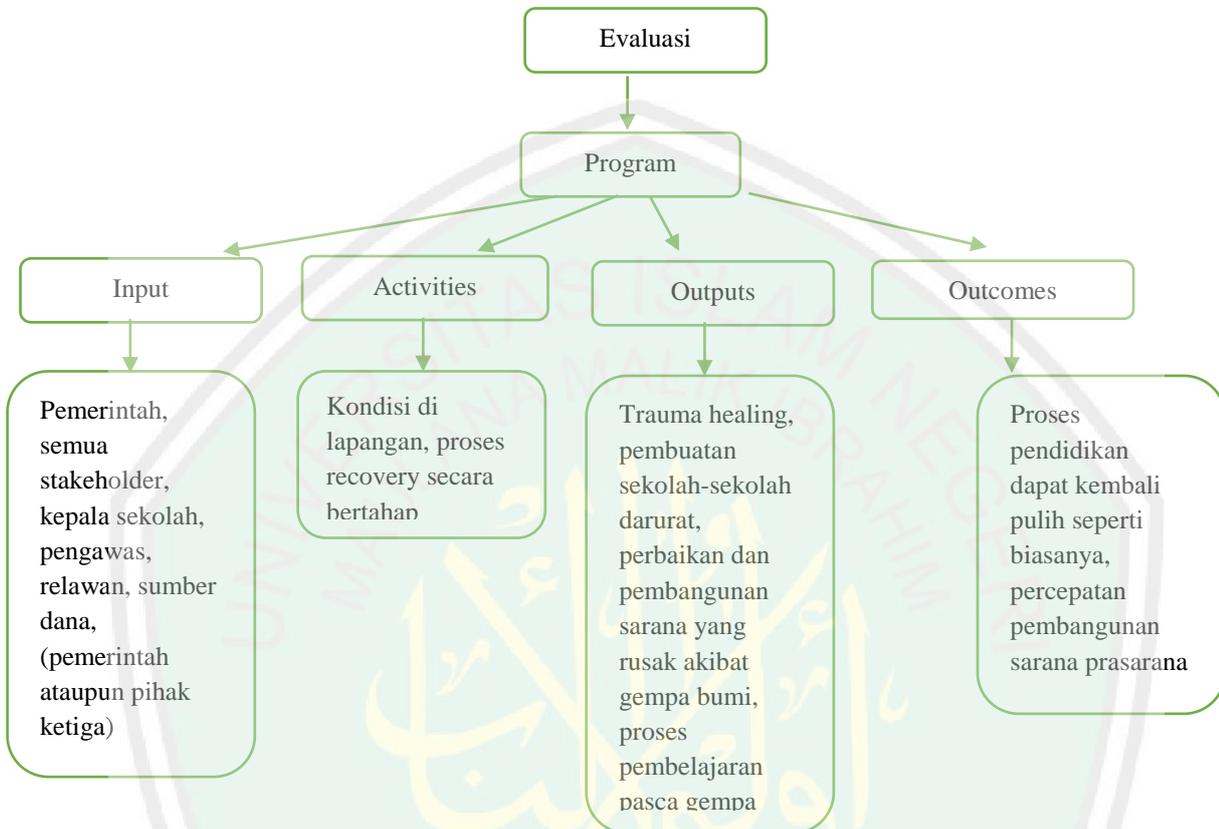
Pernyataan di atas juga sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Proses evaluasi dilakukan guna melihat tingkat keberhasilan program yang dibuat.<sup>154</sup> Jadi proses evaluasi program yang dilakukan oleh dinas atau pemerintah mengikut sertakan semua *stakeholder* dan melakukan evaluasi secara

<sup>152</sup> Wawancara dengan Bapak Hendra selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Maret 2019 jam 10.00 wita di Ruang Kerja

<sup>153</sup> Wawancara Bapak Erwin Rahman selaku Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, Senin, 4 Maret 2019 jam 14.20 wita di kantor kasubag dikbud.

<sup>154</sup> Observasi di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah terdampak Gempa Kabupaten Lombok Barat

bertahap, terarah, dan melakukan sesuai dengan pedoman evaluasi yang sudah di buat.

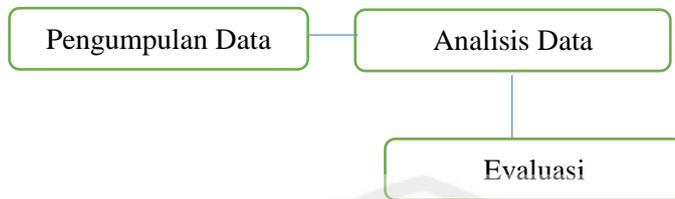


### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan diskripsi dan paparan di atas, maka kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat dapat ditemukan hal-hal penting, sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat

Dinas pendidikan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan yang dilakukan menggunakan beberapa langkah, peneliti menemukan model yang di pakai oleh Kepala Dinas Pendidikan pada saat merumuskan kebijakan.



Gamabar 1.3 Model Perumusan Kebijakan

Dalam pelaksanaan perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas pendidikan yaitu dimulai dari pengumpulan data yang dihadiri oleh kepala UPTD, Pengawas, Kepala Sekolah serta tim penanganan pendidikan oasca gempa untuk membahas kebijakan yang akan ditetapkan, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni deskripsi data yaitu masukan-masukan dari para peserta dan disiskusikan pada saat rapat yang kemudian hasil dari diskusi dievaluasi lagi agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Maka hasil dari kebijakan di atas adalah sebagai berikut:

a. Trauma Healing

Trauma healing merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada korban selamat pasca bencana gempa bumi yang melanda pulau Lombok yang tujuannya menghilangkan trauma yang dialami oleh masyarakat terutama anak-anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat membuat tim yang di bagi beberapa titik untuk memberikan trapi trauma healing. trauma healing juga tidak hanya diberikan untu anak-anak tetapi juga para guru. Karena pasca gempa yang paling utama dilakukan adalah trauma healing, rasa ketakutan

yang ada akibat bencana ditakutkan akan bisa menghambat proses keberlangsungan hidup para korban terutama anak-anak.

b. Sekolah Darurat

Sekolah darurat dibangun sementara agar para siswa bisa melakukan proses pembelajaran, dikarenakan sekolah yang rusak. Walaupun belajar di sekolah darurat tidak mengurangi semangat para siswa untuk menimba ilmu. Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat juga memberikan keringan kepada sekolah-sekolah yang terdampak gempa agar proses pembelajaran di atur dan nyaman mungkin. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk proses pembelajaran efektif.

c. Perbaikan Sarana dan Prasarana

Perbaikan sarana dan prasarana sudah dilakukan semenjak akhir tahun 2018 yang lalu, karena sarana dan prasarana di sekolah terdampak gempa banyak yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Kepala dinas pendidikan kabupaten Lombok Barat mengutamakan untuk segera dibangun sekolah yang rubuh dan memperbaiki sekolah-sekolah yang kerusakannya ringan.

**2. Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.**

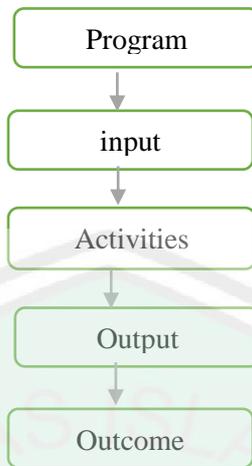
Hasil penelitian, peneliti melihat sejauh ini proses implementasi kebijakan penanganan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat khususnya di sekolah-sekolah terdampak gempa sudah berjalan sesuai dengan alur

yang sudah di buat oleh Dinas Pendidikan. Di lihat dari pembangunan dan proses pembelajaran yang pelan-pelan kembali normal, walaupun tidak semua sekolah namun ada kemajuan dari sebelumnya. Sekolah-sekolah sudah mulai melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah darurat serta ada beberapa sekolah yang sudah menempati sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Implementasi kebijakan ini diharapkan akan terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat agar proses pendidikan segera bangkit dan normal kembali.

### **3. Evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat.**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan kritis dan penting. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang, memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Hasil penelitian bahwa peneliti menemukan temuan pada saat Kepala Dinas Pendidikan dalam mengavaluasi hasil dari kebijakan yaitu dengan tahapan sebagai berikut:



**Gambar 1. 4 Evaluasi kebijakan**

Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat melakukan evaluasi program yaitu evaluasi input, pada penelitian ini inputnya adalah semua stake holder yang terdampak gempa dan perlunya untuk diberikan bantuan. Evaluasi activities merupakan aktivitas dan prioritas yang dilakukan dalam penanganan pendidikan, misalnya pendataan jumlah korban terdampak gempa, pendataan sekolah terdampak gempa, trauma healing, pembutan sekolah darurat, perbaikan sarana dan prasarana. Evaluasi output untuk mengetahui gambaran hasil dari keluaran program, dalam penelitian evaluasi output dilakukan untuk mengetahui hasil dari perbaikan saran dan prasaran yang sedang atau dalam tahap pembangunan dan juga proses pembelajarannya. Evaluasi outcome merupakan dampak dan maaf yang di hasilkan, dalam penelitian ini outcomenya berupa percepatan proses recovery dan proses pendidikan yang beransur membaik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat melakukan evaluasi di lembaga pendidikan dengan cara strutural, di mana Kepala Dinas

sebagai yang bertanggung jawab mengintruksikan pengawas kabupaten, selanjutnya pengawas ini langsung ke masing-masing UPTD di Kecamatan terdampak gempa memonitoring serta mengevaluasi sistem kerja di UPTD terkait penanganan dan pengawasan sekolah—sekolah terdampak gempa di bawah pimpinannya, selanjutnya UPTD langsung mengevaluasi melalui K3S dan juga langsung mendatangi sekolah-sekolah yang sedang tahap rekonstruksi, hasil dari monitoring UPTD ini dilaporkan ke Dinas Pendidikan, setelah laporan di terima, Kepala dinas melakukan rapat evaluasi bersama tim dan stakeholder tadi untuk memastikan kebijakan yang sudah di buat bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal, apabila ada kebijakan yang kurang sesuai maka akan di evaluasi lagi agar bisa sesuai dengan keadaan lembaga tersebut, evaluasi kebijakan ini juga untuk membahas kendala-kendala yang di hadapi dalam rekonstruksi dan pembangunan pendidikan pasca gempa bisa berjalan lancar.

## BAB V

### PEMBAHASAN

Pada bab ini secara berurutan berisi 1) Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat. 2) Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat. 3) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.

#### A. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat

Kebijakan diartikan dengan kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat membuat kebijakan pendidikan pasca gempa dengan cepat sehingga bisa segera di tangani. Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dalam pendidikan pasca gempa berupa: 1) *Trauma Heling* 2) sekolah darurat, dan 3) perbaikan sarana prasarana. Dinas Pendidikan mengharapkan nantinya pendidikan di sekolah terdampak gempa akan segera kembali efektif seperti biasanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan atau pembinaan dan pengembangan pendidikan kejuruan, pengelolaan dokumentasi, layanan informasi, ketata usahaan dan pelayanan masyarakat dan bertugas membantu

Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan serta tugas pembantu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>155</sup>

Kepala Dinas Pendidikan membuat kebijakan secara langsung pasca gempa untuk penanganan korban terdampak gempa baik sekolah, siswa, guru maupun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dengan segera membentuk tim untuk melakukan pendataan ke semua lokasi terdampak gempa hal ini dilakukan agar para korban dapat segera di tangani.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan beberapa sekolah yang terdampak gempa hasil yang di dapatkan peneliti terkait dengan kebijakan pasca gempa sebagai berikut:

#### 1. Trauma Healing

Trauma yang mendalam dirasakan oleh masyarakat se Pulau Lombok pasca gempa yang mengguncang 5 Agustus 2018 terutama anak-anak yang sangat ketakutan. Penanganan-penanganan kebencanaan pada umumnya memberikan pengobatan seperti trauma *healing* ke pada para korban yang terdampak agar bisa sedikit menghilangkan ketakutan akibat bencana.

Hal ini juga dilakukan oleh pihak Dikbud Kabupaten Lombok Barat memberikan trauma *healing* kepada para korban khususnya para guru dan siswa yang terdampak gempa. Trauma healing bertujuan agar para korban

---

<sup>155</sup> <https://dikbud.lombokbaratkab.go.id/14>, di unduh pada tanggal 20 Maret 2019 jam 23.30 Wita

bencana dapat terus melanjutkan kehidupannya secara normal. Maka terapi pemulihan sangat dibutuhkan.

Trauma merupakan suatu kejadian fisik atau emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap fisik dan psikologis seseorang dalam rentangan waktu yang relative lama.<sup>156</sup> Terapi trauma healing adalah salah satu kebutuhan utama bagi korban bencana. Dengan terapi trauma healing diharapkan korban bisa benar-benar sembuh dari traumanya dan dapat menjalani kehidupan sebagaimana sebelum bencana terjadi. Bencana alam tersebut banyak menimbulkan kerugian dan kesedihan pada korbannya. Bahkan tak jarang pula korban bencana alam mengalami trauma berat akibat bencana. Ketakutan terhadap bencana adalah reaksi yang sangat umum dialami oleh korban bencana. Terkadang korban bencana mengalami pengulangan ingatan mengenai bencana tersebut yang kemudian dapat berkembang lebih serius menjadi rasa hilangnya emosi, atau bahkan mengalami insomnia, dan waspada berlebihan.

Pada anak-anak trauma terhadap bencana alam dapat merenggut keceriaan anak. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan trauma *healing*. Terapi trauma *healing* dapat dilakukan dengan pemberian obat atau terapi psikis. Pada prinsipnya trauma *healing* yang diberikan pada orang dewasa dan berbeda pada anak-anak. Pada anak-anak trauma *healing* dapat dilakukan melalui beberapa metode, yang pertama adalah melalui teknik *play*

---

<sup>156</sup> Weaver, A.J., Flannelly, L.T., and Preston, J.D, *Counseling Survivors of Traumatic Events: A handbook for pastors and other helping professional*. (Avenue South, Nashville: Abingdon Press. 2013), 137

*teraphy* pada anak. Dengan menggunakan *play therapy* pada anak akan diajak mengatasi traumanya melalui media permainan. Metode lain yaitu dengan terapi melalui tari, dengan tari anak dapat mengekspresikan emosi yang ada di dalam dirinya. Hal ini dikarenakan tari bersifat rekreatif<sup>157</sup>

Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Anak-anak perlu dibantu untuk bisa menatap masa depannya dan membangun harapan baru dengan kondisi yang baru pula. Bagi orang tua, layanan konseling trauma akan membantu mereka memahami dan menerima kenyataan hidup saat ini, untuk selanjutnya mampu melupakan semua tragedi dan memulai kehidupan baru.

Disamping untuk menstabilkan kondisi emosional, layanan konseling trauma bagi orang tua idealnya juga memberikan keterampilan yang dapat dijadikan modal awal memulai kehidupan baru dengan pekerjaan-pekerjaan baru sesuai kapasitas yang dimiliki dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, mereka bisa sesegera mungkin menjalani hidup secara mandiri sehingga mereka tidak terus-menerus menyandarkan kehidupannya pada orang lain, termasuk pada pemerintah. Untuk mencapai efektivitas layanan, konseling trauma dilakukan dengan dua format, yaitu format individual (untuk korban yang tingkat stres dan depresinya berat), dan format kelompok (untuk individu yang beban psikologisnya masih pada derajat sedang).

---

<sup>157</sup> Ade Rahman, *Analisa Kebutuhan Program Trauma Healing Untuk Anak-anak Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Pua Tahun 2018*. Implementasi Manajemen bencana Vol XII No 7 Juli 2018.

Ada dua kondisi psikologis yang sangat berat yang dialami oleh para korban bencana yang lolos dari maut. Pertama, mereka menanggung beban psiko-logis yang tidak ringan karena mereka harus hidup dengan trauma kehilangan sanak keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidupnya bisadirasakan sebagai pukulan psikologis yang berat. Tidak semua orang sanggup mengatasi penderitaan dipisahkan secara paksa dari orang-orang yang dicintainya. Di sisi lain, mereka kini juga kehilangan pekerjaan dan akses usaha serta modal untuk melanjutkan hidup.

Kedua, dalam kondisi yang serba sulit itu, mereka harus mampu segera bangkit dan melakukan penguatan diri sendiri, mengambil hikmah dari seluruh musibah itu untuk modal dasar memulai kehidupan baru dari titik nol, bahkan bisa jadi mereka harus memulai dari kondisi minus. Membangun kehidupan yang bermakna, butuh ketegaran jiwadan keyakinan kuat atas kebesaran Allah dibarengi dengan usaha yang tak kenal lelah.

## 2. Perbaikan Sarana prasarana dan Sekolah Darurat

Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran agar efektif dan efisien. Namun akibat gempa yang melanda Lombok banyak sekolah-sekolah rusak ringan, berat hingga semua gedung sekolah roboh. Hal ini yang membuat pemerintah mengambil kebijakan di sektor pendidikan dengan memperbaiki sarana prasaran dengan cepat dan pembuatan sekolah-sekolah darurat.

Pentingnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik”<sup>158</sup>

Hal ini juga terdapat pada peraturan pemerintah, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi : perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dari setiap satuan pendidikan meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga dan tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.<sup>159</sup>

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas.

---

<sup>158</sup> Undang-undang Republik Indonesia tentang sisitem pendidikan Nasional No 20 tahun 2013

<sup>159</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2

Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan.

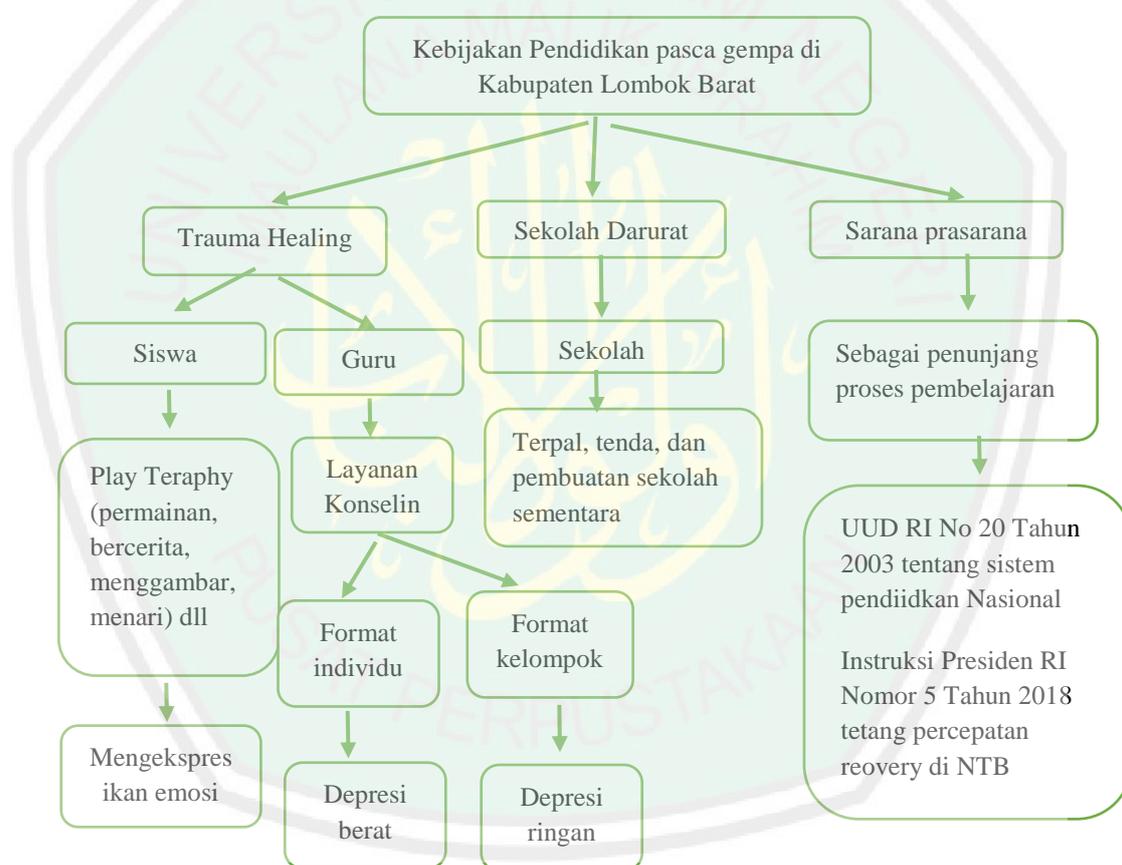
Proses Belajar Mengajar (PBM) atau Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan semakin sukses bila ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, sehingga pemerintah pun selalu berupaya untuk terus-menerus melengkapi sarana dan prasarana sekolah bagi seluruh jenjang tingkatan pendidikan, sehingga kekayaan fisik negara yang berupa sarana dan prasarana sekolah sangat besar.<sup>160</sup>

Seperti halnya dengan sekolah-sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat yang sarana dan prasarana rusak. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah sudah tentu mempengaruhi hasil belajar siswa. Sebelum sekolah-sekolah yang terdampak gempa di perbaiki dan di bangun ulang langkah awal pemerintah dalam pemulihan proses pembelajaran pasca gempa salah satu cara yang di lakukan pemerintah adalah dengan membuatkan sekolah-sekolah sementara, hingga menunggu bantuan

---

<sup>160</sup> Gunawan Ari , *Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro*. (Jakarta: Rineka Cipta 1996). 144

dari kementerian pendidikan dan pihak ketiga untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rubuh akibat gempa bumi. Dikbud sudah berusaha semaksimal mungkin agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif seperti semula, diharapkan dengan adanya sekolah-sekolah darurat ini bisa digunakan sementara untuk melakukan proses pembelajaran agar para siswa tidak terlalu ketinggalan jauh dengan sekolah-sekolah yang tidak terdampak gempa.



## B. Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat

Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan

oleh pemangku kebijakan yakni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara agar segera memulihkan proses pembelajaran di sekolah-sekolah terdampak gempa terbukti dengan dibangunnya beberapa sekolah-sekolah melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun dari anggaran dinas pendidikan sendiri.

Implementasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan kebijakan pendidikan yang sudah di buat, maka cara yang mudah untuk mengetahui kebijakan berjalan atau tidak adalah bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan dengan baik, tidak akan di rasakan manfaatnya. Sebaliknya jika diimplementasikan dengan baik, akan lebih bermanfaat apapun hasilnya.

Sesuai dengan yang dikatakan Grindle dalam Hasbullah, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu.<sup>161</sup>

Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa ini bertujuan agar proses pendidikan di sekolah-sekolah terdampak gempa agar segera bangkit dan pulih.<sup>162</sup> Kebijakan yang di buat harus sesuai dengan tujuan yang sudah

---

<sup>161</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan....*, 92

<sup>162</sup> Lihat di BAB II, 44

di buat saat perumusan kebijakan, karena pada implementasi kebijakan ini lah menjadi tolak ukur sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Terlihat dari beberapa sekolah yang sekolahnya roboh akibat gempa sekarang sudah dibangun beberapa lokal gedung serta sekolah yang mengalami kerusakan sedang di perbaiki oleh Dinas Pendidikan dan terus dikawal dengan baik agar bisa segera di tempati oleh para siswa. Proses pembelajaran juga sudah mulai berjalan dengan lancar, terlihat dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan kepala sekolah.

Seperti yang dikatakan Hasbullah tentang keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan yang sudah di buat.<sup>163</sup> Pendapat Hasbullah ini sesuai dengan implementasi kebijakan terkait pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik, terlihat dengan semakin membaiknya proses pendidikan di sekolah-sekolah yang terdampak gempa.

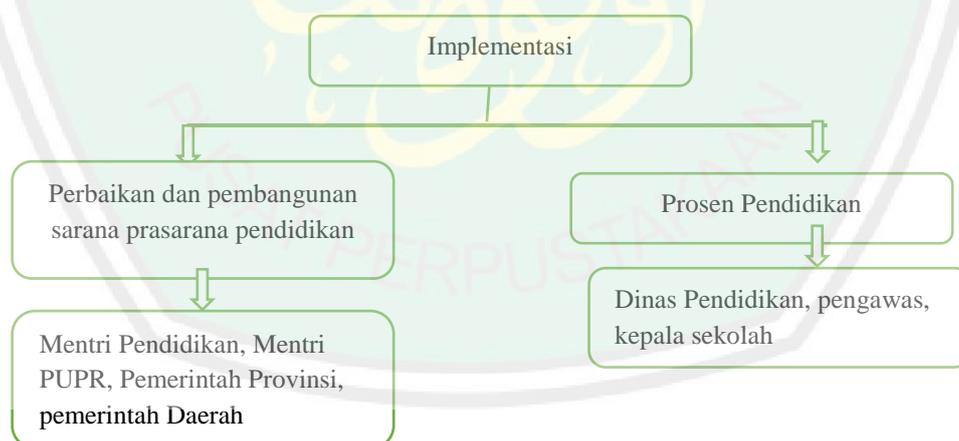
Seperti di SDN 3 Taman Sari yang sekolahnya 90 % roboh, perbaikan sarana dan prasarana sudah berjalan sesuai dengan targer dari Dinas Pendidikan, 5 (Lima) gedung belajar sudah siap di tempati dan masih 4 (empat) gedung sekolah yang masih dalam tahap pembangunan. Pemerintah juga berupaya untuk memenuhi sarana seperti papan tulis, bangku, meja agar proses pendidikan di sana berjalan dengan baik.

---

<sup>163</sup> Lihat di BAB II, 45

Implementasi kebijakan di Kabupaten Lombok Barat tidak sepenuhnya dapat berjalan atau di implementasikan dengan baik karena ada beberapa faktor yang menghambat, Siagian dalam Hasbullah mengatakan 5 (lima) faktor yang dapat mendukung atau menghambat sebuah implementasi kebijakan, dan yang paling urgen menurut peneliti adalah faktor dana. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, faktor dana inilah yang menjadi penghambat proses implementasi kebijakan dengan baik, karena dana yang minim membuat beberapa sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat hingga saat ini masih belum sepenuhnya di renovasi bahkan di bangun kembali.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat menargetkan perbaikan sarana dan prasarana akan rampung pada tahun dengan menggunakan anggaran 2019 agar para siswa bisa kembali bersekolah seperti biasanya dan tidak lagi belajar di sekolah darurat.



### C. Evaluasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.

Terkait dengan hal ini, bentuk evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat antara lain: Memonitoring sekolah-

sekolah terdampak gempa, evaluasi melibatkan semua stakeholder seperti kepala sekolah, pengawas, dan Kepala UPTD, stakeholder melaporkan semua kendala dan memberikan masukan ke Dinas Pendidikan terkait dengan penanganan pasca gempa baik sarana prasarana, dan proses pembelajaran.

Evaluasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat keberhasilan dari kebijakan yang telah dibuat.<sup>164</sup> Secara umum evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar, dan indikator.<sup>165</sup>

Proses evaluasi kebijakan ini dilakukan oleh seluruh stakeholder atau tim karena jumlah sekolah yang terdampak gempa tidaklah sedikit, jadi dinas Pendidikan memfungsikan jajaran-jajarannya. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan. Apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai keiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.<sup>166</sup> Sedangkan Dye dalam Parson memberikan pengertian evaluasi kebijakan adalah memeriksa yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap target dari segi tujuan yang ingin dicapai.<sup>167</sup>

---

<sup>164</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis...*, 25

<sup>165</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan...*, 118

<sup>166</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005), 119

<sup>167</sup> Dye Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Kencana Pernada Media Group: Jakarta 2008) 559

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menegaskan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan.<sup>168</sup> Tugas selanjutnya bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan pendidikan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif.

Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.<sup>169</sup>

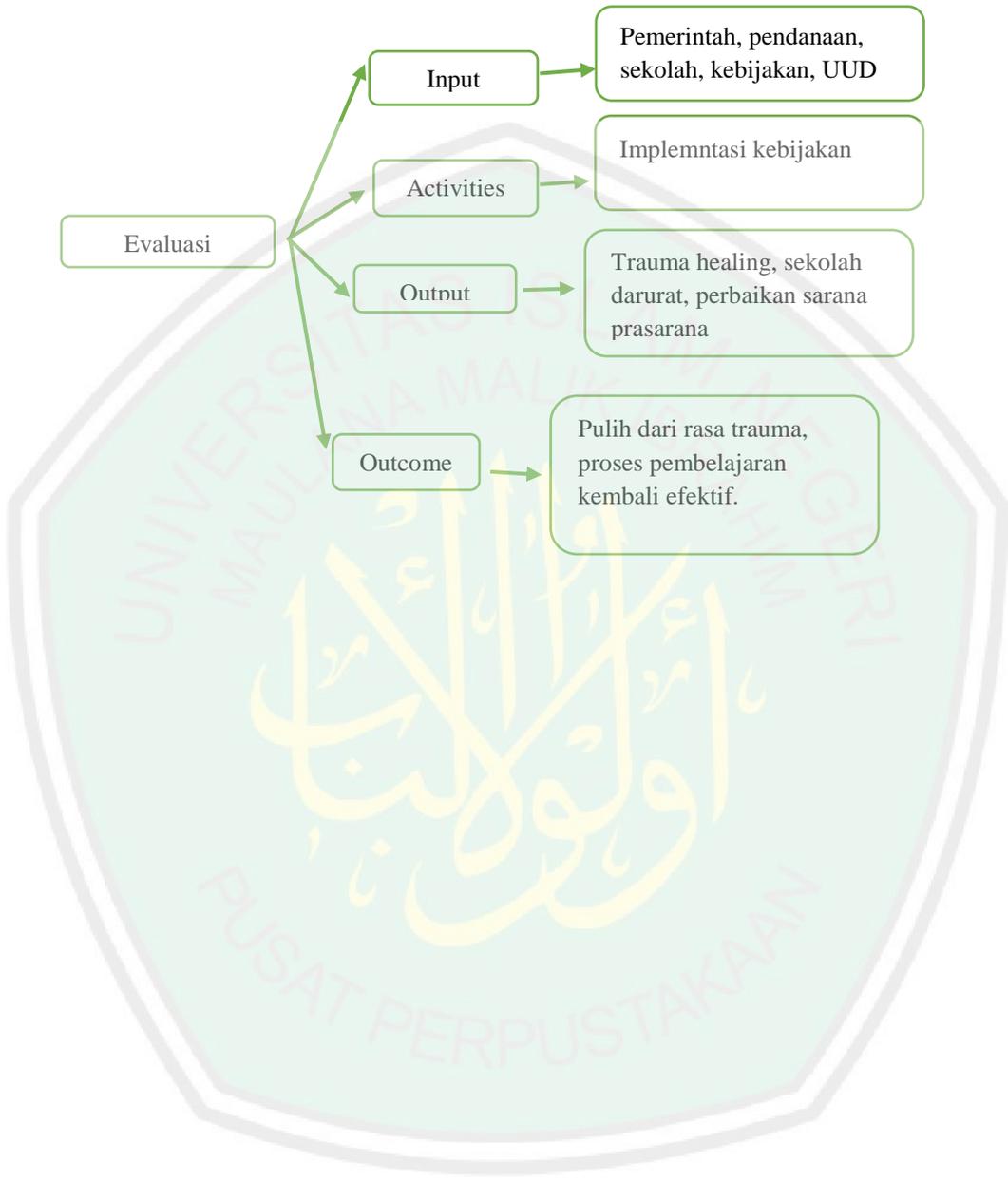
Evaluasi kebijakan terhadap pendidikan pasca gempa bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi tidak berarti hal ini suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. evaluasi kebijakan merupakan upaya untuk mengidentifikasi perkembangan capaian konsep atau tujuan dari waktu ke waktu melalui suatu identifikasi dan atau pengamatan terhadap proses pendidikan pasca gempa.

Perlu menjadi catatan penting, bahwa sebuah kebijakan tidak dapat dinilai dari satu waktu (*one shot evaluation*), tetapi harus diobservasi dan diidentifikasi secara terus menerus. Karena itu, evaluasi melibatkan semua stakeholder agar sasaran yang dihasilkan bisa tepat dan sesuai yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan.

---

<sup>168</sup> Nugroho, *Public Policy* (Elex Media Komputindo: Jakarta 2009), 535-536

<sup>169</sup> Firyal, *Studi Evaluasi*...,25



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat.**

Kepala Dinas Pendidikan membuat kebijakan pasca gempa yaitu trauma healing, sekolah darurat serta perbaikan sarana dan prasarana.

##### **a. Trauma healing**

Trauma healing dilakukan dengan tujuan agar mengurangi rasa takut dari masyarakat khususnya siswa dan guru yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat. Agar para korban terdampak gempa ini bisa menghilangkan stress, takut rasa kehilangan orang yang dicintai serta mampu untuk bangkit melanjutkan kehidupannya.

##### **b. Sekolah darurat**

Dinas pendidikan bekerja sama dengan tim untuk membangun sekolah-sekolah darurat di sekolah-sekolah terdampak gempa yang sekolahnya rusak atau roboh. Ini bertujuan agar proses pembelajaran pasca gempa harus tetap berjalan walaupun tidak seefektif sebelum terjadinya gempa.

##### **c. Perbaikan sarana dan prasarana**

Perbaikan sarana dan prasarana pasca gempa sudah dilakukan secara bertahap agar semua sekolah yang terdampak gempa bisa menempati

ruang belajar dan jika sarana dan prasarana sudah memadai akan membuat pendidikan di Kabupaten Lombok Barat bangkit lebih cepat.

## **2. Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat**

Hingga saat ini implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di sekolah terdampak gempa sudah baik, terlihat dari proses perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta proses pembelajaran yang semakin hari semakin membaik. Dari hasil penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat selalu mengkosrecek proses implementasi dari kebijakan yang dibuat. Dengan harapan kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap proses pendidikan.

## **3. Evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat**

Kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat melakukan evaluasi kebijakan mengikut sertakan seluruh stake holder dan kepala dinas pendidikan juga langsung datang ke sekolah-sekolah untuk melihat proses recovery pasca gempa. Proses evaluasi juga dengan melihat input, activities, output serta outcomenya sehingga dalam mengevaluasi berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan.

### **B. Saran**

#### **1. Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hendaknya memantau perkembangan kebijakan pendidikan pasca gempa dengan lebih intensip, sehingga proses pendidikan di sekolah-sekolah terdampak gempa bisa kembali efektif seperti

sebelumnya. Untuk sekolah-sekolah yang hingga saat ini belum ditangani agar segera di buat kebijakan khusus atau penanganan khusus agar pendidikan di Sekolah-sekolah terdampak gempa segera bangkit.

2. Para kepala sekolah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat agar tetap semangat dalam membangkitkan pendidikan, mengembalikan proses pembelajaran dan selalu optimis untuk Lombok Barat Bangkit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla M.Amin. 2008. *Paradigma Baru pendidikan Islam, restrospeksi dan proyeksi Modernisasi pendidikan Islam di indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral pendidikan Islam , Departemen Agama Islam RI*. Jakarta: IISEP
- Ade Rahman, *Analisa Kebutuhan Program Trauma Healing Untuk Anak-anak Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Pua Tahun 2018*. Implementasi Manajemen bencana Vol XII No 7 Juli 2018.
- Ady Muzwardi, Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Manajemen Bencana Alam (Rekontruksi Aceh Pasca Tsunami Samudra Hindia), *Andalas Jurnal of Internasional Studies*, 2 (November) 2016
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabheta
- Alifudin Moh. 2012. *Reformasi Pendidikan*. Jakarta: Magnascript Publishing.
- Anif Yulin Kurniati, Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Pasca Erupsi Merapi, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, Juli 2014
- Ari Gunawan. 1996. *Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BNPB : 606 Sekolah rusak akibat gempa Lombok”, *Metro Tv News.com*, Minggu, 12 Agustus 2018
- Brock Anthony. 1982. *Pendidikan dan Hari Depan, Kerangka Masyarakat Belajar*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Christanto, Joko. I. 2011. *Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Daulae Herawati Tatta. 2014. *Menciptakan Pembelajaran yang Efektif*, 6 Juli
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama
- Dumn William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta:Gajahmada University Press
- \_\_\_\_\_2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua. Yogyakarta:Gajahmada University Press

- Dwi Utari, Nurulia dkk, “*Sekolah Petra (Penanganan Trauma) Bagi Anak Korban Bencana Alam*”, 2 (September) 2012
- Edwards III, Georgi C. 1980. *Implementing Public Policy*. Woshington, D.C :Congressional Quarterly Inc
- Emzir. 2010. *Metodelogi Penelitian kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fahmi Rusvidianti dan Baroto Tavip Indrojarwo,” *Desain Kelas Darurat Pasca Bencana untuk Sekolah Dasar di Indonesia*”, JURNAL SAINS DAN SENI ITS, 2 (2015)
- Faisal Sanafiah. 1999. *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asyh
- Fatah Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Fatkuroji.2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan: Studi SDIT Bina Amal dan SD Al- Azar 29BSB Semarang*. Semarang: UIN Walisongo
- Firyal Akbar dan Widya Kurniati Mohi. 2018. *Studi Evaluasi Kebijakan “Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Gempa 6,4 Mengguncang Sembalun Lombok”, Liputan6, Minggu 26 Juli 2018
- Gempa 7.00 kembali mengguncang Lombok”, Liputan6, Minggu 5 Agustus 2018
- George S. Papadopoulos, Pendidikan Pada abad XXI Pokok Persoalan dan Harapan, Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI, (UNESCO Publising,1996)
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hariyanto, Suryono. 2011. Suryono. *Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat Imam. 2016. *The Handbook*. Jakarta: Pernada Media.
- <https://dikbud.lombokbaratkab.go.id/14>, di unduh pada tanggal 20 Maret 2019 jam 23.30 Wita

- Janet Hunter, *Earthquakes in Japan*, 2015 Cambridge University
- Kaoru Nakagawa dan Michiyo Yamamoto, "A Study on Factors Related to Earthquake Preparedness by Family of Non-institutionalized Individuals with Severe Motor and Intellectual Disabilities", *Japanese Journal of Social Welfare*, 55 (Mei) 2015.
- Katili, J.A dan P. Marks. 1963. *Geologi*. Bandung : Kiat Madju
- Legrad Paul. 1982. *Pendidikan Dipersoalkan*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Lia Hutasoit, "Kegiatan Sekolah di Lombok Belum Berjalan Normal Pasca Gempa", <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit/kegiatan-sekolah-di-lombok-belum-berjalan-normal-pasca-gempa> diakses tanggal 19 Oktober 2018 pukul 23.15
- Liliana Mayer, "Schooling System, Earthquakes and Beyond. The Chilean Experience of 2010", *Iberoamericana*, 55 (2014)
- Lincoln & Guba. 1995. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication.
- M. Djuaini Ghony & Fauzan al-Mansur. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ArRuzz media
- Minarti Sri, 2012. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzmedia
- Moleong Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Tejemahan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhardi. 2004. *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*, 20 Desember.
- Ndraha Taliziduhu. 2002. *Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Noor, Djauhari. 2006. *Geologi Lingkungan* . Jogjakarta: Graha Ilmu
- Noval Dhwinuari Antony, " Pasca Gempa 7.0 SR, Sekolah di NTB diliburkan", <https://news.detik.com/berita/4173517/pasca-gempa-70-sr-sekolah-di-ntb-diliburkan> diakses tanggal 19 Oktober 2018 pukul 22.09
- Nugroho Riant. 2009. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurul Hartini, *Remaja Nangroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami*, 2011

- Parsons Dye. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Purnama Media Group: Jakarta
- Parsons Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42 ayat 1 dan 2
- Purwanto Ngalm. 1998. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remadja Karya CV
- Qomarun, Model Complement and Focus Dalam Peanganan Pasca Bencana Tahap Rehabilitas (Studi Kasus pada Pristiwa Gempa Bumi di Klaten, 27 Mei 2006), *Warta*, 1 (Maret) 2007
- Rakel Sylvia Bjorndottir, On The Great East Japan Earthquake, and How Disaster Preparedness Prevailed, Uta Reichardt (September) 2017
- Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder. 1991. *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*. New York: Wm.C. Brown Publisher
- Rohmatulloh dab Mohammad Imam Shalahuddin, Pengembangan Model Logika Evaluasi Program Pengembangan SDM Responsif Gender Bidang ESDM, *Jurna Tehnik Industri*, Vol 15 No.2 Agustus 2014
- Rustan A dan Ferry Firdaus, "Ancaman Bencana dan Kebijakan Penanganannya di Daerah". *Bomeo Administrator*, 1, (2011)
- Siti Irene Astuti, "Pemulihan Psikologi Sosial Pasca Gempa Oleh Guru Di Kabupaten Bantul DIY," *Cakrawala Pendidikan*, 2 (Juni) 2008
- Soekanto. Soejono. 1989. *Teori Sosiologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soyomukti Nurani. 2010. *Teori-teori Pendidikan*. Jogjakarta:Ar-Ruz Media
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D Cet. Ke-20*, Bandung:Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, .Bandung:Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. Ke-24*. Bandung:Alfabeta

- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin Abdul Jabar. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktis Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Surahkmad Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta, KOMPAS Penerbit Buku
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Suryabrata Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syagala Syaiful. 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Kependidikan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, pasal 1 ayat 12 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Republik Indonesia tentang sisitem pendidikan Nasional No 20 tahun 2013
- Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (Bandung, Fokusindo Mandiri, cet 2 2012)
- Vladimir M. Cvetkovicl dkk, Knowledge and Perception of Secondary School Students in Belgrade about Earthquakes as Natural Disasters, 4 (March) 2015
- Weaver, A.J., Flannelly, L.T., an Preston, J.D. 2013. *Counseling Survivors of Traumat Events: A handbook for pastors and other helping professional*. Avenue South, Nashville: Abingdon Press.
- Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kebijakan Publik:Teori, Proses dan Studi Kasus, Cetakan Pertama*, Edisi dan Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS.
- Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.

Yusuf Farida. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta





LAMPIRAN



SDN 1 JERINGU

SDN 1 PENIMBUNG



**SDN 3 Taman Sari**



**Proses Pembelajaran di Tenda sekolah darurat**



## Sekolah Darurat



**Sekolah Darurat di SDN 1 Selat**



## Proses Pembelajaran di SDN 1 Selat



## Sekolah Darurat



## Proses pembangunan Sekolah anti Gempa



## Proses pembangunan sekolah di SDN 2 Kekait



## Wawancara dengan kepala sekolah



## Lampiran 1

### Pedoman Observasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat

Pengamatan	Variabel	Indikator
Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat	Kebijakan Pasca Gempa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kebijakan Dinas terkait pendidikan pasca gempa</li><li>2. Implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Sekolah terdampak</li><li>3. Evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa</li></ol>
Lokasi, bangunan sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat	Kondisi fisik bangunan sekolah yang terdampak gempa,	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi sekitar lokasi terdampak gempa</li><li>2. Kondisi sarana dan prasaranan pasca gempa</li><li>3. Proses pembelajaran pasca gempa</li><li>4. Kondisi siwa, guru pasca gempa</li></ol>

## **Lampiran 2**

### **Pedoman Dokumentasi Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Barat**

#### **Dokumen Arsip**

1. Data-data sekolah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat
2. Data-data kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat
3. Foto kegiatan proses pembelajaran pasca gempa di sekolah-sekolah terdampak gempa
4. Foto perbaikan sarana dan prasarana pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat

### Lampiran 3

**Pedoman Wawancara**  
**Kebijakan Pendidikan Pasca gempa**  
**di Kabupaten Lombok Barat**

**Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses pembelajaran di sekolah terdampak gempa?
2.	Berapa jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Lombok Barat yang terdampak gempa?
3.	Bagaimana Kebijakan terkait pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?
4.	Bagaimanan implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?
5.	Apakah implemntasi di bidang pendidikan sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang di buat pasca gema di Kabupaten Lombok Barat?
6.	Bagaimana bentuk evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

## Lampiran 4

### **Pedoman Wawancara Kebijakan Pendidikan Pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat**

**Sekolah-sekolah terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat.**

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses pembelajaran di sekolah pasca gempa?
2.	Bagaimana keadaan sekolah pasca gempa?
3.	Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa?
4.	Apakah Pemerintah (Dinas Pendidikan) sudah memberikan solusi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak?
5.	Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah (Dinas Pendidikan) hingga saat ini?
6.	Bagaimana implementasi kebijakan di sekolah terkait penanganan pendidikan pasca gempa?
7.	Bagaimana evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan penanganan pendidikan pasca gempa di sekolah ini?

## Lampiran 5

### **Pedoman Wawancara** **Kebijakan Pendidikan Pasca gempa** **di Kabupaten Lombok Barat**

#### **Relawan pendidikan**

1. Apa saja kegiatan selama menjadi relawan di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana langkah dalam pembuatan sekolah-sekolah darurat?
3. Apakah ada kendala terkait dengan pembuatan sekolah-sekolah tersebut?



## Lampiran 6

### Traskip wawancara

Nama : Drs. M Hendrayadi  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat  
Hari/tanggal : Senin, 4 Maret 2019  
Tempat : 09.15 wita  
Waktu : Ruang Kerja  
Keterangan : H (Hendrayadi) dan P (Peneliti)

P Bagaimana proses pembelajaran di sekolah terdampak gempa?

H Proses pembelajaran pasca gempa di sekolah-sekolah terdampak gempa terganggu, dan ada intruksi dari pemerintah provinsi untuk meliburkan sekolah-sekolah selama beberapa minggu. Tentunya pembelajaran di Kabupaten Lombok Barat terganggu. Kami dari Dinas Pendidikan membuat tim dan langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi terbaru sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa.

P Berapa jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Lombok Barat yang terdampak gempa?

H Yang sudah masuk data di Dinas Pendidikan sekitar 90 sekolah yang rusak baik rusak ringan maupun rusak berat.

P Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat pasca gempa?

H Hal pertama yang kami lakukan pada saat setelah gempa terjadi adalah langsung rapat dengan beberapa staff dan tim. Setelah itu saya langsung membeli beberapa terpal, selimut, sembako, dan langsung terjun ke lokasi terdampak gempa terparah di Kabupaten Lombok Barat. Saya memerintahkan staff dan tim untuk melakukan inventarisir jumlah korban, sekolah yang rusak, jumlah siswa dan guru yang terdampak

gempa, sehingga langkah cepat untuk penanganannya segera bisa kita laksanakan.

Selanjutnya, terkait dengan beberapa sekolah yang langsung terdampak gempa dimana sekolah-sekolah tidak bisa melakukan proses pembelajaran karena gempa yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat cukup parah dan berkepanjangan. Langkah yang kami lakukan adalah mencoba untuk menghimpun seluruh guru yang memiliki potensi untuk penanganan siswa yang terdampak gempa salah satunya adalah untuk menghilangkan trauma karena gempa yang berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat siswa, guru maupun masyarakat mengalami traumatik yang berat,

Dan yang terakhir kami lakukan dari pihak pemerintah adalah dengan menyiapkan dan memberikan tenda-tenda darurat ke sekolah-sekolah yang terdampak gempa sambil menunggu bantuan dari pemerintah pusat terkait ruang belajar sementara dan yang menjadi fokus kami sekarang ini adalah perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah terdampak gempa. Kami sudah memperbaiki sekolah-sekolah yang termasuk dalam kategori rusak sedang dengan anggaran dana 2018 dan untuk sekolah-sekolah yang rusak berat atau roboh kami bekerja sama dengan, kementerian PUTR, Kementerian pendidikan dan pihak ketiga (lembaga-lembaga kemanusiaan) untuk bekerja sama membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh.

- P Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?
- H Sejauh ini kami dari pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengembalikan proses pembelajaran seperti biasanya, baik dengan melakukan perbaikan-perbaikan sarana sekolah dan pemberian bantuan berupa buku pelajaran dan segera mungkin berkordinasi dengan pemerintah pusat supaya segera dibangun sekolah-sekolah yang roboh akibat gempa agar supaya anak-anak bisa

belajar seperti biasanya tanpa harus kepanasan di tenda-tenda dan sekolah-sekolah darurat

Terkait dengan beberapa sekolah yang sekolahnya terdampak gempa dan tidak bisa di tempati kami sudah berupaya untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat agar supaya segera dibangun gedung-gedung sekolah karena pemerintah sangat prihatin dengan siswa-siswa yang harus belajar di sekolah-sekolah darurat dan jika siswa-siswa belajar di sekolah- sekolah darurat tidak mungkin proses pembelajaran berjalan efektif. Kami dari dinas pendidikan bekerja sama dengan LPMP juga segera menyesuaikan kurikulum baru pasca gempa agar di sesuaikan dengan kondisi sekolah-sekolah yang terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat

P Bagaimana bentuk evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

H Sistem evaluasi, kami memanfaatkan semua stakeholder dan selalu mengingatkan tim dikdas selalu memonitoring dan evaluasi sekolah-sekolah yang terdampak atau wilayah-wilayah yang terdampak gempa. Kami memfungsikan semua stakeholder terdiri dari UPTD, kepala sekolah melalui K3Snya, pengawas dinas maupun pengawas mapel, semua turun dan memberikan masukan, melaporkan semua kendala dan proses perkembangan pembelajaran pasca gempa. Memang ada beberapa sekolah yang sampai saat ini belum efektif dalam proses pembelajaran di akibatkan karena kendala dana, di mana sekolah itu tidak layak karena sekolah itu awalnya adalah sekolah bertingkat dan harus di robohkan, saat ini belum ada biaya untuk memperbaiki karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk proses penanganan sarana dan prasarana terbagi menjadi tiga katagori, ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten dan juga penanganannya di bagi menjadi dua kementrian yaitu dari kementrian PUTR dan kementrian pendidikan.

Adapun juga hingga saat ini ada beberapa sekolah yang belum efektif dikarenakan masih meneumpang di sekolah lain, dan ada beberapa sekolah yang diselesaikan dengan totalitas oleh pihak ke tiga yaitu Ingio sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat



## Lampiran 7

### Traskip wawancara

Nama : Erfan, S.pd  
Hari/tanggal : Rabu, 13 Maret 2019  
Tempat : Ruang Kepala Sekolah  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Gunung Sari  
Waktu : 09.15 wita  
Keterangan : E (Erfan, S.Pd) dan P (Peneliti)

P Bagaimana proses pembelajaran di sekolah pasca gempa?

E Proses pembelajaran di sekolah pasca gempa sangatlah terganggu, seminggu setelah gempa tidak ada siswa yang datang ke sekolah dikarenakan gempa yang terus-terusan melanda dan rasa trauma yang di alami oleh siswa bahkan guru-guru.

P Bagaimana keadaan sekolah pasca gempa?

E Keadaan sekolah pasca gempa sangat memperhatikan, beberapa ruang kelas roboh dan yang lain retak-retak. Kami waktu itu tidak berani masuk ke ruangan kelas, takut tertimpa, karena selama beberapa menit gempa terus melanda.

P Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa?

E Pemerintah terkait pasca gempa memberikan kami bantuan berupa tenda-tenda untuk membuat sekolah-sekolah darurat, kami di minta untuk melaporkan semua kerusakan dan memfoto gedung-gedung yang rusak. Pemerintah juga memberikan trauma healing kepada para siswa dan guru. Kami di kumpulkan di tenda-tenda pengungsian. Setelah beberapa bulan pasca gempa gedung-gedung yang roboh dan gedung sekolah yang rusak ringan diperbaiki

walaupun tidak semua gedung, karena kami masih menempati sekolah-sekolah darurat.

P Apakah Pemerintah (Dinas Pendidikan) sudah memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak?

E Sejauh ini sekolah kami sudah di renovasi dan bisa ditempati lagi, walaupun sebagian masih menempati sekolah-sekolah darurat.

P Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah (Dinas Pendidikan) hingga saat ini?

E Sudah banyak langkah yang dilakukan dinas pendidikan terkait penanganan pendidikan pasca gempa di sekolah kami, salah satunya dengan selalu memantau kegiatan proses pembelajaran, dan jika ada masalah saya selaku kepala sekolah langsung di suruh menghadap dan mencari solusi bersama.

P Bagaimana implemtasi kebijakan di sekolah terkait penanganan pendidikan pasca gempa?

E Setelah gempa kemarin kami di intruksikan oleh dinas pendidikan untuk tetap melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah darurat sebelum kami mendapatkan bantuan untuk merenovasi sekolah yang rusak akibat gempa serta menyesuaikan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru dan proses belajar mengajar juga kami tidak laksanakan seperti biasanya, karena kondisi di yang tidak memungkinkan bagi kami karena kalau sudah jam 11 siswa mengeluh kepanasan dan tidak efektif lagi, makanya kami terpaksa menghentikan proses pembelajaran lebih awal.

P Bagaimana evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan penanganan pendidikan pasca gempa di sekolah ini?

E Kami di minta untuk tetap memberikan informasi terupdate terkait

dengan proses pendidikan. Kami juga diikuti sertakan dalam mengavaluasi kebijakn dari pemerintah.

## Lampiran 8

### Traskip wawancara

Nama : Fauzul Bayani, S.Pd  
Hari/tanggal : Rabu, 13 Maret 2019  
Tempat : Halaman Sekolah  
Waktu : 11. 30 wita  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 3 Taman Sari  
Keterangan : F (Fauzul Bayani, S.Pd) dan P (peneliti)

P Bagaimana proses pembelajaran di sekolah pasca gempa?

F Setelah di guncang gempa, SDN 3 Taman Sari semua gedung roboh dan sudah tidak ada yang tersisa lagi, otomatis proses pembelajaran juga tidak bisa kami lakukan, dan juga bantuan berupa tenda juga kami tidak langsung mendapatkan karena semua orang butuh dengan tenda pada saat itu.

P Bagaimana keadaan sekolah pasca gempa?

F Keadaan sekolah pada saat setelah gempa porak poranda, tidak ada satupun yang bisa kami selamatkan, semua tertimpa oleh bangunan.

P Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa?

F Kepala dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat pasca gempa kemarin langsung meninjau sekolah kami bersama Ibu UPTD Kecamatan Gunungsari. Beliau meminta data guru dan seluruh siswa kami yang terdampak gempa dan data sekolah terkait kerusakan. Karena di sekolah kami 99% bangunannya roboh, hanya beberapa tembok yang masih berdiri.

Setelah kami mengirimkan data siswa, guru dan kerusakan barulah

kami mendapatkan tenda-tenda dari dinas pendidikan dan dari relawan-relawan. Kami juga tidak heran karena medan dan lokasi sekolah kami cukup dalam sehingga tidak bantuanpun sulit datang tapi alhamdulillah setelah beberapa hari kami sudah bisa membuat sekolah-sekolah darurat, diberikan bantuan berupa trauma healing baik dari dinas pendidikan maupun dari pihak relawan yang datang dari berbagai kalangan dan negara.

- P Apakah Pemerintah (Dinas Pendidikan) sudah memberikan solusi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak?
- F Alhamdulillah berkat dari pendataan awal sekarang kami sudah dibangun 4 lokal gedung oleh menteri PUPR dan dalam beberapa minggu lagi sudah dapat kami tempatai, dan sebagain dalam proses pembangunan.
- P Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah (Dinas Pendidikan) hingga saat ini?
- F Dinas selalu memantau, baik via telepon maupun langsung datang untuk memantau kegiatan perbaikan saran dan prasarana.
- P Bagaimana implemntasi kebijakan di sekolah terkait penangan pendidikan pasca gempa?
- F Implementasii kebijakan pendidikan di sekolah kami sudah berjalan dengan maksimal, kami berterimakasih kepada dinas pendidikan yang sudah mengupayakan segera pembuata beberapa lokal gedung.
- P Bagaimana evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan penangan pendidika pasca gempa di sekolah ini?
- F Evaluasi kebijakan oleh pemerintah juga sangat baik, tidak ada yang sempurna namun pemerintah sudah sangat bekerja keras dalam mengevaluasi kebijakan yang di buat, kami juga turut andil dalam emngevaluasi dan menginformasikan hal apa saja yang menjadi

kendala selama proses pembuatan lokal gedung dan proses pendidikan.

## Lampiran 9

### Traskip wawancara

Nama : Misbah, S.Pd  
Hari/tanggal : Sabtu 9 Maret 2019  
Tempat : SDN 2 Kekait  
Waktu : 11.30 wita  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Keterangan : M (Misbah, S.Pd) dan P (Peneliti)

P Bagaimana proses pembelajaran di sekolah pasca gempa?

M Proses pembelajaran pasca gempa sangatlah terganggu. Karena kami takut untuk melakukan aktivitas di ruang.

P Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa?

M Awalnya kami dikabari via telepon untuk mengirim data sekolah, jumlah siswa, guru, dan kerusakan di sekolah kami, selanjutnya selang beberapa hari dari dinas pendidikan mengirmkan tim untuk mensurvai serta memberikan bantuan seperti terval untuk membuat sekolah sementara. Kami juga di berikan trauma healing, kalau trauma healing juga kami di sini mendapatkan dari berbagai lembaga sosial, dan dari dinas pendidikan kami diberikan bantuan berupa alat tulis, tas, dan seraga sekolah.

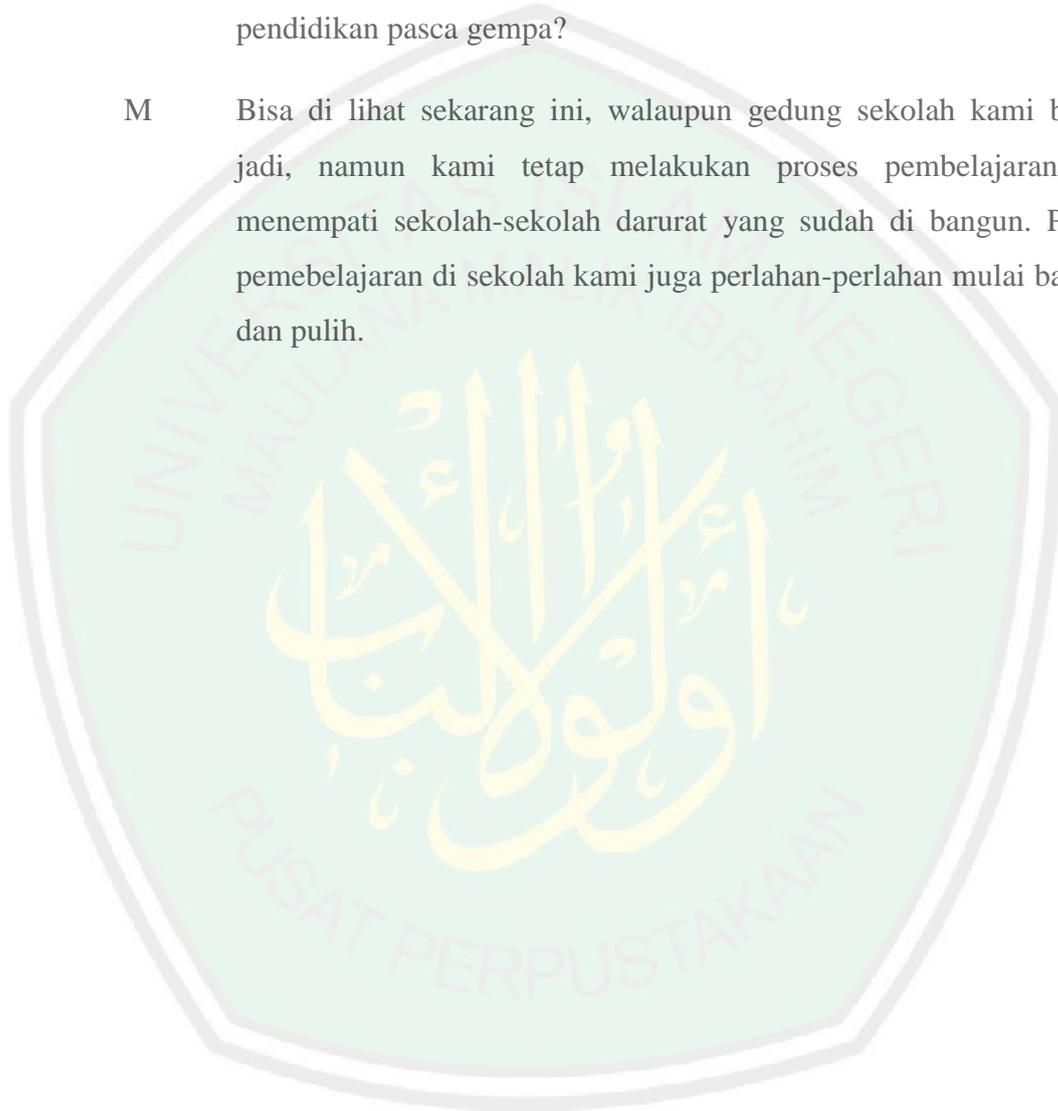
P Apakah Pemerintah (Dinas Pendidikan) sudah memberikan solusi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak?

M Dari data yang kami kirim ke dinas itu sebagai acuan yang dikirim ke kementrian pusat dan kami juga mendapatkan bantuan dari pihak

swasta untuk pembangunan beberapa lokal dan siswanya diberikan bantuan dari pemerintah melalui dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat.

P Bagaimana implementasi kebijakan di sekolah terkait penanganan pendidikan pasca gempa?

M Bisa di lihat sekarang ini, walaupun gedung sekolah kami belum jadi, namun kami tetap melakukan proses pembelajaran dan menempati sekolah-sekolah darurat yang sudah di bangun. Proses pembelajaran di sekolah kami juga perlahan-perlahan mulai bangkit dan pulih.



## Lampiran 10

### Traskip wawancara

Nama : Lalu Saiful Bahri, S.Pd  
Hari/tanggal : Selasa 12, Maret 2019  
Tempat : Sekolah Darurat  
Waktu : 08.30 wita  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Keterangan : L (Lalu Saiful Bahri, S.Pd) dan P (Peneliti)

- P Bagaimana proses pembelajaran di sekolah pasca gempa?
- L Sama halnya dengan sekolah lain pasca gempa, pasti proses pembelajarannya terganggu.
- P Apa saja kebijakan yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengembalikan proses pembelajaran pasca gempa?
- L Banyak kebijakan yang telah dilakukan dinas pendidikan terkait pengembalian proses pembelajaran pasca gempa, salah satunya karena sekolah kami mendapatkan tanda merah yang artinya sudah tidak boleh di tempati maka dari dinas, BNPB, PMI dll memberikan kami berupa tenda-tenda darurat dan terval untuk tempat belajar sementara. Kami juga mendapatkan trauma healing dan bantuan buku-buku pelajaran, seragam, alat tulis dll.
- P Apakah Pemerintah (Dinas Pendidikan) sudah memberikan solusi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang rusak?
- L Karena sekolah kami merupakan kewenangan dari kementerian pusat, maka dari dinas hanya memeberikan bantuan berupa terpal. Karena tidak semua sekolah-sekolah menjadi tanggung jawab dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat melainkan berbagi dengan

kementrian yang lainnya.

## Lampiran 11

### Traskip wawancara

Nama : Erwin Rahman SE  
Hari/tanggal : Senin 4 – 25 Maret 2019  
Tempat : Ruang Program Dikbud Lobar  
Waktu : Jam kerja  
Jabatan : Kasubag Penyusunan Program  
Keterangan : Er (Erwin Rahman SE) dan P (peneliti)

P Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat pasca gempa?

Er Kebijakan penangann pendidikan pasca gempa kita lakukan dengan langkah pertama yaitu pengimpentarisir atau pendataan seluruh satuan pendidikan baik rusak berat maupun rusak ringan. Setelah dilakukan impentarisir dari kabupaten langsung ,mengirimkan tim survey untuk memastikan kondisi-kondisi masing-masing sekolah, kami juga dari tim dinas memberikan berupa trauma healing.

P Bagaimanan implementasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

Er Kami beserta tim di Dinas Pendidikan selalu memantau sejauh mana jalannya implementasi kebijakan yang kami sudah buat, hingga saat ini implementasi sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan tentunya semua itu tidak bisa berjalan mulus, banyak kendala yang kami hadapi terutama biaya. Oleh karena itu proses perbaikan ataupun pembangunan kami lakukan dengan cara bertahap.

P Bagaimana bentuk evaluasi kebijakan pendidikan pasca gempa di Kabupaten Lombok Barat?

Er Dari mulai gempa bumi pertama, Bapak Kepala dinas langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kondisi sekolah-sekolah, dan melihat bagaimana penanganan dari awal hingga saat ini, beliau juga terus berkoordinasi dengan semua pihak agar segera mungkin untuk memperbaiki sarana dan prasarana agar siswa dapat belajar di ruang kelas seperti biasanya



## Lampiran 12

### Traskip wawancara

Nama : Nawawi  
Hari/tanggal : Rabu 20 Maret 2019  
Tempat : Ruang Guru  
Waktu : 19.15 Wita  
Jabatan : Relawan Pendidikan  
Keterangan : N (Nawawi) dan P (peneliti)

P Apa saja kegiatan selama menjadi relawan di Kabupaten Lombok Barat?

N Sehari pasca gempa, saya beserta tim relawan lainnya mendapatkan tugas di Kecamatan Gunung Sari. Kami melakukan kegiatan pencarian dan pendataan korban, karena gempa di Lombok tidak sekali melaikan terus menerus terjadi dengan intensitas yang cukup besar. Kami juga dari sanggar Midang melakukan pembuatan tenda-tenda darurat, serta membagikan bantuan-bantuan yang sudah kami kumpulkan bersama tim-tim. Karena sanggar kami bergerak pada bidang pendidikan, kami berinisiatif unuk memberikan trauma healing kepada anak-anak korban gempa dan masyarakat di tenda-tandang pengusnian, kami juga membangun sekolah darurat dan memberikan pelajaran mendasar agar anak-anak tidak terlalu jauh ketinggalan pelajarannya.

P Bagaimana langkah dalam pembuatan sekolah-sekolah darurat?

N Langkah awal kami membuat sekolah-sekolah darurat karena kami kasian dengan anak-anak yang rindu ingin bersekolah, mungkin dengan bersekolah mereka akan bisa mengobati rasa trauma akibat gempa. kami mensosialisasikan keinginan anak-anak kepada orang tua agar sekiranya memberikan ijin agar anak-anak mereka bias bersekolah, namun banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah-sekolah darurat yang kami bangun.

P Apakah ada kendala terkait dengan pembuatan sekolah-sekolah tersebut?

N Banyak kendala yang kami alami terkait dengan pembuatan sekolah darurat ini, salah satunya sudah di singgu di atas tadi. Bahan untuk mebuat sekolah ini kami mendapatkan sangatlah susah, karena pada saat itu semua membutuhkan terpal untuk tempat mengungsi, bahkan harga terpal bisa naik menjadi 2 kali lipat.





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Alamat : Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang Gerung - Telp. (0370) Kepala 681042 Sekretariat 681442  
Bid. Sosbud 681037 Bid. Fisik & Pras 681332 FAX 0370-681332

**SURAT IJIN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA**

Nomor : 070 / 110 / 02-Bappeda /2019

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-011/Ps/HM.01/02/2019 Tanggal: 22 Februari 2019 Perihal izin Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin kepada:

**N a m a** : **FITRIA APRIANI**  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**NIM** : 17710027  
**Jurusan/Prodi** : Manajemen Pendidikan Islam (S2)  
**Tujuan/Keperluan** : Penelitian  
**Judul** : **Kebijakan Pendidikan Pasca Gempa Di Kabupaten Lombok Barat**  
**Lokasi** : Lombok Barat  
**Lama** : 28 Februari - 28 Maret 2019

Demikian Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 28 Februari 2019

**a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Lombok Barat  
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan &  
Perencanaan Pembangunan,**



**Hj. LUH WAYAN WIRYATI, S.Pt., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19651217 198903 2 012

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Kepala Dinas Dikbud Kab. Lobar di Gerung ;
2. Sekolah Terdampak Gempa Di Kec. Gunungsari, Kec. Narmada dan Kec. Lingsar
3. Yang Bersangkutan Untuk Maklum ;
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Soekarno- Hatta Giri Menang Gerung, Telp/Fax. (0370) 681540, Kode Pos 83363  
E-Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

Gerung, 25 Maret 2019

Nomor : 670 /1195-Sekr/Dikbud/2019  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada :  
Yth. Direktur Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
(Pasca Sarjana)  
di-

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor : 070/110/02-Bappeda/2019, tanggal 28 Februari 2019, perihal : Surat Ijin Penelitian/Pengambilan Data, dengan ini kami nyatakan bahwa mahasiswa a.n. Fitria Apriani, telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas,  
Maulana Malik Ibrahim, Penyusunan Program,



Erwin Rachman, SE

Penata Tek. Y/III/d

NBP 1972130 200801 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT DIKBUD KECAMATAN NARMADA  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SELAT**



Jln. Suranadi II, Desa Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB, Kode Pos : 83371  
Website: [www.selat1.com](http://www.selat1.com) – email: [sdn1selat@gmail.com](mailto:sdn1selat@gmail.com)

Selat, 13 Maret 2019 M  
06 Rajab 1440 H

**SURAT KETERANGAN**

**NO. 421.2/09/SD.1 SLT/III/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, menerangkan kepada:

**N a m a** : FITRIA APRIANI  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**N I M** : 17710027  
**Jurusan** : Manajemen Pendidikan Islam (S-2), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
**Alamat** : Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok tengah

Bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan Penelitian di Sekolah Dasar Negeri 1 Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019, dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas Program Studi dari Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



SAIFUL BAHRI, S.Pd  
Pembina (IV/a)  
NIP : 19691231 199102 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SD NEGERI 2 KEKAIT**

Alamat: Jl Tanjung Wadon, Desa Kekait, Kec. Gunungsari Kode Pos 83351

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENELITIAN  
Nomor : 422.1/ 135 /SDN2 KEKAIT/2019

TENTANG

Bedasarkan surat penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nomor: 070/110/02-Bappeda/2019 Tanggal 28 Februari 2019 perihal izin penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa yang nama dibawah ini sudah melakukan penelitian :

Nama : Fitria Apriani  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nim : 17710027  
Jurusan/ prodi : Magister Manajemen Pendidikan Islam  
Tujuan : Penelitian  
Judul : Kebijakan penanganan Pendidikan Pasca Gempa di Kabupaten Lombok Barat  
Lokasi : SDN 2 Kekait

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kekait, 13 Maret 2019

Kepala Sekolah,



*Misbah*  
**MISBAH, S.Pd.**  
NIP.196312311984031134



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
UPTD DIKBUD KECAMATAN GUNUNGSARI  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GUNUNGSARI  
Alamat : Jln.Raya Tanjung Medas, Kec. Gunungsari, Lombok Barat Kode Pos 83351



**SURAT KETERANGAN**  
No. 48/SD.2/GS/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, menerangkan bahwa:

**Nama** : FITRIA APRIANI  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**NIM** : 17710027  
**Jurusan** : Manajemen Pendidikan Islam (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
**Alamat** : Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Bahwa yang bersangkutan memang benar telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas Program Studi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Gunungsari, 14 Maret 2019

Kepala Sekolah,

  
ERFAN, S.Pd

NIP. 19621231 198403 1 197





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT DIKBUD KECAMATAN GUNUNGSARI  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TAMANSARI**  
Jln. Raya Tanjung KM 6, Dusun Medas Baru Desa Tamansari  
Kec. Gunungsari Kode Pos 83351  
Email : [sdn3tamansari@gunungsari@gmail.com](mailto:sdn3tamansari@gunungsari@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 021/Ts-3/III/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PAUZUL BAYANI, S.Pd  
NIP. : 19671231 198911 1 014  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Kepala SDN 3 Tamansari

Menyatakan bahwa:

Nama : FITRIA APRIANI  
NIM. : 17710027  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam ( S2 )  
Lembaga : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Telah melakukan observasi sekaligus pengambilan Data di SDN 3 Tamansari Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat untuk keperluan penelitian, dengan judul Penelitian : KEBIJAKAN PENDIDIKAN PASCA GEMPA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

Demikian surat keterangan ini dibuat , agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medas Baru, 13 Maret 2019

KEPALA SEKOLAH



PAUZUL BAYANI, S.Pd  
NIP., 19671231 198911 1 014